



Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

KABUPATEN SIDOARJO
18 MARET 2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Telah Direviu	vii
Kata Pengantar	viii
Ikhtisar Eksekutif	ix
BAB I	1
BAB II	20
BAB III	50
Tujuan I	63
Tujuan II	100
Tujuan III	153
Tujuan IV	172
Tujuan V	219
Tujuan VI	241
BAB IV	283
BAB V	286

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo	4
Gambar 2.1 SWOT	36
Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis.....	40
Gambar 2.3 Peta Proses Bisnis.....	44
Gambar 3.1 RSUD R.T. Notopuro	204

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Desa dan Kelurahan per Kecamatan.....	3
Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2024	5
Tabel 1.3 Jumlah Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	6
Tabel 1.4 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	7
Tabel 1.5 PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)	9
Tabel 1.6 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	16
Tabel 2.1 Pokok – Pokok Visi Kabupaten	22
Tabel 2.2 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	24
Tabel 2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	32
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo	42
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	46
Tabel 3.1 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2024.....	53
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024.....	59
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2024	60
Tabel 3.4 Analisis Capaian Kinerja	63
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD	64
Tabel 3.6 Indikator Kinerja Sasaran 1	68
Tabel 3.7 Capaian Nilai SAKIP	68
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD	71
Tabel 3.9 Capaian Nilai Opini Atas Laporan BPK	74
Tabel 3.10 Tren Capaian Opini Tahun 2020-2023.....	75
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD	75
Tabel 3.12 Survey Eksternal Persepsi Korupsi	77
Tabel 3.13 Perolehan Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi.....	79
Tabel 3.14 Capaian Kapabilitas APIP Tahun 2021-2024	81
Tabel 3.15 Perolehan Hasil LPPD	81
Tabel 3.16 Perolehan Hasil LPPD 2022-2023	82
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD	82
Tabel 3.18 Nilai Indeks SPBE	85
Tabel 3.19 Nilai Indeks Inovasi Daerah.....	90
Tabel 3.20 Perkembangan Indeks Inovasi Daerah.....	90

Tabel 3.21 Realisasi SPIP	92
Tabel 3.22 Indikator Kinerja Sasaran II	96
Tabel 3.23 Analisis Capaian Kinerja.....	100
Tabel 3.24 Realisasi Pertumbuhan Ekonomi	100
Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD	101
Tabel 3.26 Realisasi Indeks Gini.....	107
Tabel 3.27 Indikator Kinerja Sasaran III	113
Tabel 3.28 Realisasi PDRB Sektor Perdagangan	114
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD	116
Tabel 3.30 Realisasi PDRB Sektor Industri.....	119
Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD	120
Tabel 3.32 Realisasi PDRB Sektor Pertanian.....	124
Tabel 3.33 Produktivitas Pertanian	127
Tabel 3.34 Produktivitas Peternakan.....	128
Tabel 3.35 Produktivitas Perikanan	128
Tabel 3.36 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap	129
Tabel 3.37 Perkembangan Hasil Olahan Perikanan	130
Tabel 3.38 Realisasi Nilai Investasi	132
Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD	132
Tabel 3.40 Nilai investasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023- 2024.....	134
Tabel 3.41 Indikator Kinerja Sasaran IV.....	138
Tabel 3.42 Persentase Usaha Mikro Mandiri	138
Tabel 3.43 Kelompok Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024	140
Tabel 3.44 Realisasi Koperasi Berkualitas.....	142
Tabel 3.45 Realisasi Desa Mandiri	148
Tabel 3.46 Analisis Capaian Kinerja.....	153
Tabel 3.47 Realisasi Tenaga Kerja yang Terserap di Sembilan sektor	163
Tabel 3.48 Realisasi Garis Kemiskinan.....	168
Tabel 3.49 Realisasi Indeks Infrastruktur dan IKLH	172
Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target 2024	174
Tabel 3.51 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	177
Tabel 3.52 Indikator Kinerja Sasaran 7	180

Tabel 3.53 Realisasi Infrastruktur Pekerjaan Umum	180
Tabel 3.54 Persentase Jalan Kabupaten	182
Tabel 3.55 Kondisi Jalan Kabupaten Sidoarjo	183
Tabel 3.56 Rekapitulasi Betonisasi Jalan Kabupaten Sidoarjo	184
Tabel 3.57 Data Ketersediaan Air Tahun 2023	187
Tabel 3.58 Kawasan Pemukiman Rawan Banjir	191
Tabel 3.59 Persentase Pelayanan Air Minum Aman 2021-2024	193
Tabel 3.60 Realisasi Pelayanan Air Bersih	194
Tabel 3.61 Persentase Kecukupan Kebutuhan sanitasi Layak	194
Tabel 3.62 Tren Capaian Penanganan Kawasan Kumuh	196
Tabel 3.63 Capaian Indikator Kinerja	197
Tabel 3.64 Indeks Infrastruktur Pendidikan	199
Tabel 3.65 Persentase Bangunan Ruang Kelas SD	200
Tabel 3.66 Persentase Bangunan Ruang Kelas SMP	201
Tabel 3.67 Indeks Infrastruktur Kesehatan	203
Tabel 3.68 Persentase Kondisi Bangunan RSUD	203
Tabel 3.69 Persentase Kondisi Bangunan Puskesmas	205
Tabel 3.70 Persentase Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	206
Tabel 3.71 Indeks Kualitas Air	207
Tabel 3.72 Perhitungan Kinerja Kualitas Air	208
Tabel 3.73 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Akhir RPJMD	208
Tabel 3.74 Realisasi Indeks Kualitas Udara	210
Tabel 3.75 Komposit Perhitungan Kinerja Kualitas Udara	211
Tabel 3.76 Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan	212
Tabel 3.77 Realisasi Indeks Resiko Bencana	214
Tabel 3.78 Hasil Pengukuran IKD 2023	217
Tabel 3.79 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Akhir RPJMD	217
Tabel 3.80 Realisasi Indeks Pembangunan Manusia	219
Tabel 3.81 Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo	223
Tabel 3.82 Persentase Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	224
Tabel 3.83 Realisasi Usia Harapan Hidup	230

Tabel 3.84 Realisasi Indeks Pembangunan Gender	239
Tabel 3.85 Realisasi Indeks Kesalehan Sosial	241
Tabel 3.86 Dimensi yang Mempengaruhi Perhitungan Indeks Kesalehan Sosial	241
Tabel 3.87 Realisasi Indeks Toleransi dan Indeks Pelestarian Budaya.....	245
Tabel 3.88 Capaian Masing-masing Variabel.....	247
Tabel 3.89 Variabel yang Menjadi Dimensi Pengukuran	
Indeks Pelestarian Budaya	248
Tabel 3.90 Realisasi Indeks Rasa Aman	250
Tabel 3.91 Klasifikasi Indeks Rasa Aman	251
Tabel 3.92 Capaian Tiap Dimensi	251
Tabel 3.93 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	253
Tabel 3.94 Realisasi Anggaran Tahun 2024	258



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO INSPEKTORAT DAERAH

Alamat Jl. Untung Suropati Nomor.10 Telepon.(031) 8948163 Fax.(031) 99010187
SIDOARJO - 61218
Email : inspektorat@sidoariokab.go.id Website : inspektoratdaerah.sidoariokab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, 25 Maret 2025

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.,CGCAE.,CGRA.
NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE., CGRA.
Pembina Utama Muda
NIP.197009261990031005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan dan dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidoarjo, 27 Maret 2025

BUPATI SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

SUBANDI, S.H., M.Kn.

SUBANDI, SH, M.Kn.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (Good Governance) dan berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga (ke-4) dari periode perencanaan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Secara umum tujuan dan sasaran melalui indikator-indikator keSangat Baikan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dapat tercapai dengan baik, dari 6 tujuan yang mencakup 9 indikator dan 13 sasaran yang mencakup 31 indikator rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 145,32% atau bermakna **SANGAT BAIK**.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, untuk mewujudkan Visi lima tahun kedepan, telah ditetapkan 5 Misi, 6 Tujuan, 9 Indikator Kinerja Tujuan, 13 Sasaran dan 31 Indikator Kinerja Sasaran. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran tahun ketiga (2023) periode perencanaan RPJMD Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

- a) Misi I terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 8 indikator kinerja sasaran:

- a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 1 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Keterangan
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Tercapai

- b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 8 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Tidak Tercapai
2.	Opini Atas Audit BPK	Belum Rilis
3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Tidak dilakukan penilaian
4.	Status Kinerja LPPD	Belum Rilis
5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Tidak Tercapai
6.	Indeks Inovasi Daerah	Tercapai
7.	Tingkat Maturitas SPIP	Tercapai
8.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Tercapai

- b) Misi II terdapat 2 tujuan, 4 indikator kinerja tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran:

- a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 4 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Keterangan
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Tidak Tercapai
2.	Indeks GINI	Tercapai
3.	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	Tercapai
4.	Persentase Penduduk Miskin	Tercapai

- b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 9 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Tidak Tercapai
2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	Tidak Tercapai
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	Tidak Tercapai
4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Tercapai
5.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	Tercapai
6.	Persentase Koperasi Berkualitas	Tercapai
7.	Persentase Desa Mandiri	Tercapai
8.	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	Tercapai
9.	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	Tercapai

- c) Misi III terdapat 1 tujuan, 2 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja sasaran:

- a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Keterangan
1.	Indeks Infrastruktur	Tercapai
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Tidak Tercapai

- b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 7 indikator sasaran, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Tercapai
2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Tercapai
3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Tercapai
4.	Indeks Kualitas Air	Tidak Tercapai
5.	Indeks Kualitas Udara	Tidak Tercapai
6.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Tidak Tercapai
7.	Indeks Resiko Bencana	Tidak Tercapai

- d) Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran:

- a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 1 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Keterangan
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tercapai

- b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 3 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tidak Tercapai
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tidak Tercapai
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tidak Tercapai
4.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Belum Rilis

- e) Misi V terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran:

- a) Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Keterangan
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Tercapai

- b) Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran, dengan ringkasan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1.	Indeks Toleransi	Tercapai
2.	Indeks Pelestarian Budaya	Tercapai
3.	Indeks Rasa Aman	Tercapai

Berdasarkan dengan ketercapaian indikator tujuan dan sasaran diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hasil analisis pencapaian terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan, diketahui 9 (sembilan) indikator dalam katagori Sangat Baik. Jika dirata-rata capaian kinerja tujuan tercapai 103,14% atau **Sangat Baik**. Hasil analisis pencapaian terhadap 13 (tiga belas) sasaran dengan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 16 indikator telah tercapai, 11 tidak tercapai dan 4 indikator belum ada release dari Kementerian Lembaga terkait. Berdasarkan hasil penilain diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dirata-rata capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 186,89% atau dalam katagori **Sangat Baik**. Jika dilihat dari ketercapaian tujuan dan sasaran dengan 9 indikator tujuan dan 31 indikator sasaran telah diperoleh nilai rata-rata sebesar 145,32%, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Sangat Baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa azas - azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun

anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban. Disamping itu juga merupakan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Tiga pilar *Good Governance* antara lain Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan stakeholders, tiga pilar ini merupakan spirit yang harus dimiliki dan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dan stakeholders terkait guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan dan dilaporkan terhadap keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi.

1.2 Penjelasan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

1.2.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

1) Kondisi Geografis

Kabupaten Sidoarjo, secara astronomis terletak di antara 7,30 – 7,50 LS (Lintang Selatan) dan antara 112,50 – 112,90 BT (Bujur Timur). Sementara secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Selat Madura di sebelah timur, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat. Kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 719,34 km² ini terbagi menjadi 18 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah sebesar 11,53 persen terhadap luas wilayah kabupaten secara keseluruhan. Diikuti oleh Kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,01 persen terhadap luas wilayah kabupaten. Kabupaten

Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan kota “Delta”, dikarenakan wilayahnya yang berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Surabaya di sebelah utara dan Kali Porong di sebelah selatan.

Tabel 1. 1 Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	12	3
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangun	18	-
8.	Jabon	13	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongbendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	318	28

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025



Gambar 1.1: Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai Bulan September dan di Bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim hujan. Suhu udara berkisar antara 20 s.d 35 derajat Celsius. Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,30 Hektar dan berdasarkan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu:

- a. 0 s.d 3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin / payau berada di belahan timur;
- b. 3 s.d 10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar; dan
- c. 10 s.d 25 meter terletak di daerah bagian barat.

Kondisi air ada dua jenis rasa air di Kabupaten Sidoarjo yaitu air asin dan air tawar, ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan jenis air asin dan 10 kecamatan murni air tawar. Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan

menjadi 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan yaitu permukiman, lahan sawah dan perikanan, pertambangan, industri (gudang, zona industri dan kawasan industri), fasilitas umum, perdagangan dan jasa, serta kawasan khusus militer.

Tabel 1. 2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)
1	Sidoarjo	62.03
2	Buduran	43.65
3	Candi	42.86
4	Porong	30.71
5	Krembung	27.90
6	Tulangan	31.31
7	Tanggulangun	29.78
8	Jabon	82.92
9	Krian	25.89
10	Balongsendo	44.34
11	Wonoayu	30.29
12	Tarik	39.73
13	Prambon	29.89
14	Taman	31.36
15	Waru	30.59
16	Gedangan	24.01
17	Sedati	79.23
18	Sukodono	32.85

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2025

BMKG mencatat selama Januari-Desember 2024 jumlah hari hujan di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 156 hari hujan dengan jumlah terbanyak pada bulan Desember dengan jumlah 27 hari hujan. Curah hujan dan jumlah hari hujan sepanjang 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Desember, sebesar 584,6 mm dengan hari hujan sebanyak 27 hari. Curah hujan turun secara signifikan di bulan Mei menjadi 0,5 mm dengan 4 hari hujan, namun kembali meningkat di bulan November, sebesar 209,6 mm dengan hari hujan sebanyak 17 hari.

**Tabel 1. 3 Jumlah Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2024**

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	396,8	24	78,0
Februari	445,3	23	85,0
Maret	125,6	19	22
April	363,0	22	80,0
Mei	0,5	4	1,0
Juni	98,4	11	36,0
July	24,5	2	20,0
Agustus	1,0	1	1,0
September	15,1	4	15,0
Oktober	8,1	2	8,0
November	209,6	17	50,0
Desember	584,6	27	96,0

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2025

2) Kondisi Demografis

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, berdasarkan laporan perkembangan penduduk di tahun 2024, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.027.874 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Grafik1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo



Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia Tahun 2024 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan / Desa / Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	TARIK	34.287	33.661	67.948
2	PRAMBON	40.264	39.307	79.571
3	KREMBUNG	34.613	34.488	69.101
4	PORONG	35.479	34.976	70.455
5	JABON	28.000	27.737	55.737
6	TANGGULANGIN	44.192	44.093	88.285
7	CANDI	78.922	78.869	157.791
8	SIDOARJO	99.232	100.938	200.170
9	TULANGAN	51.581	51.240	102.821

10	WONOAYU	43.082	42.256	85.338
11	KRIAN	67.041	65.770	132.811
12	BALONGBENDO	37.691	36.709	74.400
13	TAMAN	101.722	101.412	203.134
14	SUKODONO	63.169	62.409	125.578
15	BUDURAN	50.631	50.598	101.229
16	GEDANGAN	60.118	59.948	120.066
17	SEDATI	48.969	48.709	97.678
18	WARU	96.869	98.892	195.761
JUMLAH		1.015.862	1.012.012	2.027.874

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Apabila dijabarkan berdasarkan Kecamatan, maka Kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk terbanyak, dan yang terkecil adalah Kecamatan Jabon.

Grafik 1.2 Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2024



Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Ditjen Dukcapil Kemendagri

3) Kondisi Demografis

Nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 296,89 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 23,19 triliun rupiah dibandingkan tahun

2023 yang mencapai 273,70 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kenaikan produksi di seluruh lapangan usaha.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 160,95 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 169,87 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 terjadi percepatan terhadap perekonomian Sidoarjo sebesar 5,54 persen. Peningkatan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.

Pertumbuhan ekonomi Sidoarjo tahun 2024 sebesar 5,54 persen, mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2023 yang pertumbuhannya sebesar 6,16 persen. Salah satu indikator pendukung perlambatan adalah melambatnya pertumbuhan pada beberapa sektor unggulan di Kabupaten Sidoarjo antara lain transportasi dan pergudangan yang hanya tumbuh 7,87 persen pada tahun 2023 dan 22,14 persen pada tahun 2022.

Kondisi ekonomi daerah diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB diukur berdasarkan perhitungan 17 (tujuh belas) sektor usaha yang dominan di masyarakat. Rincian PDRB per sektor usaha Tahun 2024 berdasarkan angka sementara, sebagai berikut :

Tabel 1.5 PDRB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 (dalam Miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.291,45	2.766,84
2	Pertambangan dan Penggalian	70,13	40,60
3	Industri Pengolahan	144.199,37	88.214,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.939,15	1.677,73
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	159,41	128,34
6	Konstruksi	20.187,34	13.332,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	47.433,14	27.095,27
8	Transportasi dan Pergudangan	41.009,47	12.775,82

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.697,64	6.395,20
10	Informasi dan Komunikasi	9.649,99	8.353,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.260,96	1.814,50
12	Real Estate	2.359,18	1.606,75
13	Jasa Perusahaan	419,47	253,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.544,97	2.403,30
15	Jasa Pendidikan	2.900,49	1.867,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	858,48	565,78
17	Jasa Lainnya	906,46	576,00
	TOTAL	296.887,11	169.867,80

Sumber data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 berdasarkan ADHK dan ADHB terdapat sektor yang menonjol memberikan sumbangan paling besar terhadap PDRB yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

1.2.2 Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah melaksanakan unsur penunjang sekretariat daerah. Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- 1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Bagian Pemerintahan
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c. Bagian Hukum
 - d. Bagian Kerjasama
 - 2) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - b. Bagian Pembangunan
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - 3) Asisten Administrasi Umum
 - a. Bagian Organisasi
 - b. Bagian Umum
 - c. Bagian Protokol dan Rumah Tangga
 - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD melaksanakan unsur penunjang sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan unsur penunjang pengawasan.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

pada sub urusan jalan, sub urusan sumber daya air, dan sub urusan drainase;

- 4) Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan, pada sub urusan air limbah, sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jasa konstruksi, serta sub urusan penataan ruang;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 6) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 7) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 10) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
- 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

lingkungan hidup dan sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 13) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 14) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - 15) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
 - 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - 17) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
 - 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - 19) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- e. Badan Daerah terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan;
 - 3) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. Kecamatan, yang terdiri dari 18 kecamatan dan melaksanakan unsur penunjang kewilayahan, antara lain:
- 1) Kecamatan Sidoarjo dengan Tipe A;
 - 2) Kecamatan Candi dengan Tipe A;
 - 3) Kecamatan Buduran dengan Tipe A;
 - 4) Kecamatan Gedangan dengan Tipe A;
 - 5) Kecamatan Sedati dengan Tipe A;
 - 6) Kecamatan Waru dengan Tipe A;
 - 7) Kecamatan Taman dengan Tipe A;
 - 8) Kecamatan Krian dengan Tipe A;
 - 9) Kecamatan Wonoayu dengan Tipe A;
 - 10) Kecamatan Sukodono dengan Tipe A;
 - 11) Kecamatan Balongbendo dengan Tipe A;
 - 12) Kecamatan Tarik dengan Tipe A;
 - 13) Kecamatan Tulangan dengan Tipe A;
 - 14) Kecamatan Prambon dengan Tipe A;
 - 15) Kecamatan Krembung dengan Tipe A;
 - 16) Kecamatan Tanggulangin dengan Tipe A;
 - 17) Kecamatan Jabon dengan Tipe A;

18) Kecamatan Porong dengan Tipe A.

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten. Satuan Pendidikan Daerah kabupaten dimaksud berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah Kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola Minis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf Ahli. Staf Ahli tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf ahli dimaksud antara lain:

- a) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik
- b) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan
- c) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan SDM

1.2.3 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 13.934 orang yang terdiri dari, sebagai berikut :

Tabel 1.6 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

No	Perangkat Daerah	Struktural	Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Daerah	17	78	39	134
2	Sekretariat DPRD	5	41	8	54
3	Inspektorat	4	15	54	73
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16	341	6.970	7.327
5	Dinas Kesehatan	24	163	1.300	1.487
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	7	60	11	78
7	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	8	26	8	42
8	Satuan Polisi Pamong Praja	12	15	57	84
9	Dinas Sosial	6	10	5	21
10	Dinas Tenaga Kerja	6	8	16	30
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	12	6	24
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	6	9	4	19
13	Dinas Pangan dan Pertanian	8	39	95	142
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7	205	12	224
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	23	20	49
16	Dinas Perhubungan	19	47	14	80
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	35	14	56
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6	21	2	29
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	14	7	26
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6	37	5	48
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	11	14	31
22	Dinas Perikanan	5	21	4	30
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	121	11	140
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	24	17	48
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	50	7	63
26	Badan Pelayanan Pajak Daerah	5	71	9	85

27	Badan Kepegawaian Daerah	8	34	24	66
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	10	2	17
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	50	32	88
30	Rumah Sakit Umum Daerah	38	121	1.297	1.456
31	Kecamatan Sidoarjo	55	35	2	92
32	Kecamatan Candi	8	11	1	20
33	Kecamatan Buduran	8	11	2	21
34	Kecamatan Gedangan	8	10	1	19
35	Kecamatan Sedati	7	12	1	20
36	Kecamatan Waru	8	13	2	23
37	Kecamatan Taman	37	27	2	66
38	Kecamatan Sukodono	9	12	1	22
39	Kecamatan Wonoayu	7	13	1	21
40	Kecamatan Krian	8	12	0	20
41	Kecamatan Balongbendo	8	16	1	25
42	Kecamatan Tarik	5	16	1	22
43	Kecamatan Tulangan	8	11	1	20
44	Kecamatan Prambon	9	17	2	28
45	Kecamatan Krembung	6	12	1	19
46	Kecamatan Tanggulangin	9	12	1	22
47	Kecamatan Jabon	8	9	1	17
48	Kecamatan Porong	20	16	0	36
49	Rumah Sakit Umum Sidoarjo Barat	13	23	279	315
	TOTAL	516	2.000	10.364	12.879

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Dengan jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara tersebut sudah cukup untuk mendukung tercapainya RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Peningkat kualitas SDM terus dilakukan peningkatan baik dari segi softskill maupun hardskill dari aparatur dengan harapan kedepan akan adanya peningkatan secara bertahap dari segi kualitas/kompetensi SDM.

1.3 Isu Strategis Daerah

Dengan memperhatikan kelima kondisi Kabupaten Sidoarjo tersebut maka sudah terakomodir kedalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 yang merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis

mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi baik di tingkat internal maupun eksternal, maka RPJMD Kabupaten Sidoarjo berawal dari isu strategis sebagai berikut:

1. Belum terselenggaranya tata kelola Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital;
2. Pelayanan publik belum sepenuhnya mendukung kemudahan berusaha;
3. Kurangnya informasi terkait lapangan kerja melalui kemitraan dengan swasta dan penciptaan wirausaha sehingga penyerapan tenaga kerja belum maksimal;
4. Belum adanya penguatan Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
5. Penurunan presentase penduduk diatas garis kemiskinan masih menjadi prioritas;
6. Kualitas sarana prasaran kesehatan dan tenaga kesehatan belum merata;
7. Jaminan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan belum menyeluruh dan terintegrasi, sehingga akses susah dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah;
8. Infrastruktur belum berkualitas dan merata;
9. Kurangnya tersedianya sarana prasarana umum yang mudah diakses bagi disabilitas baik dalam tempat olahraga, tempat ibadah dan ruang publik lainnya;
10. Jaringan Komunikasi dan teknologi belum merata khususnya untuk daerah yang jauh dari perkotaan, sehingga aktivitas pemerintahan dan pendidikan masih tertinggal;

11. System pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) belum efektif dan efisien sehingga masih rendahnya kualitas lingkungan hidup;
12. Kebijakan penataan ruang wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Sidoarjo belum optimal;
13. Belum adanya integrasi antara pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung percepatan sektor strategis (pariwista, pertanian modern, perikanan dan jasa);

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026. Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi pada periode sebelumnya yakni tahun 2016 - 2021, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2021 – 2026. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 – 2025, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2021 – 2026, yakni:

**”TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA,
BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN”**

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok - pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana berikut:

- a) **Sidoarjo Sejahtera**; Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin

- b) diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
- c) **Sidoarjo Maju**; Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
- d) **Sidoarjo Berkarakter**; Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
- e) **Pembangunan Berkelanjutan**; Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalisasikan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi dijabarkan ke dalam tiap misi, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Pokok – Pokok Visi Kabupaten

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<i>“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”</i>	<i>Sidoarjo Sejahtera</i>	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.

	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola an diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Develompement</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.

<i>“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”</i>	<i>Pembangunan Berkelanjutan</i>	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo
--	---	--

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 2 Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<i>“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”</i>	<i>Sidoarjo Sejahtera</i>	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	<i>Sidoarjo Maju</i>	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha

	<i>Sidoarjo Berkarakter</i>	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	<i>Pembangunan Berkelanjutan</i>	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Pemetaan sebagaimana dilakukan pada tabel di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut :

a) Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

b) Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan

berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

c) Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

d) Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai

budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas

e) Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib

Menindaklanjuti terhadap 5 Misi Kabupaten Sidoarjo yang mendukung tercapainya Visi Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026, maka disusunlah konsep kerangka yang merupakan kerangka arsitektur kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 - 2026. Pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, juga dipaparkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas Bupati yang antara lain, sebagai berikut:

1. 100.000 Lapangan kerja baru
2. BPJS kesehatan gratis seluruh warga
3. Gratis makanan tiap hari warga miskin
4. 10.000 beasiswa kuliah
5. Insentif plus guru ngaji dan guru agama
6. Rp. 5juta - 50juta modal usaha mikro perempuan
7. Rp. 6juta operasional bagi RT
8. 20.000 UMKM naik kelas

9. Penataan Kota dan transportasi terpadu urau kemacetan
10. Tingkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kader posyandu
11. Tingkatkan kesejahteraan GTT, guru swasta, dan tenaga honorer
12. Youth center, bangunan pusat kreativitas anak muda
13. 2.000 warung rakyat direnovasi
14. Tingkatkan ADD untuk Desa sejahtera
15. 24 jam pengaduan rakyat respon cepat
16. Reformasi perijinan untuk bisnis yang kondusif
17. Perluasan RTH, revitalisasi sungai, revolusi manajemen sampah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

Adapun tujuan beserta indikator pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.
- 2) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan. Terciptanya lapangan kerja yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan dengan Indikator kinerja: a) Pertumbuhan Ekonomi; b) Indeks Gini; c) Tingkat pengangguran terbuka; d) Prosentase penduduk miskin.
- 3) Meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan Indikator kinerja: a) Indeks infrastruktur; b) Indeks kualitas lingkungan hidup.
- 4) Terwujudnya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya dengan Indikator kinerja Indeks pembangunan manusia (IPM).

- 5) Menguatnya karakter masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat Indikator kinerja Indeks kesalehan social.

b) Sasaran

- 1) Terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital dengan Indikator kinerja: a) Nilai SAKIP Kabupaten; b) Opini Atas Audit BPK; c) Survey eksternal persepsi korupsi; d) Status Kinerja LPPD; e) Nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik); f) Indeks inovasi daerah; g) Tingkat Maturitas SPIP.
- 2) Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung kemudahan berusaha. dengan Indikator kinerja Indeks pelayanan publik
- 3) Berkembangnya perdagangan, industri, investasi, pertanian dan perikanan dengan Indikator kinerja: a) Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan; b) Persentase kontribusi PDRB sektor industri; c) Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas; d) Persentase pertumbuhan nilai investasi.
- 4) Berkembangnya koperasi, usaha mikro dan kemandirian desa dengan Indikator kinerja: a) Persentase usaha mikro mandiri; b) Persentase koperasi berkualitas; c) Persentase desa mandiri.
- 5) Terserapnya tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran dengan Indikator kinerja Persentase tenaga kerja yang terserap di sembilan sektor.
- 6) Menurunnya penduduk miskin dengan Indikator kinerja Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (GK)
- 7) Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata dengan indikator Indikator kinerja: a) Indeks infrastruktur

pekerjaan umum; b) Indeks infrastruktur pendidikan; c) Indeks infrastruktur kesehatan.

- 8) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan terhadap bencana dengan Indikator kinerja: a) Indeks kualitas air; b) Indeks kualitas udara; c) Indeks kualitas tutupan lahan; d) Indeks resiko bencana.
- 9) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dengan Indikator kinerja: a) Harapan lama sekolah (HLS); b) Rata-rata lama sekolah (RLS).
- 10) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan Indikator kinerja Usia harapan hidup (UHH)
- 11) Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat dengan Indikator kinerja Indeks pembangunan gender (IPG).
- 12) Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam masyarakat dengan Indikator kinerja: a) Indeks toleransi; b) Indeks pelestarian budaya.
- 13) Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram dengan Indikator kinerja Indeks Rasa Aman.

Berikut keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator keberhasilannya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026, sebagaimana tabel:

**Tabel 2. 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun
2021-2026**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi-1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Tata	Nilai SAKIP Kabupaten
			Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Opini atas Audit BPK
				Survey Eksternal Persepsi Korupsi
				Status Kinerja LPPD
				Nilai Indeks SPBE
				Indeks Inovasi Daerah
				Tingkat Maturitas SPIP
Misi-2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan Ekonomi	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
			Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha.	
			Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan
				Persentase kontribusi PDRB sektor industri
				Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas

Misi-2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan				Pesentase pertumbuhan nilai investasi
		Indeks GINI	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase usaha mikro mandiri
				Persentase koperasi berkualitas
				Persentase Desa Mandiri
	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase tenaga kerja yang terserap di sembilan sektor
		Persentase penduduk miskin	Menurunnya Penduduk miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan
Misi-3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum
				Indeks Infrastruktur Pendidikan
				Indeks Infrastruktur Kesehatan
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara
				Indeks Kualitas Tutuan Lahan
				Indeks Resiko Bencana

Misi-4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)
				Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
			Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Misi-5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi
			Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Indeks Rasa Aman

Sumber Data : Dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 dengan kinerja Renstra OPD Tahun 2021 – 2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

1. Keselarasan Kinerja MISI – 1

Misi 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
Tujuan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.
Sasaran 1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.
Sasaran 2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.

2. Keselarasan Kinerja MISI – 2

Misi 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
Tujuan 1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan.
Sasaran 1	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.
Sasaran 2	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.
Tujuan 2	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan.
Sasaran 3	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran.
Sasaran 4	Menurunnya Penduduk Miskin.

3. Keselarasan Kinerja MISI – 3

Misi 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
Tujuan	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya.
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.
Sasaran 3	Meningkatnya Kesenjangan Gender dalam masyarakat

4. Keselarasan Kinerja MISI – 4

Misi 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
Tujuan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
Sasaran 1	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.

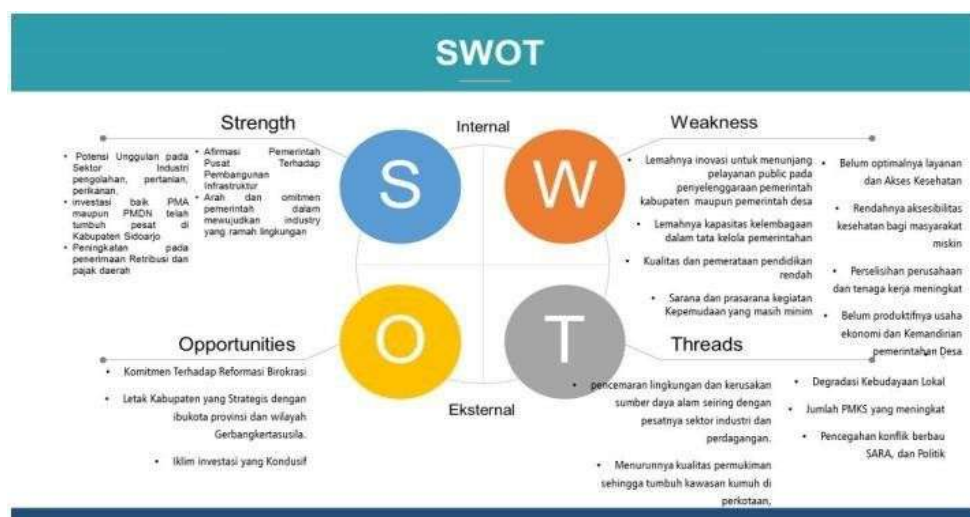
5. Keselarasan Kinerja MISI – 5

Misi 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
Tujuan	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat.
Sasaran 1	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat.
Sasaran 2	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram.

2.1.3 Strategi

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Berikut analisa SWOT dari isu – isu strategis pembangunan Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1: SWOT



Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dirumuskan dalam strategi, sebagai berikut:

- a) Strategi S-O ; yang ditetapkan adalah Penguatan Ekonomi yang berdayasaing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis eco Industri. Dimaksudkan pada strategi ini yaitu Industri olahan, UMKM, Pertanian dan Perikanan kelautan merupakan sektor sektor potensial Kabupaten Sidoarjo yang perlu didorong oleh pemerintah. Sebab, sektor-sektor potensial tersebut menjadi kekuatan dari pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidoarjo. agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor, industri olahan, UMKM, pertanian, Perikanan dan kelautan. Pajak daerah dan restribusi merupakan salah satu penyumbang terbesar dari pendapatan asli daerah, hal ini tentunya perhatian dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Kabupaten Sidoarjo. investasi baik PMA maupun PMDN telah tumbuh positif.
- b) Strategi S-T ; yang ditetapkan adalah Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektifitatas antar wilayah dan infrastruktur strategis penunjang perekonomian, serta pembangunan yang patuh akan rencanana tata ruang. Sesuai dengan Konsep Sustainable Development, maka pembangunan lingkungan hidup menjadi salah satu unsur yang perlu perhatian guna untuk generasi mendatang dan menjaga dari dampak perubahan iklim
- c) Strategi W-O ; yang ditetapkan adalah Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government. Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah

melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertanggungjawabkan hasil-hasil (outcome) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan. Smart governance prinsip dasar yaitu mengkolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh masyarakat, mengembangkan operasional, meningkatkan manajemen organisasi, membuat system database yang dapat diakses secara umum, mengolah informasi yang up to date, menggunakan teknologi yang mutakhir, adanya koordinasi stakeholder.

- d) Strategi W-T (1) ; yang ditetapkan adalah Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. Membangun generasi yang profesional menjadi prioritas utama dalam Kabupaten Sidoarjo mengingat daya saing dan kompetensi semakin meningkat. Kualitas pendidikan yang baik selaras dengan akses seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau serta pemerataan pendidikan pada wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya yang bertujuan untuk mencegah, merawat dan mengobati, pemulihan kesehatan terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan

masyarakat, upaya tersebut didorong dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keterjangkauan seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Masyarakat secara merata.

- e) Strategi W-T (2) ; yang ditetapkan adalah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan. pada strategi ini menciptakan adanya social sustainability, prinsip utamanya yaitu equity, individu mempunyai akses berpartisipasi secara penuh. kedua, social inclusion and interaction, adanya hak untuk kesempatan berpartisipasi baik meliputi partisipasi dalam pembangunan maupun dalam berpolitik. Ketiga, security jaminan untuk lingkungan yang aman dan mendukung. Terakhir yaitu adaptability kelenturan terhadap komunitas. Strategi ini juga menciptakan adanya penguatan pada demokrasi Pancasila.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan tatakelola Pemerintahan dan Inovasi pelayanan publik.
- 2) Penguatan ekonomi sektor strategis simultan dengan percepatan ekonomi kerakyatan.
- 3) Pemenuhan infrastruktur tata kota terintegrasi dengan pengembangan wilayah dan sistem transportasi terpadu.
- 4) Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development).
- 5) Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai spirit pembangunan.

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan

rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan serta prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan dituangkan dalam tema pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis



Arah Kebijakan Umum di atas yang merupakan manifestasi dari Strategi Umum, dapat dijadikan sebagai Milestone pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2022-2026. Milestone yang berangkat dari Arah Kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan tahapan besar pembangunan bagi perencanaan tahunan di tingkat daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah. Pada tahap implementasinya, arah kebijakan di atas diselaraskan dengan tema pembangunan tahunan nasional dan provinsi Jawa Timur. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) Nomor 09 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode tahun 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disajikan dalam table berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama
1.	Indeks Reformasi Birokrasi
2.	Petumbuhan Ekonomi
3.	Indeks Gini
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
5.	Persentase Penduduk Miskin
6.	Indeks Infrastruktur
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
8.	Indeks Pembangunan Manusia
9.	Indeks Kesalehan Sosial

2.1.6 Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Sidoarjo menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas / hubungan sebab akibat dan alignment / keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut :

```

graph TD
    A[METODE PENELITIAN] --> B[Tinjauan  
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat, Tinjauan  
dan Pengumpulan data dan Pengolahan data dan uji hipotesis  
keberhasilan dalam dan keberhasilan demokrasi]
    B --> C[INSTRUMENTASI PENELITIAN  
Metode kuantitatif deskriptif]
    C --> D[Terdapatnya data dalam pemerintahan yang bersih,  
transparan dan terjamin keabsahan digital]
    C --> E[Pro Pengumpulan data]
    C --> F[Terdapatnya instrumen patita yang berakurasi dalam rangka  
mendukung terwujudnya demokrasi elektronik]
    E --> G[Pro Pengolahan data dan uji hipotesis]
  
```

METODE PENELITIAN

Tinjauan
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat, Tinjauan dan Pengumpulan data dan Pengolahan data dan uji hipotesis keberhasilan dalam dan keberhasilan demokrasi

INSTRUMENTASI PENELITIAN
Metode kuantitatif deskriptif

Terdapatnya data dalam pemerintahan yang bersih, transparan dan terjamin keabsahan digital

- Data SAKIP Kabupaten
- Data LAPK
- Survey Standar transparansi dan integritas
- Standar integritas
- Data indeks SPIK (Skor Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas)
- Indeks Integritas

Pro Pengumpulan data

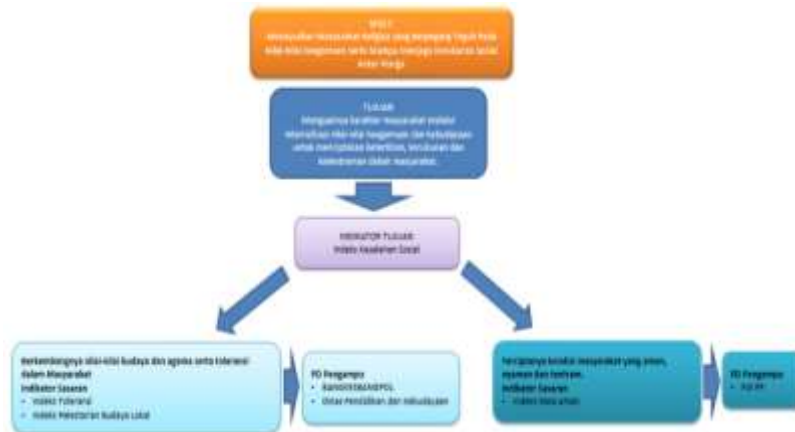
- Jarak
- Inspeksi dari BPLAD
- BERTISA
- Jarak
- Komunitas
- BERTISA
- Inspeksi dari BPLAD

Terdapatnya instrumen patita yang berakurasi dalam rangka mendukung terwujudnya demokrasi elektronik

- Indeks Integritas

Pro Pengolahan data dan uji hipotesis

e) Cascading Kinerja Misi 5



2.1.7 Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dengan adanya peta proses bisnis maka akan mudah dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan memiliki standart pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut diagram alur dari peta proses bisnis Kabupaten Sidoarjo baik BPMN (Bisnis Proses Model dan Notasi) maupun diagram level / tingkatannya. Bisnis Proses Model dan Notasi:

Gambar 2.3 Peta Proses Bisnis



2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- c) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;

d) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Sidoarjo di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha		
	Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	Nilai SAKIP Kabupaten	A
		Opini Atas Laporan BPK	WTP
		Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,85
		Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,00
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A-Prima

	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan		
	Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	4,23
		Indeks Gini	0,345
3	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,24
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	53,19
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	2,95
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	1,29
4	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase Usaha Mikro Mandiri	2,04
		Persentase Koperasi Berkualitas	26,39
		Persentase Desa Mandiri	15,53
	Tujuan 3 : Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	9,76
		Persentase Penduduk Miskin	5,30%
5	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	90,24
6	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	94,70

	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan		
	Tujuan 4: Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	0,780
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,82
7	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,766
		Indeks Infrastruktur Pendidikan	88,64
		Indeks Infrastruktur Kesehatan	72,32
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Air	51,55
		Indeks Kualitas Udara	85,17
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,13
		Indeks Resiko Bencana	86,98
	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya		
	Tujuan 5 : Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,17
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,89
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,56
10	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,98
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,37

	Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.		
	Tujuan 6 : Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Sosial Kesalehan	87,30
12	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi	81,76
		Indeks Pelestarian Budaya	66,76
13	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Indeks Rasa Aman	80,02

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan wujud kewajiban Bupati selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintah Daerah kepada publik atas kinerja yang telah dicapai. Pedoman penyusunan laporan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 menetapkan Visi : **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”** , didukung 5 Misi dan 6 Tujuan, 13 Sasaran Strategis, 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 31 Indikator Kinerja Daerah (IKD). Hasil penyelenggaraan pembangunan dijabarkan dalam 23 urusan wajib (6 urusan wajib pelayanan dasar dan 17 urusan wajib pelayanan non dasar), 6 urusan pilihan dan 5 urusan pemerintahan fungsi penunjang telah dipetakan dalam Tujuan dan indikator Tujuan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2024. Dalam Laporan kinerja ini akan disajikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis seperti yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Oleh karena itu hasil penyelenggaraan pemerintahan harus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Formulasi pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis adalah membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

- Indikator positif apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaian kinerjanya, dengan rumus =

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Indikator negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya, dengan rumus:

Persentase Capaian Kinerja =

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal dan kriteria keberhasilan yang digunakan dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 90,01%	Sangat Baik
2	80,01% s.d 90%	Baik
3	70,01% s.d 80%	Cukup
4	Kurang dari 70%	Kurang

Sumber: PERBUP NO. 06 Tahun 2021

Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Sidoarjo Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati Sidoarjo merupakan kinerja tahun ke-4 pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian seluruh kinerja tujuan atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah 103,14%, sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah

sebesar 186,89%, yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

Adapun data detail hasil pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
	MISI 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha						
	TUJUAN 1	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha						
	Indikator Kinerja		Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB (78,00)	A (86,47)	110,86	MENPAN RB
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A (81)	BB (75,64)	93,38	MENPAN RB
		2.	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP*)	100	BPK
		3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,85	85,63 (3,42)**)	90,96	KPK
		4.	Status Kinerja LPPD	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100	BPKP
		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	4,00	3,97	99,25	MENPAN RB
		6.	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif (62,00)	Sangat Inovatif (75,96)	122,52	MENPAN RB
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Kategori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100	BPK
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	A- (4,3) Sangat Baik	A (4,65) Prima	103,33	MENPAN RB

	Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	MISI 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan						
	TUJUAN 2	:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan					
	Indikator Kinerja :	1.	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	6,78	5,540	81,71	BPS
		2.	Indeks Gini	Indeks	0,345	0,327	105,22	BPS
3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,24	15,98	98,40	BPS
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	53,19	48,57	91,31	BPS
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%	2,95	1,32	44,75	BPS
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1,29	24,9	1930,23	BKPM
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	2,04	2,21	108,33	Dinas Koprasi dan Usaha Mikro
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	%	26,39	26,73	101,33	Dinas Koprasi dan Usaha Mikro
		3.	Persentase Desa Mandiri	%	28,88	67,92	235,18	KEMENDES

	TUJUAN 3	:	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan					
	Indikator Kinerja	1.	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	7,96	6,49	122,65	BPS
		2.	Persentase Penduduk Miskin	%	4,87	4,53	107,51	BPS
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran		Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	%	90,24	93,51	103,62	BPS
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	%	95,13	95,47	100,36	BPS
	MISI 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan						
	TUJUAN 4	:	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan					
	Indikator Kinerja	1.	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,780	0,850	108,97	BPS
		2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,82	53,35	89,18	BPS

7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,766	0,822	107,31	BAPPEDA
		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	88,64	95,60	107,85	BAPPEDA
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	72,32	84,82	117,28	BAPPEDA
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1.	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,55	49,71	96,43	DLHK
		2.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,17	71,91	84,43	DLHK
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,13	25,28	93,18	DLHK
		4.	Indeks Resiko Bencana	Indeks	86,98	96,70	86,83	BNPB
	MISI 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya						
	TUJUAN 5	:	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya					
	Indikator Kinerja	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,17	82,67	101,85	BPS
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,89	15,22	95,78	BPS
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,56	10,91	94,38	BPS
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,98	75,63	99,54	BPS

11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,37	94,72*)	99,32	BPS
	MISI 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.						
	TUJUAN 6	:	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat					
	Indikator Kinerja	1.	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	87,30	87,33	100,03	Bappeda
12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	Indeks	81,76	86,64	105,97	Bappeda
		2.	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	66,76	92,55	138,63	Bappeda
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	Indeks	80,02	83,03	103,76	Bappeda

Keterangan:

*) : Realisasi menggunakan realisasi tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU), merupakan ukuran capaian kinerja tertinggi dari tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 terdapat 9 IKU yang menjadi tolak ukur keberhasilan utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang capain hasil keberhasilan kinerjanya pada tahun anggaran 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2021	2022	2023	2024			Ket
						Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B (67,66)	B (68,88)	BB (75,38)	BB (78,00)	A (86,47)	110,86	Tercapai
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,21	7,53	6,16	6,78	5,540	81,71	Tidak Tercapai
3	Indeks Gini	Poin	0,347	0,373	0,359	0,345	0,327	105,22	Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,87	8,80	8,05	7,96	6,490	122,65	Tercapai
5	Persentase Penduduk Miskin	%	5,93	5,36	5,00	4,87	4,530	107,51	Tercapai
6	Indeks Infrastruktur	Poin	0,793	0,792	0,843	0,780	0,850	108,97	Tercapai
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	59,81	57,54	58,99	59,82	53,350	89,18	Tidak Tercapai
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	80,65	81,02	81,88	81,17	82,670	101,85	Tercapai
9	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	82,03	84,23	85,15	87,30	87,330	100,03	Tercapai

Sumber data: RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021- 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas, untuk 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo tahun 2024, adalah sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 7 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;

- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target:
dan
- 4) Target yang tidak tepat dapat diperoleh hasil pengukurannya
sebanyak 0 target.

Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan terhadap penyelenggaraan program Perangkat Daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, capaian keberhasilan kinerja penyelenggaraan program Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A (81)	BB (75,64)	93,38	Tidak Tercapai
2	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP*)	100	Belum rilis
3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,85	85,63 (3,42)**)	90,95	Sudah tidak dilakukan penilaian
4	Status Kinerja LPPD	Kategori	Sangat Tinggi (4,3)	Sangat Tinggi (3,78)*)	87,90	Belum rilis
5	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	4,00	3,96	99	Tidak Tercapai
6	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif (62,00)	Sangat Inovatif (75,96)	122,52	Tercapai
7	Tingkat Maturitas SPIP	Kategori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100	Tercapai
8	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	A- (Sangat Baik) 4,30	A (Prima) 4,65	108,14	Tercapai

9	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,24	15,98	98,40	Tidak Tercapai
10	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	53,19	48,57	91,31	Tidak Tercapai
11	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%	2,95	1,32	44,75	Tidak Tercapai
12	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1,29	24,9	1930,23	Tercapai
13	Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	2,04	2,21	108,33	Tercapai
14	Persentase Koperasi Berkualitas	%	26,39	26,73	101,29	Tercapai
15	Persentase Desa Mandiri	%	28,88	67,92	235,18	Tercapai
16	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	%	91,95	93,51	101,70	Tercapai
17	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	%	95,13	95,47	100,36	Tercapai
18	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,766	0,822	107,33	Tercapai
19	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	88,64	95,60	107,85	Tercapai
20	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	72,32	84,82	117,28	Tercapai

21	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,55	49,71	96,43	Tidak Tercapai
22	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,17	71,91	84,43	Tidak Tercapai
23	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,13	25,28	93,18	Tidak Tercapai
24	Indeks Resiko Bencana	Indeks	86,98	96,70	88,83	Tidak Tercapai
25	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,89	15,22	95,78	Tidak Tercapai
26	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,56	10,91	94,38	Tidak Tercapai
27	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,98	75,63	99,54	Tidak Tercapai
28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,37	94,72*)	99,32	Belum rilis
29	Indeks Toleransi	Indeks	81,76	86,64	105,97	Tercapai
30	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	66,76	92,55	138,63	Tercapai
31	Indeks Rasa Aman	Indeks	80,02	83,03	103,76	Tercapai

Sedangkan untuk capaian 31 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sebagaimana tabel diatas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 15 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 11 target: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 4 target. karena belum dirilis oleh kementerian dan lembaga terkait, oleh karena itu angka yang ada pada tabel dengan symbol *) merupakan realisasi tahun 2023 dan symbol **) untuk tahun 2022.

Tabel 3.4
Analisis Capaian Kinerja

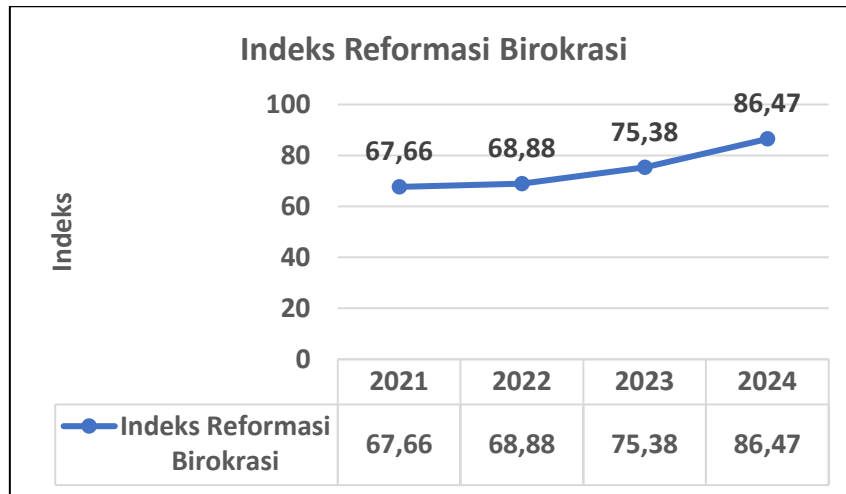
Tujuan Pertama: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.					
Indikator Tujuan/IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB (78,00)	A (86,47)	110,86	Tercapai

1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo terus mengalami perbaikan signifikan dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2024, Kabupaten Sidoarjo berhasil memperoleh nilai indeks reformasi birokrasi sebesar **86,47** atau predikat A, **melampaui target tahun ini yaitu BB dan sekaligus telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026 dengan predikat A.** Capaian tersebut mengalami peningkatan **11,09 poin** dari tahun sebelumnya dengan skor **75,38**. Peningkatan ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjalankan reformasi birokrasi secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam perkembangannya, capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2021 – 2024, sebagai berikut :



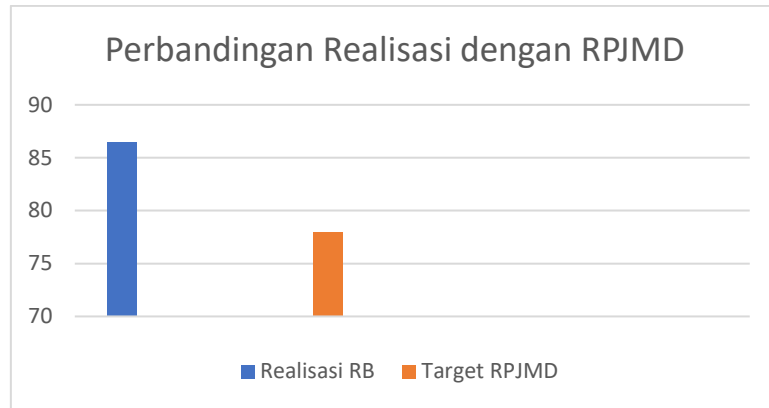
Sebagaimana grafik diatas, perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2021 – 2024 terus mengalami peningkatan.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	A (86,47)	BB (78,00)	110,86

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021- 2026

Dari tabel diatas diketahui target akhir RPJMD tahun 2026 adalah BB atau 78,00 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 86,47(A) sehingga persentase capaian nya adalah 110,86%. Berikut adalah grafik pencapaian Reformasi Birokrasi dibandingkan dengan target RPJMD.



Beberapa faktor utama **Pendukung Peningkatan Reformasi Birokrasi** yang berkontribusi terhadap peningkatan skor reformasi birokrasi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 antara lain:

1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - Implementasi sistem manajemen kinerja yang lebih transparan dan terukur.
 - Peningkatan evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) berbasis indikator kinerja utama (IKU).
 - Optimalisasi sistem pelaporan berbasis digital guna memastikan keterbukaan informasi publik.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Digitalisasi layanan publik melalui sistem pelayanan berbasis elektronik (e-government).
 - Penyederhanaan prosedur layanan administrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
 - Penguatan mekanisme pengaduan masyarakat untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah.
3. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Internal
 - Penguatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
 - Peningkatan peran Inspektorat dalam melakukan audit kinerja dan kepatuhan.
 - Implementasi sistem pengendalian gratifikasi dan whistleblowing system untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
4. Pengembangan SDM Aparatur yang Profesional
 - Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
 - Implementasi sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia.
 - Penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan prima.

5. Peningkatan Kinerja Organisasi dan Budaya Kerja

- Pembentukan budaya kerja yang adaptif dan inovatif.
- Penerapan sistem kerja berbasis kinerja yang lebih produktif.
- Peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah untuk memastikan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi.

Dampak dan Implikasi Peningkatan nilai reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, peningkatan efektivitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Sidoarjo semakin dekat menuju tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.

Keberhasilan dalam peningkatan skor reformasi birokrasi tahun 2024 menunjukkan komitmen kuat seluruh pejabat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- Memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi.
- Melanjutkan inovasi dalam layanan publik berbasis teknologi digital.
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah.
- Mengevaluasi secara berkala pelaksanaan reformasi birokrasi guna mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan Kabupaten Sidoarjo dapat terus meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan

Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”, didukung melalui 2 Sasaran Strategis, sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas dan Berbasis Digital;
- 2) Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.

Sasaran 1: Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas dan Berbasis Digital.

Tabel 3.6 Indikator Kinerja Sasaran 1

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A (81)	BB (75,64)	93,38	Tidak Tercapai
2.	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP*)	100	Belum rilis
3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,85	85,63 (3,42)*	90,95	Sudah tidak dilakukan penilaian
4.	Status Kinerja LPPD	Kategori	Sangat Tinggi (4,3)	Tinggi (3,78)*	87,90	Belum rilis
5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	4,00	3,97	99,25	Tidak Tercapai
6.	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif (62,00)	Sangat Inovatif (75,96)	122,52	Tercapai
7.	Tingkat Maturitas SPIP	Kategori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100	Tercapai

Keterangan:

*) Realisasi tahun 2023

*) Realisasi tahun 2022

Sasaran I

Indikator Kinerja ke- 1: Nilai SAKIP Kabupaten

Tabel 3.7 Capaian Nilai SAKIP

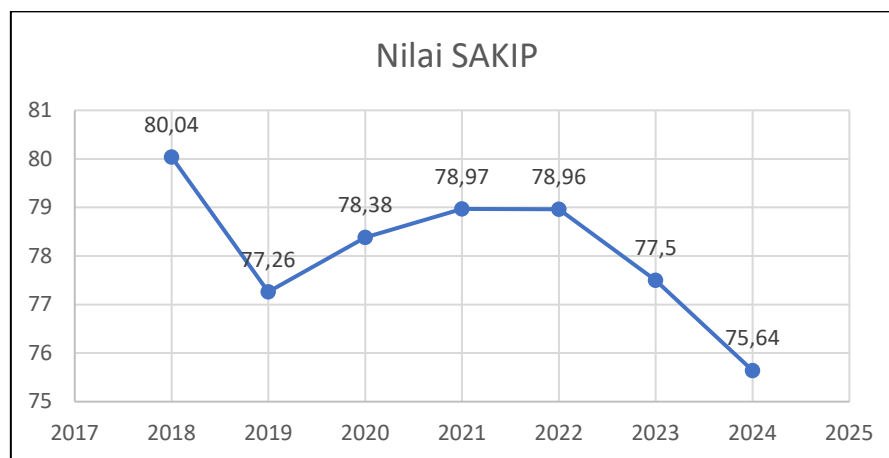
N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A (81)	BB (75,64)	93,38	AA (90,1)	83,95	Tidak Tercapai

Sumber data: Kementerian PANRB

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah

dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana evaluasi tersebut meliputi 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo adalah 75,64 atau kategori BB. Hasil tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu A (Memuaskan) dan bahkan stagnan di kategori BB sejak tahun 2019 dan dua tahun terakhir telah mengalami penurunan. Berikut grafik perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2018 – 2024.



Sumber data: LHE Menpan RB

Berdasarkan perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo serta capaian target akhir RPJMD tahun 2026 adalah AA, merupakan tantangan yang amat berat bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu Kabupaten Sidoarjo harus bekerja ekstra keras untuk mencapainya, perlu komitmen yang kuat dari setiap elemen yang ada, mulai pimpinan dan semua sumber daya yang dimiliki harus serius bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkannya. Kalau

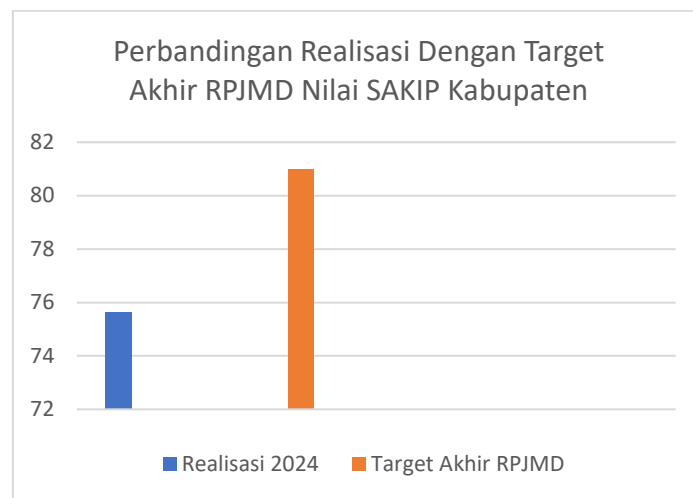
dibandingkan dengan nilai rata-rata Kabupaten/Kota secara Nasional sebesar 64,23, maka Kabupaten Sidoarjo masih unggul 11,41 poin.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Nilai SAKIP Kabupaten	BB (75,64)	A (81)	95,68

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021- 2026

Dari tabel diatas diketahui target akhir RPJMD tahun 2026 adalah A atau 81 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 75,64 (BB) sehingga persentase capaian nya adalah 95,68%. Berikut adalah grafik pencapaian Nilai SAKIP Kabupaten dibandingkan dengan target RPJMD.



Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan implementasi SAKIP, antara lain :

1. Membangun komitmen bersama Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah atas penambahan kinerja kolaborasi pada tujuh tema, antara lain : Penataan Taman, Penataan Pendestrian jalan, Penataan Kabel Optik, Penataan Reklame, Penataan Pasar, Penataan Parkir dan Penanggulangan Banjir

2. Melaksanakan evaluasi kinerja Kepala Perangkat daerah bersama tim penilai kinerja pelayanan public setiap tahun;

3. Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan SAKIP pada Pejabat Perencanaan Perangkat Daerah;
4. Membangun aplikasi PAKSI sebagai aplikasi e-SAKIP di Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SAKIP;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang sudah dibuat setiap tribulan dengan aplikasi e-Monev;
6. Melakukan evaluasi internal Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dengan mengacu Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021;
7. Memasukkan nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai salah satu bahan pertimbangan pemberian besaran TPP (Perbup Nomor 106 Tahun 2022);
8. Memberikan reward dan punishment bagi Perangkat Daerah atas nilai SAKIP yang dicapai.

Kendala atas ketidak tercapaian Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pohon Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum dilakukan reviu sesuai Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
2. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi PAKSI sebagai aplikasi e-SAKIP di Kabupaten Sidoarjo;
3. Banyaknya pejabat perencanaan yang dirotasi sehingga digantikan pejabat baru yang masih belum faham tentang SAKIP;

Upaya-upaya yang akan dilakukan Kabupaten Sidoarjo kedepan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas SAKIP pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP tahun 2024 dengan mengkoordinasikan dan menyusun rencana aksi atas rekomendasi dimaksud;
2. Melakukan reviu penjenjangan kinerja/pohon kinerja yang disesuaikan dengan Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021;

3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi PAKSI sebagai aplikasi e-SAKIP di Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SAKIP;
4. Terus melakukan pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan SAKIP pada Perangkat Daerah;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala bersama Tim SAKIP untuk menjaga kualitas implementasi SAKIP di Kabupaten Sidoarjo.

Sasaran I

Indikator Kinerja ke- 2: Opini Atas Laporan BPK

Tabel 3.9 Capaian Nilai Opini Atas Laporan BPK

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
2.	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP*)	100	WTP	100	Sangat Baik

Sumber data: BPK 2023

Opini atas audit BPK untuk Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2024, sampai laporan ini disusun belum dapat rilis dari BPK. Sampai tahun 2023 atau dalam kurun waktu 10 tahun ini Kabupaten Sidoarjo selalu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan konsistensi dan komitmen dalam mengelola keuangan yaitu Laporan Keuangan (LK) telah tersaji secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Adapun tren capaian Opini atas Audit BPK 5 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10

Tren Capaian Opini Tahun 2020-2023

Tahun	Opini atas Audit BPK
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Demikian juga bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target WTP, Kabupaten Sidoarjo tinggal mempertahankannya atas capaiannya selama ini karena Kabupaten Sidoarjo sudah mencapainya secara berturut-turut dari 10 tahun yang lalu.

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Opini atas laporan BPK	WTP*)	WTP	100

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021- 2026

Dari tabel diatas diketahui target akhir RPJMD tahun 2026 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sedangkan realisasi tahun sudah mencapai WTP sehingga persentase capaian nya adalah 100%.

Upaya yang dilakukan agar dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, yaitu :

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, dengan memastikan bahwa laporan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) atau standar yang berlaku. Kemudian menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan keuangan;

2. Melakukan pengelolaan aset dengan baik dan benar, dengan melakukan inventarisasi dan pencatatan aset tetap secara berkala dan dipastikan tercatat dengan benar, tidak fiktif serta sesuai dengan

3. nilai wajar, dan menghindari aset yang tidak memiliki bukti kepemilikan atau pencatatan yang tidak tertib;
4. Melakukan penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI), dengan memastikan adanya mekanisme pengendalian internal yang efektif untuk mencegah penyimpangan atau kecurangan, menerapkan sistem pemisahan tugas untuk mengurangi resiko manipulasi keuangan, dan melakukan rekonsiliasi keuangan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan dan realisasi;
5. Melakukan penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran yang transparan, yaitu anggaran dibuat realistis dan sesuai dengan kebutuhan operasional serta rencana strategis, dan melakukan pelaporan realisasi anggaran secara berkala dan terbuka;
6. Dilakukan audit internal yang rutin dan efektif, yaitu dengan melakukan audit internal secara berkala untuk mendeteksi masalah sejak dini, serta memberikan rekomendasi dan tindak lanjut terhadap hasil audit yang ditemukan;
7. Menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, yaitu menindaklanjuti jika ada temuan dari BPK segera dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, dan memastikan setiap rekomendasi dijalankan dan dilaporkan perkembangannya;
8. Meningkatkan kompetensi SDM dibidang keuangan, dengan mengadakan pelatihan kepada pegawai yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan, serta memastikan adanya tenaga akuntansi yang kompeten dan memahami regulasi yang ada.

Sasaran I

Indikator Kinerja ke-3: Survey Eksternal Persepsi Korupsi

Tabel 3.12 Survey Eksternal Persepsi Korupsi

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
3.	Survey Eksternal	Angka	3,81	85,63 (3,42)**)	89,76	3,95	86,58	Belum Rilis

	Persepsi Korupsi							
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Indikator Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi belum dapat dihitung capaiannya sejak tahun 2021 dikarenakan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi nomor : B/324/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi (EPK) tidak rilis sedangkan yang rilis adalah Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Pada Tahun 2023 telah diubah melalui perubahan Renstra Inspektorat 2021-2026 dari Indeks Survey Eksternal Persepsi Korupsi (EPK) menjadi Indeks Survey Penilaian Integritas (Indeks SPI), Indeks SPI dikeluarkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan perolehan nilai sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perolehan Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi

Tahun	Indeks SPI
2021	75,49
2022	75,90
2023	75,30
2024	67,91

Adapun kinerja yang mendukung pencapaian peningkatan hasil Survey Eksternal Persepsi Korupsi, antara lain :

1. Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Berdasarkan hasil quality assurance (QA) BPKP Pusat yang telah ditetapkan dengan Surat BPKP Nomor : PE.09.03/LHP-635/PW13/6/2024 tanggal 4 September 2024, nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 adalah level 3 (integrated) dengan

skor 3,00 ini mencerminkan bahwa APIP Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan layanan compliance auditing, performance auditing dan

practice advisory. Tren capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14
Capaian Kapabilitas APIP Tahun 2021-2024

Tahun	Kapabilitas APIP
2021	Level 2 (Infrastruktur)
2022	Level 3 (Integrated)
2023	Level 3 (Integrated)
2024	Level 3 (Integrated)

Adapun upaya yang telah dilakukan agar nilai Kapabilitas APIP lebih optimal, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat yang berkaitan pengawasan berbasis risiko.
2. Memutakhirkan risk register yang disusun OPD sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.

Sasaran I

Indikator Kinerja ke-4: Status Kinerja LPPD

Tabel 3.15 Perolehan Hasil LPPD

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
4.	Status Kinerja LPPD	Kategori	Sangat Tinggi (4,3)	Tinggi (3,78)*	87,90	Sangat Tinggi	87,90	Baik

Sumber Data: BPKP

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan

Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Nilai EKPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sampai laporan ini disusun masih belum ada rilis dari Kementerian Dalam Negeri sebagai evaluator. Untuk hasil EKPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dan Tahun 2023 Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Tabel 3.16 Perolehan Hasil LPPD 2022-2023

Tahun	Kepmendagri	Nilai	Status Kinerja	Peringkat
2022 (Kinerja Tahun 2021)	Nomor : 100.2.1.3- 1109 Tahun 2023	3,6100	Tinggi	Ke- 5 Nasional
2023 (Kinerja Tahun 2022)	Nomor : 100.2.1.7- 6646 Tahun 2023	3,7800	Tinggi	Ke- 2 Nasional

Berkenaan dengan ditetapkananya Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, maka sistem penilaian mengalami perubahan sehingga tahun 2022 dan 2023 status kinerja LPPD Kabupaten Sidoarjo karena ditargetkan Sangat Tinggi (ST) maka masih mengalami kesulitan, dan belum ada Kabupaten / Kota yang sudah mencapai kategori dimaksud. Meskipun demikian Kabupaten Sidoarjo menempati Peringkat ke-2 terbaik Nasional dalam pencapaian indikator LPPD.

**Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021- 2026

Dari tabel diatas diketahui target akhir RPJMD tahun 2026 adalah Sangat Tinggi sedangkan realisasi tahun 2024 sudah mencapai kategori Sangat Tinggi sehingga persentase capaian nya adalah 100% atau sudah tercapai.

Dalam rangka meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Kabupaten Sidoarjo fokus pada berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian. Berikut beberapa langkah yang telah dilakukan:

1. Peningkatan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

- Menyusun LPPD yang lebih akurat dan sesuai dengan indikator yang dinilai dalam EKPPD.
 - Memastikan sinkronisasi data antar-OPD agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam laporan.
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi untuk penyusunan laporan berbasis data yang valid dan terukur.
2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
 - Meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi.
 - Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan evaluasi internal pemerintahan daerah.
3. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui e-budgeting dan e-reporting.
 - Memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri.
 - Meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Memperbaiki sistem pelayanan publik berbasis teknologi (misalnya, digitalisasi perizinan dan pelayanan administrasi kependudukan).
 - Memastikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan bebas pungli sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan menindaklanjuti hasilnya dengan perbaikan layanan.
5. Penguatan Inovasi Daerah
- Mendorong OPD untuk menciptakan inovasi pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

- Mengoptimalkan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta dalam pengembangan inovasi daerah.
 - Mendaftarkan inovasi ke dalam kompetisi nasional seperti Innovative Government Award (IGA) untuk meningkatkan pengakuan dan nilai kinerja daerah.
6. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- Memastikan perencanaan pembangunan daerah selaras dengan RPJMD, RKP, dan visi pembangunan nasional.
 - Mengoptimalkan peran Bappeda dalam koordinasi antar-OPD terkait perencanaan program strategis.
 - Melakukan evaluasi kinerja OPD secara berkala untuk memastikan program berjalan efektif.
7. Penguatan Peran Pengawasan dan Pencegahan Korupsi
- Mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah dalam melakukan audit dan pengawasan kinerja OPD.
 - Memperkuat implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dipantau langsung oleh KPK.
 - Meningkatkan sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat yang efektif serta menindaklanjuti laporan dengan transparan.

Sasaran I

Indikator Kinerja 5: Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Tabel 3.18 Nilai Indeks SPBE

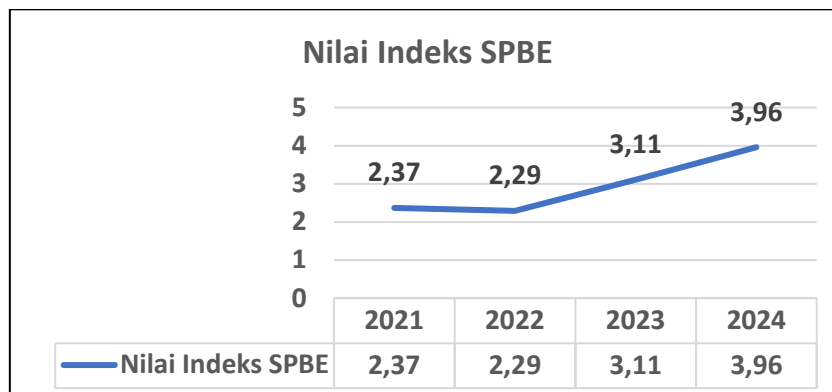
N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
5.	Nilai Indeks SPBE	Indeks	4,00	3,96	99	4,25	93,18	Sangat Baik

Sumber Data: Kementerian Kominfo

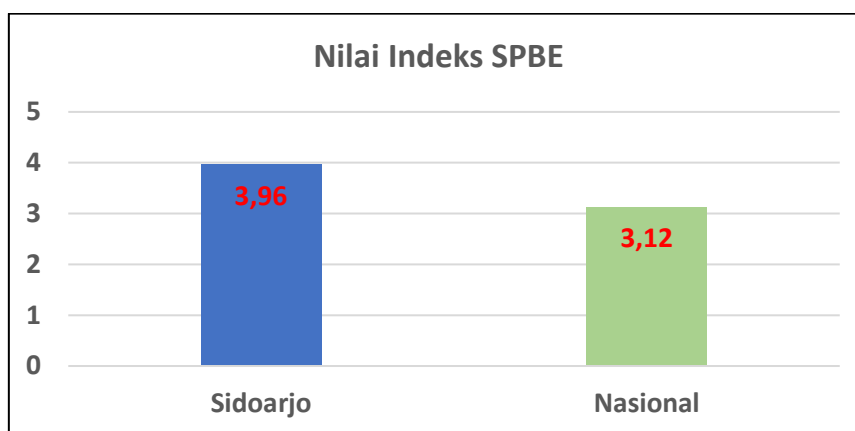
Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah 3,96. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menargetkan 4,00. Dengan demikian capaian Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo pada tahun 2024 adalah 99 persen atau kurang 0,04 point, belum tercapai. Walaupun belum memenuhi target, namun capaian

tahun ini sudah mengalami peningkatan 0,85 poin dari capaian tahun 2023 sebesar 3,11. Berikut grafik perkembangan nilai indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2021 – 2024.



Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 4,25, capaian tahun ini masih kurang 0,19 poin atau sudah tercapai 93,18 persen. Sedangkan dibandingkan dengan Rata-Rata Nilai Indeks SPBE Nasional yaitu 3,12, Kabupaten Sidoarjo sudah lebih unggul 0,84 point diatas rata-rata Nasional.



Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE, Sebagai Berikut:

1. Dalam aspek kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ruang lingkup pengaturan mengenai SPBE dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. tata Kelola SPBE; b. manajemen SPBE; c. audit teknologi informasi dan komunikasi; d.

2. penyelenggara SPBE; dan e. pemantauan dan evaluasi SPBE. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Manajemen Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Menyusun Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Melaksanakan harmonisasi internal untuk seluruh pemangku terkait khususnya Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun data dukung seluruh indikator sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Jika sudah ada rincian terhadap capaian masing-masing indikator, akan segera dilakukan pemenuhan dan optimalisasi data dukung seluruh indikator kepada pemangku terkait.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, meliputi:

1. Banyaknya aplikasi yang sudah dibangun oleh Perangkat Daerah yang vendor dan Bahasa pemrogramannya berbeda-beda sehingga sulit untuk dilakukan integrasi;
2. Kurangnya koordinasi dan pemahaman para Tim SPBE terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
3. Belum adanya konektivitas terhadap aplikasi instansi pusat yang disebabkan vendor berbeda-beda.

Rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Sebagai berikut:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi
 - o Mengembangkan strategi digitalisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

- Membangun atau meningkatkan jaringan internet yang stabil dan aman di seluruh instansi pemerintahan.
- Mengembangkan pusat data dan cloud computing untuk memastikan integrasi data yang lebih baik.

3. Penguatan Tata Kelola SPBE

- Menyusun arsitektur SPBE agar layanan digital lebih terstruktur dan saling terhubung.
- Membentuk Tim Koordinasi SPBE yang bertanggung jawab dalam implementasi dan evaluasi sistem.
- Mengadopsi standar keamanan informasi untuk melindungi data pemerintah dan masyarakat.

4. Digitalisasi Pelayanan Publik

- Mengembangkan dan mengintegrasikan portal layanan publik digital agar masyarakat bisa mengakses layanan dengan mudah.
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi dan platform digital, seperti e-office, e-budgeting, dan e-reporting.
- Mempermudah proses perizinan dan administrasi secara online.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam bidang teknologi dan digitalisasi.
- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman ASN terhadap manfaat SPBE melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.

6. Evaluasi dan Monitoring Berkala

- Melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan SPBE berdasarkan indikator nasional.
- Menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki sistem yang masih kurang efektif.

Sasaran I

Indikator Kinerja 6: Indeks Inovasi Daerah

Tabel 3.19 Nilai Indeks Inovasi Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
6.	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Sangat Inovatif	100	Sangat Baik

Sumber Data: Kementerian PANRB

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruaran didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya.

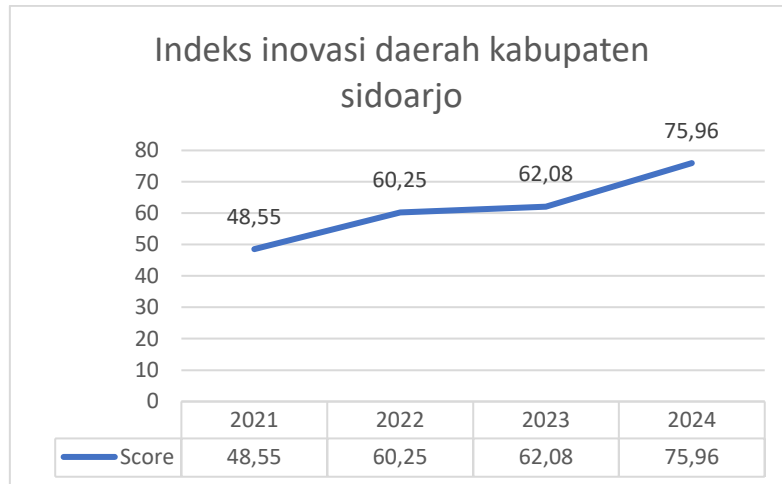
Pada Tahun 2024, sesuai target Kabupaten Sidoarjo kembali mendapatkan kategori Sangat Inovatif dengan score 75,96 sebagaimana dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan 2023.

Berikut perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 3.20 Perkembangan Indeks Inovasi Daerah

	2021	2022	2023	2024
Target	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
Realisasi	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Berikut apabila digambarkan dalam bentuk grafik:



Sumber Data: Hasil IID Kemendagri

Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo Th 2024 meningkat cukup signifikan 13,88 poin dari score 62,08 di tahun 2023 menjadi 75,96 di tahun 2024. Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan pada pemeringkatan di tingkat nasional dari peringkat 27 di tahun 2023 menjadi peringkat 19 di tahun 2024.

Dalam upaya optimalisasi Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat kebijakan satu Perangkat Daerah satu Inovasi (Peraturan Bupati nomor 31 Tahun 2023);
2. Meningkatkan Partisipasi Inovator dengan menjadikan KISI sebagai agenda rutin tahunan dan wadah innovator mengaktualisasikan diri serta menyediakan stok inovasi daerah
3. Menjaga Keberlanjutan Inovasi dengan mengupdate dan mengupgrade setiap inovasi yang sudah dibuat sesuai kebutuhan;
4. Memberikan reward kepada para inovator yang berprestasi.

Sasaran I

Indikator Kinerja 7: Tingkat Maturitas SPIP

Tabel 3.21 Realisasi SPIP

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
7.	Tingkat Maturitas SPIP	Kategori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100	Level 3 Terdefinisi	100	Sangat Baik

Sumber Data: BPKP

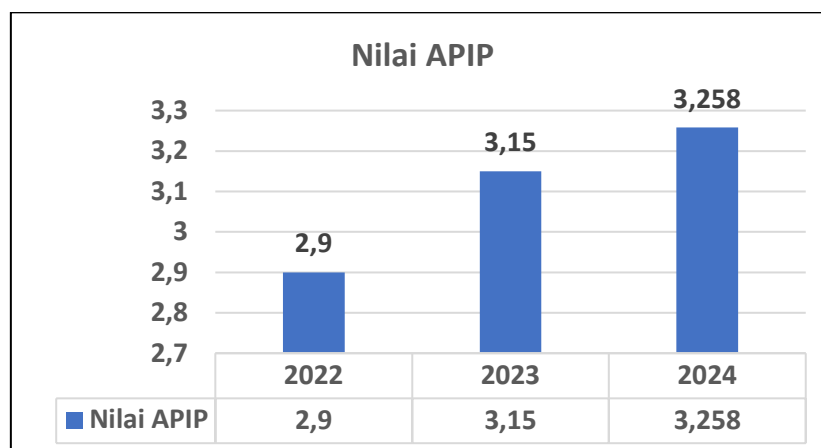
Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control*. Fokus penilaian SPIP ada 5 (lima) unsur yaitu :

1. Unsur Lingkungan Pengendalian
2. Unsur Penilaian Resiko
3. Unsur Aktivitas pengendalian

4. Unsur informasi dan komunikasi

5. Unsur pemantauan pengendalian internal

Hasil evaluasi BPKP tahun 2024, penyelenggaraan maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 3,258 Level 3 (terdefinisi). Capaian tersebut telah memenuhi target yang sudah ditetapkan dan mengalami peningkatan 0,108 poin dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,15 0. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 yaitu Level 3 (terdefinisi), maka Kabupaten Sidoarjo sudah mencapainya, demikian hal nya dengan capaian Nasional. Capaian level 3 (terdefinisi) dimaksud mencerminkan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah mampu mengelola kinerja dan merumuskan sasaran kinerja beserta indikator dan target dengan baik, serta mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif. Berikut perkembangan penyelenggaraan maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 – 2024, sebagai berikut :



Sebagaimana data grafik diatas, nilai APIP Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2022 sampai 2024 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada dua tahun terakhir 2023 dan 2024 nilai APIP Kabupaten Sidoarjo telah berada pada Level 3 (terdefinisi). Hal ini mencerminkan bahwa APIP Kabupaten Sidoarjo mampu memberikan layanan compliance auditing, performance auditing dan practice advisory antara lain:

1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities);
2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities);
3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities).

Dalam perolehan nilai tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat bertambahnya nilai dan dapat menjadi area perbaikan (Area of Improvement), antara lain sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya memiliki SDM dengan kompetensi guna mengelola risiko atau manajemen risiko agar dapat melakukan identifikasi/penilaian risiko sesuai dengan proses yang benar;
2. Belum mengimplementasikan Manajemen Risiko dalam penyusunan PPBR dengan baik yang disertai dengan langkah-langkah konkrit dalam perbaikan register risiko dan PPBR.

Sementara itu, upaya yang telah dilakukan agar nilai Kapabilitas APIP lebih optimal, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat yang berkaitan dengan pengawasan berbasis risiko;
2. Memutakhirkan risk register yang disusun OPD sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.

Selain itu, terdapat faktor yang menjadi penunjang lancarnya proses pelaksanaan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai Kapabilitas APIP, antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan

2. prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;
3. Adanya kemudahan dalam melakukan koordinasi dengan lembaga/badan terkait untuk memutakhirkan register risiko dan PPBR.

Sasaran 2: Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha

Tabel 3.22 Indikator Kinerja Sasaran II

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
8.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	A- (Sangat Baik) 4,30	A (Prima) 4,65	108,14	A-	100	Sangat Berhasil

Sumber Data: Kementerian PANRB Tahun 2024

Sasaran 2

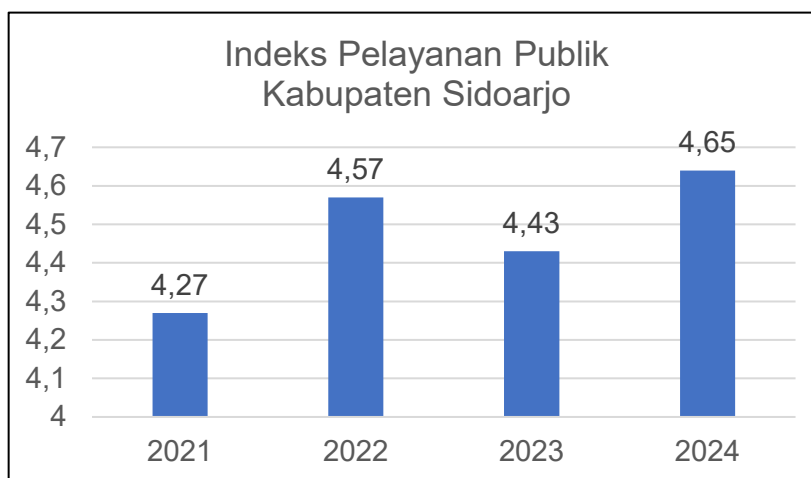
Indikator Kinerja ke-8: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Setiap tahunnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo diupayakan selalu meningkat, hal ini sesuai dengan kebijakan satu Perangkat Daerah satu Inovasi yang ditetapkan oleh Kabupaten Sidoarjo, sehingga dengan kebijakan tersebut banyak inovasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan penghargaan dalam Kompetisi Regional maupun Nasional. Dengan banyaknya inovasi diharapkan kualitas pelayanan public di Kabupaten Sidoarjo terus lebih baik dan kepuasan masyarakat meningkat.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2024 mendapatkan nilai 4,65 atau kategori A (Prima). Hal ini telah melebihi target yang telah tetapkan 4,30 atau kategori A- (Sangat Baik). Dibandingkan dengan capaian IPP tahun

2023 sebesar 4,43 sedangkan IPP tahun 2024 sebesar 4,65 maka Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo telah meningkat 0,22 poin.

Adapun perkembangan Nilai IPP Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2021 – 2024 sebagai berikut :



Dalam penilaian IPP untuk masing-masing Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah, evaluator dari Kementerian PAN RB mengambil sampling 3 unit kerja sebagai locus penilaian serta setiap tahun locus nya berbeda, sehingga dengan demikian perkembangan nilai IPP untuk setiap tahunnya tidak bisa digunakan sebagai tren capaian kinerja. Untuk tahun 2024, sebagai locus penilaian IPP di Kabupaten Sidoarjo adalah RSUD Notopuro, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Sosial.

Kalau dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan kategori A- (Sangat Baik), maka nilai IPP Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sudah melampaui target karena nilai IPP tahun ini adalah 4,65 atau kategori A (Prima). Sedangkan untuk capaian Indeks Pelayanan Publik di tingkat Nasional ada 38 Kabupaten yang mendapatkan kategori Prima, dan Kabupaten Sidoarjo masuk pada urutan nomor 2 setelah Kabupaten Cilacap yang memiliki nilai yang sama yaitu 4,65.

Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkenaan dengan capaian nilai IPP sebesar 4,64 atau Prima tersebut, antara lain :

1. Terus berupaya memenuhi semua kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik yang layak dan nyaman sesuai standar pelayanan;
2. Sidoarjo memiliki 2 Mal Pelayanan Publik;
3. Hampir semua layanan sudah berbasis elektronik, sehingga kecepatan, kemudahan, transparansi dan akuntabilitas layanan dapat terjaga;
4. Setiap layanan telah memiliki standar pelayanan yang jelas dan terpublish di setiap lokasi layanan maupun pada web dan media sosial lainnya;
5. Peningkatan kompetensi SDM, dalam rangka menjaga profesionalitas SDM;
6. Monitoring dan evaluasi secara berkala terus dilakukan pada seluruh unit kerja;
7. Melakukan penilaian PEKPP pada 111 unit kerja, termasuk puskesmas dan kelurahan;
8. Pemberian penghargaan / awarding PEKPP setiap tahun.

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain :

1. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana unit kerja yang masih belum sesuai standar;
2. Mengoptimalkan dan melanjutkan integrasi aplikasi-aplikasi layanan dalam satu portal yang diluar OSS diantaranya kemudahan berusaha atau perijinan pada 10 Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM melalui Bimtek dan pelatihan;
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala terus dilakukan pada seluruh unit kerja;
5. Melakukan penilaian PEKPP pada 111 unit kerja, termasuk puskesmas dan kelurahan;
6. Pemberian penghargaan pada unit kerja yang prestasi.

Tabel 3.23 Analisis Capaian Kinerja

Tujuan Kedua: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, dan Perikanan.					
Indikator Tujuan/ IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
Pertumbuhan Ekonomi	Angka	6,78	5,540	81,71	BPS
Indeks Gini	Indeks	0,345	0,327	105,22	BPS

2. Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.24 Realisasi Pertumbuhan Ekonomi

N o	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
8.	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	6,78	5,540	81,71	56,78	81,71	Tidak Tercapai

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah. Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK mengalami fase peningkatan setelah pemulihan pasca pandemi covid-19, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Pertumbuhan Ekonomi	5,540	56,78	81,71

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021- 2026

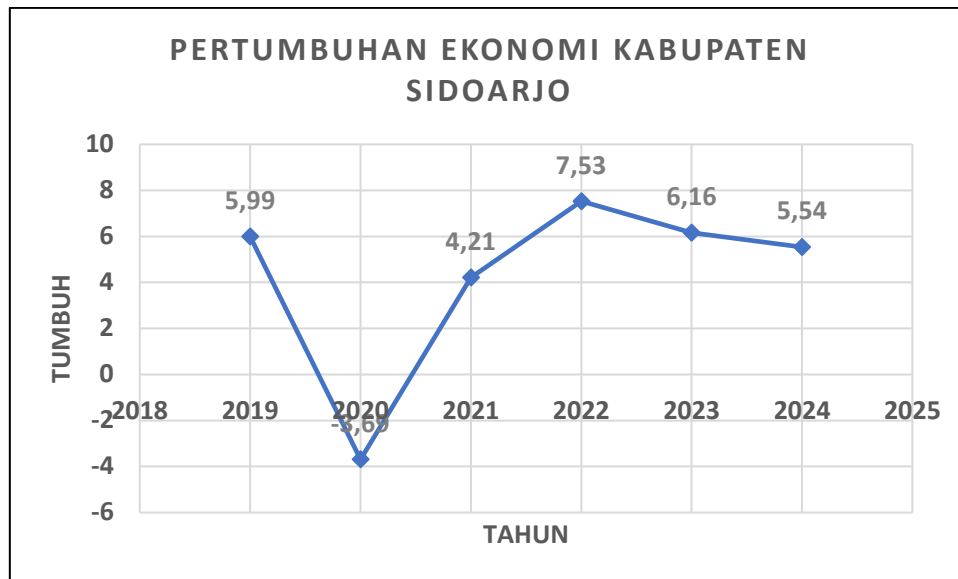
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 ditargetkan sebesar 6,78 persen melebihi **target pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 yaitu 4,23** persen dikarenakan capaian tahun sebelumnya terealisasi sebesar 56,78 persen atau sudah melebihi target RPJMD. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sidoarjo, angka pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 adalah sebesar 5,54 persen. Apabila dibandingkan dengan target 6,78 persen, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2024 masih belum memenuhi target dan bahkan mengalami perlambatan turun 0,62 poin dari capaian tahun 2023 sebesar 6,16 persen. Salah satu indikator pendukung perlambatan adalah melambatnya pertumbuhan pada beberapa sektor unggulan di Kabupaten Sidoarjo antara lain transportasi dan pergudangan yg hanya tumbuh 7,87 persen pada tahun 2023 dan 22,14 persen pada tahun 2022.

Namun demikian, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil di Jawa Timur. Dinamika pertumbuhan ekonomi Sidoarjo dari tahun ke tahun mencerminkan ketahanan dan adaptasi Sidoarjo terhadap berbagai tantangan ekonomi, termasuk dampak pandemi Covid-19. Berikut gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2019 hingga tahun 2024.

- a. **Tahun 2019: 5,99%** Sebelum pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Sidoarjo tumbuh sebesar 5,99%. Angka ini

mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil dengan kontribusi utama dari sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.

- b. **Tahun 2020: -3,69%** Pandemi Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo. Pembatasan aktivitas ekonomi dan penurunan permintaan global berdampak pada industri dan perdagangan, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Sidoarjo berkontraksi sebesar -3,69%.
- c. **Tahun 2021: 4,21%** Pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,21%. Relaksasi kebijakan pembatasan, peningkatan konsumsi masyarakat, serta adaptasi industri terhadap kondisi pandemi berkontribusi pada pemulihan ini.
- d. **Tahun 2022: 7,53%** Tahun 2022 menjadi momentum percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo dengan capaian 7,53%. Peningkatan investasi, ekspor, serta pemulihan sektor industri dan pariwisata menjadi faktor pendorong utama.
- e. **Tahun 2023: 6,16%** Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar 6,16%. Faktor eksternal seperti dinamika ekonomi global serta fluktuasi harga komoditas turut mempengaruhi tingkat pertumbuhan.
- f. **Tahun 2024: 5,54%** Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 berada pada angka 5,54%. Stabilitas ekonomi nasional, keberlanjutan investasi, serta peningkatan daya saing sektor unggulan menjadi faktor utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo.



Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo menunjukkan pemulihan yang kuat pasca-pandemi. Meskipun mengalami kontraksi pada tahun 2020, Kabupaten Sidoarjo mampu bangkit dengan pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Ke depan, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada daya saing industri, kebijakan pemerintah daerah, serta adaptasi terhadap perubahan global.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sebesar 5,54 persen apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan target 5,53 persen, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo 2024 sudah tercapai melebihi target akhir RPJMD. Demikian halnya apabila dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 persen serta provinsi Jawa Timur sebesar 4,93 persen, maka Kabupaten Sidoarjo lebih unggul dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun pertumbuhan ekonomi Nasional.



Sumber Data: BPS

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang lebih pesat dibandingkan Jawa Timur dan nasional didukung oleh beberapa faktor utama, di antaranya:

a. Lokasi Strategis dan Infrastruktur yang Baik

Sidoarjo terletak di dekat Kota Surabaya dan memiliki akses langsung ke Bandara Juanda serta Pelabuhan Tanjung Perak. Infrastruktur jalan yang baik, termasuk tol Trans-Jawa, mendukung distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja, sehingga mempercepat aktivitas ekonomi.

b. Sektor Perdagangan dan Jasa yang Dinamis

Sebagai daerah penyangga Surabaya, Sidoarjo memiliki pasar perdagangan dan jasa yang besar. Tingginya aktivitas perdagangan serta perkembangan pusat bisnis dan ritel turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat.

d. Investasi yang Terus Meningkat

Investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, terus mengalir ke Sidoarjo karena stabilitas ekonomi dan kemudahan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Banyak investor yang tertarik dengan potensi industri dan properti di wilayah ini.

e. Pertumbuhan UMKM yang Signifikan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkembang pesat di Sidoarjo, terutama di sektor kuliner, kerajinan tangan, dan produk lokal seperti batik serta olahan hasil perikanan. Pemerintah daerah juga aktif mendukung UMKM melalui berbagai program bantuan dan digitalisasi bisnis.

f. Sektor Perikanan dan Pertanian yang Produktif

Sidoarjo memiliki potensi besar di sektor perikanan tambak, terutama budidaya udang dan bandeng. Produk perikanan dari Sidoarjo tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga diekspor ke berbagai negara, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

g. Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi yang Cepat

Dibandingkan dengan daerah lain, Sidoarjo mampu bangkit lebih cepat setelah pandemi Covid-19. Pemulihan di sektor industri, perdagangan, dan jasa berjalan lebih cepat karena kesiapan infrastruktur dan kebijakan ekonomi daerah yang mendukung pertumbuhan.

Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi Sidoarjo mampu melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun nasional.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan berbagai upaya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo terus berkembang secara lebih baik di masa depan. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik, dapat memfasilitasi pergerakan barang dan orang, yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan ekonomi

Pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) juga penting untuk menarik investasi.

2. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM. Dengan tenaga kerja yang terampil, sektor industri, perdagangan, dan jasa di Sidoarjo bisa berkembang lebih pesat. Program pelatihan berbasis keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran.

3. **Dukungan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)**

UMKM adalah pilar penting dalam perekonomian daerah. Pemerintah Sidoarjo akan meningkatkan akses kepada pembiayaan, memperkenalkan teknologi baru, memberikan pelatihan kewirausahaan, serta memfasilitasi promosi produk UMKM agar lebih dikenal baik di tingkat lokal maupun internasional.

4. **Pengembangan Sektor Pariwisata**

Sidoarjo memiliki potensi pariwisata yang bisa dikembangkan lebih lanjut, seperti wisata alam, budaya, atau wisata kuliner. Dengan meningkatkan promosi, serta meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas, sektor pariwisata dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan.

5. **Peningkatan Investasi dan Daya Tarik Investasi**

Meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Sidoarjo sangat penting agar lebih banyak investor yang tertarik menanamkan modal di Sidoarjo. Pemerintah perlu memberikan insentif dan kemudahan bagi investor, serta menyederhanakan prosedur perizinan untuk mendorong lebih banyak investasi di sektor-sektor unggulan.

6. **Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Lembaga Pendidikan**

Membangun kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pengembangan ekonomi lokal. Kemitraan ini dapat

membantu dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan daya saing daerah.

7. **Pemanfaatan Teknologi Digital**

Mendigitalisasi berbagai layanan publik dan sektor ekonomi agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pemerintah terus mendorong sektor industri dan UMKM untuk memanfaatkan e-commerce dan platform digital lainnya agar mereka dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

8. **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**

Sidoarjo memiliki potensi alam yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, seperti pertanian dan perikanan, serta memperhatikan aspek lingkungan, akan sangat membantu dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam.

Dengan fokus pada hal-hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Indeks Gini

Tabel 3.26 Realisasi Indeks Gini

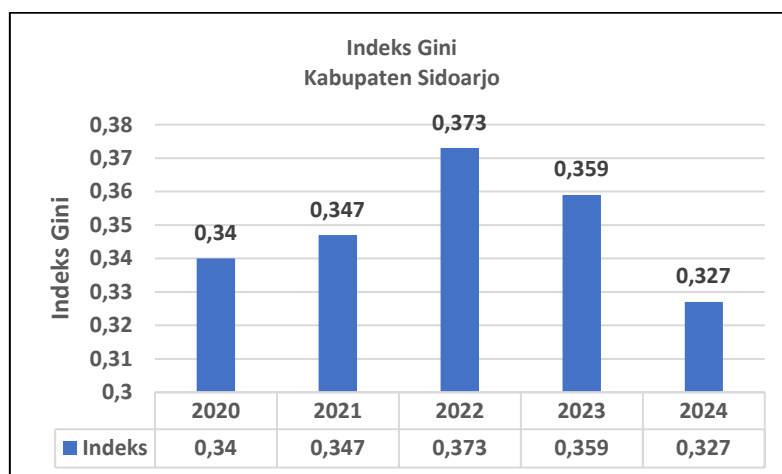
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Indeks Gini	Indeks	0,345	0,327	105,22	Tercapai

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang

memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa – apa. Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1, atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 sebesar 0,327, yang lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 0,345. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sidoarjo lebih rendah dari yang diproyeksikan, yang berarti distribusi pendapatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo semakin merata. Dengan capaian indeks kurang dari 0,36 artinya tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sidoarjo masuk kategori rendah.

Jika melihat tren Indeks Gini Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat dinamika sebagai berikut:



Analisis Tren Indeks Gini

a. 2020–2022: Peningkatan Kesenjangan Pendapatan

- o Indeks Gini meningkat dari 0,340 (2020) menjadi 0,373 (2022), yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan.

- Pandemi Covid-19 berkontribusi pada kondisi ini, di mana banyak pekerja sektor informal dan UMKM terdampak, sementara sektor industri besar tetap bertahan.
- Pemulihan ekonomi yang tidak merata menyebabkan kelompok berpenghasilan tinggi mendapatkan keuntungan lebih cepat dibanding kelompok ekonomi menengah ke bawah.

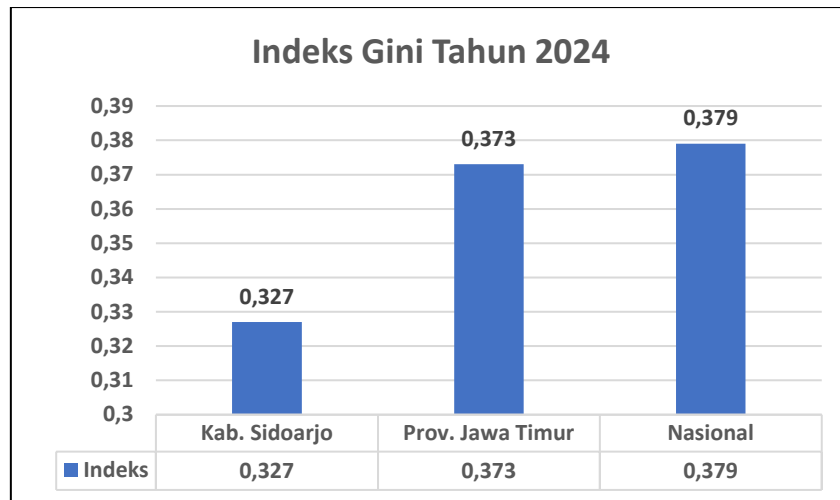
b. 2023: Penurunan Ketimpangan

- Indeks Gini menurun menjadi 0,359, yang menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan.
- Pemulihan ekonomi pasca-pandemi mulai merata, dengan sektor UMKM kembali tumbuh dan lebih banyak lapangan kerja tersedia.
- Program bantuan sosial dan ekonomi pemerintah daerah berperan dalam menstabilkan kesejahteraan masyarakat.

c. 2024: Penurunan Signifikan (0,270)

- Penurunan tajam Indeks Gini ke 0,270 menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan semakin mengecil.
- Faktor-faktor yang berkontribusi dalam penurunan ini meliputi:
 - **Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata** di berbagai sektor.
 - **Kebijakan pemerintah daerah yang lebih efektif** dalam mendukung inklusivitas ekonomi, seperti program pengentasan kemiskinan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan UMKM.
 - **Peningkatan lapangan kerja**, terutama di sektor industri, jasa, dan perdagangan, yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dari berbagai kelompok pendapatan.
 - **Meningkatnya akses layanan sosial** seperti pendidikan dan kesehatan, yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam perkembangannya, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,340, maka capaian tahun ini lebih rendah 0,013 poin melebihi target akhir RPJMD. Demikian juga bila dibandingkan ditingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, Indeks Gini di Kabupaten Sidoarjo adalah 0,327 lebih rendah dari Jawa Timur dengan indeks 0,373 dan Indonesia sebesar 0,379 di Tahun 2024.



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Indeks Gini di Sidoarjo

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

- Pertumbuhan ekonomi Sidoarjo yang cukup pesat (diperkirakan 5,54% pada 2024) berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
- Sektor industri dan UMKM berkembang, menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah.

2. Program Pemerintah Daerah yang Efektif

- Program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan permodalan bagi UMKM, dan dukungan digitalisasi bisnis, membantu meningkatkan pendapatan kelompok menengah ke bawah. Bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat miskin membantu menekan kesenjangan ekonomi.

3. Penyerapan Tenaga Kerja yang Tinggi

- Sektor industri manufaktur dan jasa di Sidoarjo menyerap banyak tenaga kerja, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, yang berdampak positif pada distribusi pendapatan.
- Investasi yang terus meningkat membuka peluang kerja yang lebih luas.

4. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan

- Program pendidikan dan pelatihan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja.
- Akses layanan kesehatan yang lebih merata meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga kesenjangan ekonomi dapat ditekan.

Kesimpulannya adalah Indeks Gini yang lebih rendah dari target menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo berhasil dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Kedepan, tantangannya adalah mempertahankan tren positif ini dengan mendorong lebih banyak program inklusif yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara merata.

Faktor-faktor yang Berkontribusi terhadap Rendahnya Indeks Gini di Kabupaten Sidoarjo:

1. **Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif:** Sidoarjo mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan merata, yang didukung oleh sektor industri manufaktur dan UMKM yang kuat.
2. **Program Pemerintah Daerah yang Efektif:** Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan bantuan permodalan bagi UMKM, yang membantu meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.
3. **Penyerapan Tenaga Kerja yang Tinggi:** Sektor industri dan jasa di Sidoarjo menyerap banyak tenaga kerja lokal, mengurangi

tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. **Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan:** Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Dengan upaya yang berkelanjutan, Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional pada tahun 2024.

Berkenaan dengan ketercapaian tujuan yang ke-2, **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan**, didukung dengan 2 sasaran strategis, antara lain :

3. Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan;
4. Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa.

Sasaran 3: Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian, dan Perikanan

Tabel 3.27 Indikator Kinerja Sasaran III

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
9.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,24	15,98	98,40	16,75	95,40	Tidak Tercapai
10.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	53,19	48,57	91,31	54,21	89,60	Tidak Tercapai
11.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%	2,95	1,9	64,41	3,25	58,46	Tidak Tercapai
12.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1,29	24,9	1930,23	1,52	1638,16	Tercapai

Sumber Data: BPS

Sasaran 3

Indikator Kinerja ke-9: Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan

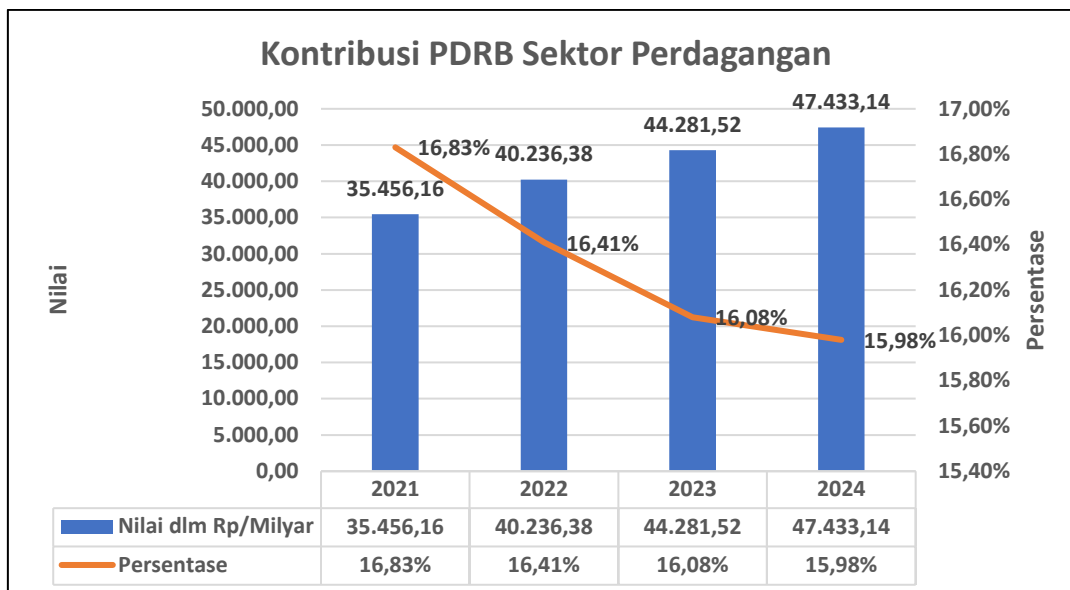
Tabel 3.28 Realisasi PDRB Sektor Perdagangan

N o	Indikator Kinerja	Satua n	Targe t	Realisas i	Capaia n (%)	Target Akhir RPJM D	Capaia n (%)	Keteranga n
9.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,24	15,98	98,40	16,75	95,40	Sangat Baik

Sumber Data: BPS

Berdasarkan data BPS Sidoarjo, Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sebesar **15,98%** dari target **16,24%** menunjukkan pencapaian sekitar **98,4%** dari target yang ditetapkan, dan belum mencapai target dengan selisih **0,26%**. Jika dibandingkan dengan kontribusi tahun 2023 sebesar 16,08%, maka mengalami penurunan 0,1 poin, kontribusi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 16,41%, turun 0,33 poin, dan kontribusi tahun 2022 dibandingkan dengan kontribusi tahun 2021 sebesar 16,83% juga mengalami penurunan sebesar 0,42 poin.

Jadi dilihat dari perkembangannya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2021 – 2024 terus mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan adanya diversifikasi dalam struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo, meskipun sektor ini cukup mendominasi setelah sektor industri. Berikut grafik perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2021 – 2024 :



Sumber Data: BPS Sidoarjo 2024

Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dari tahun 2021 – 2024 terus mengalami penurunan, namun dari sisi Nilai nya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dan tahun 2024 meningkat sebesar Rp. 3.151,62 Milyar dari tahun 2023.

Persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sebesar **15,98%** apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 16,75, maka tercapai 95,4% dan masih kurang 4,6% untuk bisa terpenuhi. Sedangkan jika dibandingkan dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Timur dan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional adalah sebagai berikut:

- **Jawa Timur:** Berdasarkan data yang tersedia, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2024 tidak disebutkan secara spesifik. Namun, sektor industri pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 30,54% pada Triwulan III-2024.
- **Nasional:** Pada tingkat nasional, sektor perdagangan berkontribusi sebesar 13,15% terhadap PDB pada Triwulan I-2024, menjadikannya

sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan.

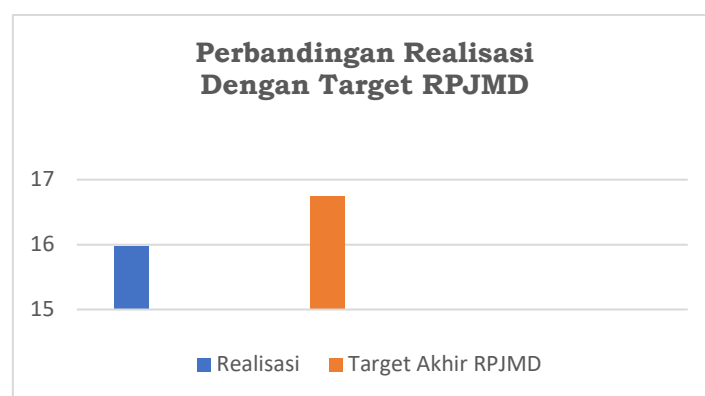
Dengan demikian, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo (15,98%) lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusinya terhadap PDB nasional (13,15%). Namun, data spesifik mengenai kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2024 tidak tersedia dalam sumber yang ada.

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	15,98	16,75	95,40

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021- 2026

Kalau dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan nilai 16,75 maka nilai Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan tahun 2024 sudah mencapai 95,40%. Berikut adalah grafik perbandingan realisasi dengan target akhir RPJMD Indikator Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan:



Kendala (perdagangan) :

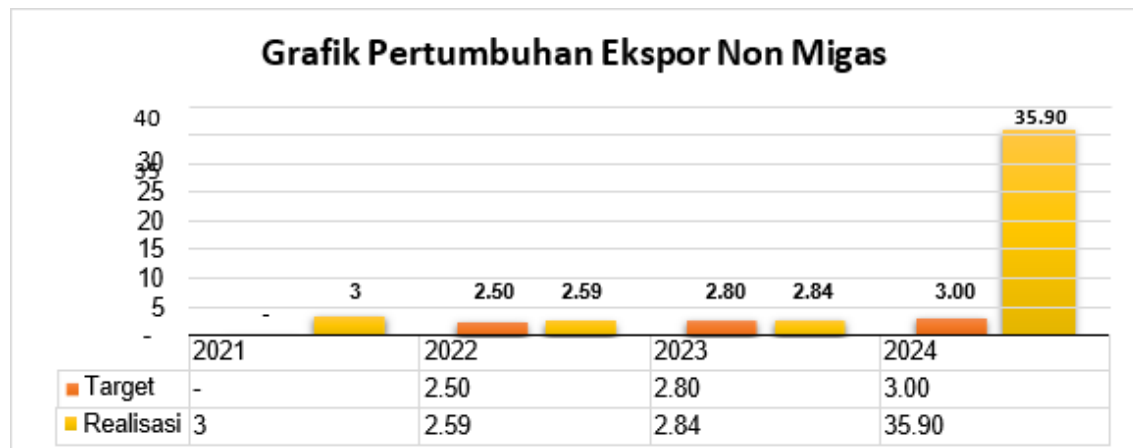
- Sering berubahnya kebijakan terkait aturan ekspor sehingga dapat menurunkan nilai ekspor perusahaan.

- b. Masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui tata cara dan prosedur ekspor
- c. Meningkatnya persaingan di sektor retail sehingga ada beberapa retail yang tutup.
- d. Masih banyak produk ukm yang memenuhi standar untuk ekspor

Besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

Pertumbuhan Ekspor Non Migas

Pada Tahun 2024, realisasi pertumbuhan ekspor non migas sebesar 35,9%, apabila dibandingkan dengan target 3%, maka tercapai 1.196%. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan. Pelampauan capaian target pertumbuhan Ekspor Non Migas yang signifikan dilatarbelakangi adanya peningkatan permintaan ekspor *Brown Paper* ke Negara Cina dan karena keterbatasan container maka produk dapat langsung diangkut ke kapal tanpa container. Perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo

Selanjutnya dari data diatas dilakukan analisa penyebab keberhasilan Hal-hal yang mengakibatkan dampak peningkatan Ekspor Non Migas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya permintaan dari negara-negara tujuan
- b. Meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor
- c. Melaksanakan program promosi produk-produk IKM dalam rangka peningkatan ekspor daerah
- d. Pendampingan IKM memperoleh KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) Upaya optimalisasi pencapaian target kinerja meningkatkan ekspor :
 - Melakukan Pameran dagang di tingkat Nasional Internasional terhadap produk unggulan Sidoarjo;
 - Melakukan pembinaan/pemberdayaan IKM yang berorientasi Ekspor;
 - Meningkatkan citra produk dalam rangka meningkatkan kualitas produk unggulan ekspor;
 - Memberikan pelatihan ekspor bagi IKM untuk meningkatkan dan mendorong kembali volume ekspor

Upaya utk peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari sektor perdagangan:

- a. Meningkatkan Kualitas Produk: peningkatan standarisasi produk melalui fasilitasi merek dan halal
- b. Meningkatkan Kuantitas Produk Memfasilitasi perluasan pasar melalui pameran dan misi dagang akan meningkatkan permintaan produk sehingga produksi meningkat
- c. Meningkatkan Promosi: fasilitasi pameran dalam dan luar daerah, pelatihan pemasaran online
- d. Meningkatkan Kerja Sama: melaksanakan kerjasama dengan stakeholder untuk pemenuhan pasokan Bahan pangan
- e. Meningkatkan Jaringan: memfasilitasi ukm untuk mendapatkan buyer dan calon distributor melalui event pameran.

- f. Meningkatkan Penggunaan Teknologi dengan Meningkatkan Penggunaan E-Commerce untuk ikm dalam hal penjualan pelatihan ecommerce, pelatihan pembuatan profil, dan pelatihan e branding
- g. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; Memberikan pelatihan kepada ikm untuk perluasan pasar diantaranya pelatihan tata cara dan prosedur ekspor

Sasaran 3

Indikator Kinerja 10: Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri

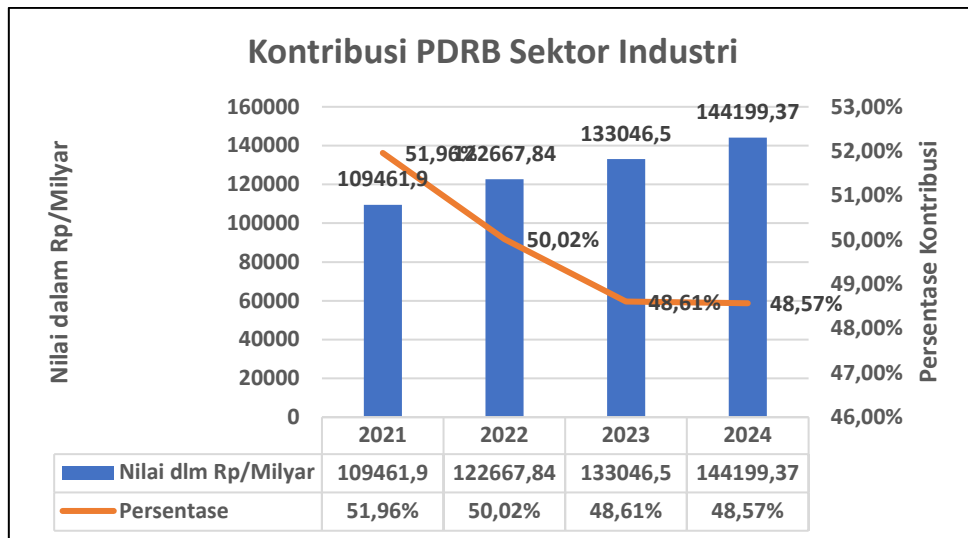
Tabel 3.30 Realisasi PDRB Sektor Industri

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
10	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	53,19	48,57	91,31	54,21	89,60	Sangat Baik

Sumber Data: BPS

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, bahwa Tahun 2024 Persentase kontribusi PDRB sektor industri Kabupaten Sidoarjo adalah 48,57% dari target 53,19% maka tercapai 91,31% atau masih belum mencapai target yang ditentukan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 48,61%, maka selisih 0,04 poin dibawah capaian tahun 2023, demikian juga bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 masing-masing 50,02% dan 51,96%.

Dari capaian tersebut terus terjadi penurunan walaupun sektor ini yang paling mendominasi berkontribusi pada PDRB. Sektor Industri Pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar, meskipun terdapat penurunan dalam kontribusinya. Berikut tren capaian Persentase kontribusi PDRB sektor industri dari tahun 2021 – 2024.



Sebagaimana grafik dan tabel diatas, persentase kontribusi PDRB sektor industri dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun dari nilainya terus meningkat. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat sudah kembali ke pola perekonomian sebelum pandemi dan masyarakat sudah banyak yang melakukan perjalanan sehingga sektor transportasi meningkat kontribusinya terhadap PDRB.

Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Kontribusi PDRB Sektor Industri	48,57	54,21	89,60

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021- 2026

Kalau dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan nilai 48,57 maka nilai Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri tahun 2024 belum tercapai dan hanya mencapai 89,60%. Sedangkan PDRB sektor industri pengolahan di Jawa Timur tahun 2024 berkontribusi sebesar 30,54% terhadap ekonomi provinsi tersebut. Sementara itu, kontribusi sektor industri terhadap PDB Indonesia pada tahun 2023 sebesar 40,22%. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa kontribusi PDRB Sektor Industri Kabupaten Sidoarjo lebih tinggi daripada Jawa Timur maupun ditingkat Nasional.

Beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah sebagai berikut:

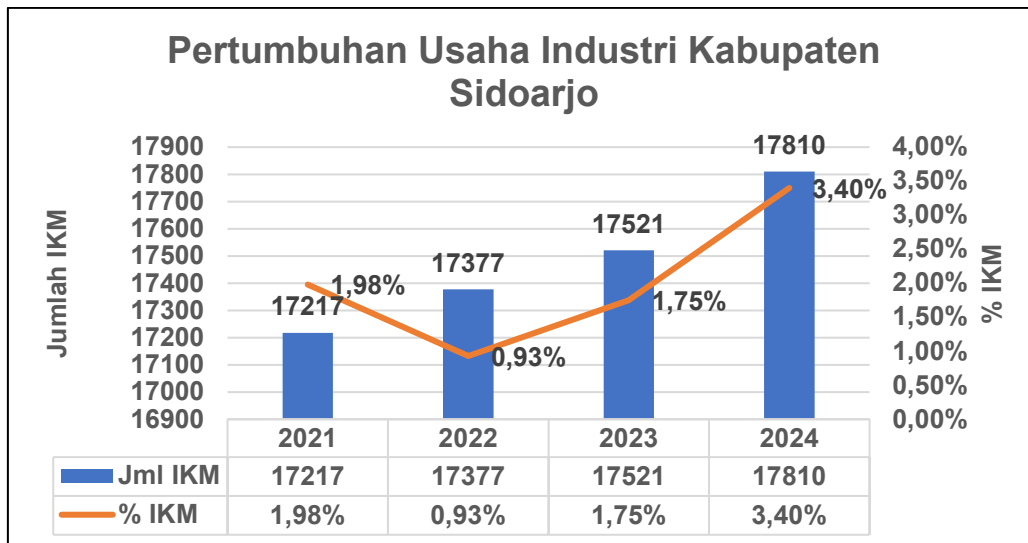
- a. keterbatasan bahan baku, utilitas, tenaga ahli dan permodalan
- b. tekanan produk impor sehingga mempengaruhi produk lokal.
- c. kurangnya inovasi industri
- d. tingginya tingkat upah minimum sehingga berpengaruh terhadap investasi, banyak perusahaan yang tutup atau pindah

Adapun kinerja yang mendukung peningkatan Persentase kontribusi PDRB sektor industri, antara lain :

Persentase Pertumbuhan Usaha Industri

Capaian kinerja Persentase Pertumbuhan Usaha Industri pada Tahun 2024 telah mencapai target yaitu sebesar 1.65% atau sebanyak 871 IKM dari target 1.3% atau sebanyak 500 IKM. Persentase capaian sebesar 174%. Hal ini dikarenakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pendampingan IKM dan memberikan kemudahan pengurusan perizinan usaha industri melalui pemberian rekomendasi verifikasi teknis serta fasilitasi standarisasi bagi Industri Kecil Menengah (IKM).

Jumlah Industri Kecil Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sebanyak 17.810 unit/usaha. Jumlah ini meningkat 289 unit/usaha atau meningkat sebesar 3,4% dibandingkan dengan jumlah industri pada Tahun 2023 yang sebanyak 17.521 unit/usaha. Berikut adalah tren realisasi pertumbuhan usaha industri sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo

Upaya untuk menumbuhkan usaha industri, yaitu :

- a. Melakukan fasilitasi pertumbuhan industri kecil dan menengah dalam rangka peningkatan kualitas produk;
- b. Memetakan pembangunan / pembentukan *cluster* baru IKM dengan pendampingan dan pembinaan secara memadai serta memfasilitasi promosi/pameran dagang dalam rangka pelestarian produk dan menaikkan omset;
- c. Pendekatan program fasilitasi pemerintah dalam standarisasi produk dan peningkatan kompetensi pelaku usaha agar memiliki daya saing yang cukup besar.
- d. Selanjutnya dari data diatas dilakukan analisa penyebab keberhasilan. Upaya untuk menumbuhkan usaha industri, yaitu:
 - Melakukan fasilitasi pertumbuhan industri kecil dan menengah dalam rangka peningkatan kualitas produk;
 - Memetakan pembangunan / pembentukan cluster baru IKM dengan pendampingan dan pembinaan secara memadai serta memfasilitasi promosi/pameran dagang dalam rangka kelestarian produk dan menaikkan omset;
 - Pendekatan program fasilitasi pemerintah dalam standarisasi produk dan peningkatan kompetensi pelaku usaha agar memiliki daya saing yang cukup besar

IKM naik kelas adalah upaya meningkatkan Industri Kecil dan Menengah agar mampu meningkatkan penjualan dan atau modal menjadi lebih tinggi. Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing IKM juga agar mampu menembus pasar global serta dapat memenuhi permintaan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada tahun 2024 yang telah Naik kelas sebanyak 871 IKM. Apabila dibandingkan tahun 2023, maka bertambah 70 IKM dari 401 IKM. kalau dibandingkan dengan target sebanyak 500 IKM, maka tercapai 174%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra Tahun 2026 dengan Target 700 IKM, maka pada Tahun 2024 sudah tercapai nilai 871 IKM dengan persentase capaian sebesar 124,42%. Jadi jumlah IKM Naik Kelas dari tahun 2022 – 2024, terus mengalami peningkatan, sebagaimana tabel berikut :



Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Upaya untuk memperbanyak IKM yang naik kelas, yaitu :

- Fasilitasi pelatihan desain produk, sertifikasi produk, inovasi produk, dan sistem manajemen mutu produk bagi IKM;
- Fasilitasi Standarisasi Produk IKM.

Berikut upaya untuk memperbanyak IKM yang naik kelas Tahun 2024 :

1. Melakukan pengajuan permohonan pendaftaran merek pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam tahun 2024 sudah terdaftar 92 IKM yang melakukan pendaftaran merek.
2. Melakukan pengujian laboratorium produk ikm yang lolos pendaftaran merek, di tahun 2024 sebanyak 38 IKM telah lolos pendaftaran merek.
3. Apabila seluruh prosedur telah dilaksanakan maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Pemberian surat keterangan IKM, pada tahun 2024 telah diterbitkan surat IKM kepada 90 IKM

Sasaran 3

Indikator Kinerja ke-11: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam Arti Luas.

Tabel 3.32 Realisasi PDRB Sektor Pertanian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
11	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	Persen	2,95	1,32	44,75	3,25	40,62	Tidak Tercapai

Sumber Data: BPS Tahun 2024

Laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor pertanian dalam arti luas mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi dari seluruh aktivitas yang terkait dengan sektor pertanian, termasuk produksi tanaman, peternakan, perikanan, kehutanan, dan industri pengolahan hasil pertanian. Pertumbuhan PDRB ini diukur dengan perubahan nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor pertanian dalam suatu periode tertentu.

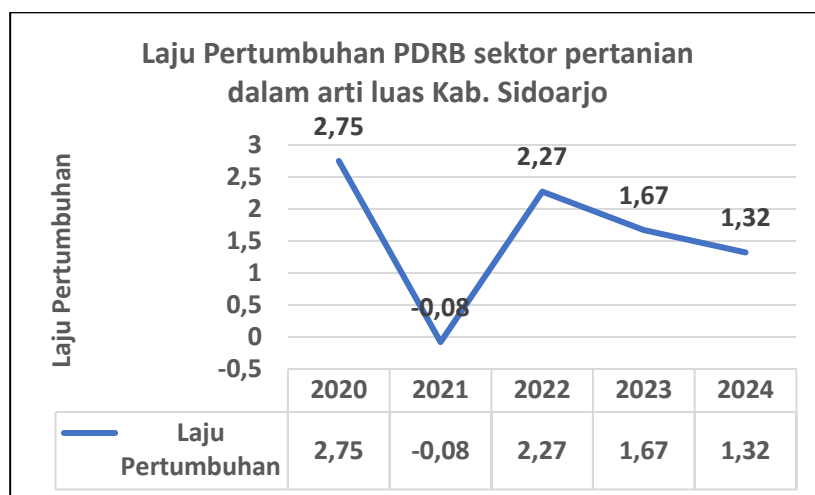
Berdasarkan data BPS Kabupaten Sidoarjo, laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas tahun 2024 adalah 1,32 dari

target 2,95, yang berarti realisasinya baru mencapai 44,75% dari target. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 1,67 maka mengalami perlambatan sebesar 0,35 poin. Demikian halnya bila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan laju pertumbuhannya sebesar 2,27 juga mengalami perlambatan. Jika pola ini berlanjut, ada kemungkinan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas terus menurun di tahun-tahun mendatang.

Dari data yang ada, laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir yaitu :

- **2020: 2,75%** (Pertumbuhan positif, pemulihan setelah awal pandemi COVID-19)
- **2021: -0,08%** (Penurunan tajam, disebabkan oleh dampak pandemi dan faktor eksternal seperti cuaca atau harga komoditas)
- **2022: 2,27%** (Pemulihan signifikan setelah penurunan di tahun sebelumnya)
- **2023: 1,67%** (Pertumbuhan melambat dibandingkan tahun 2022)
- **2024: 1,32%** (Tren perlambatan berlanjut)

Sebagai ilustrasi, berikut grafik perkembangan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas dari tahun 2020 – 2024.



Sebagaimana grafik diatas, dapat terlihat pola dari perkembangan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas

tersebut, antara lain :

- Fluktuatif : Tahun 2021 mengalami kontraksi -0,08, kemudian pulih di tahun 2022 sebesar 2,27, akan tetapi kembali mengalami perlambatan di tahun 2023 dan 2024.
- Perlambatan Bertahap : Setelah pemulihan di tahun 2022, laju pertumbuhan terus melambat dari 1,67 di tahun 2023 menjadi 1,32 di tahun 2024.
- Kecenderungan Menurun : Jika pola ini berlanjut, ada kemungkinan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas terus menurun di tahun-tahun mendatang.

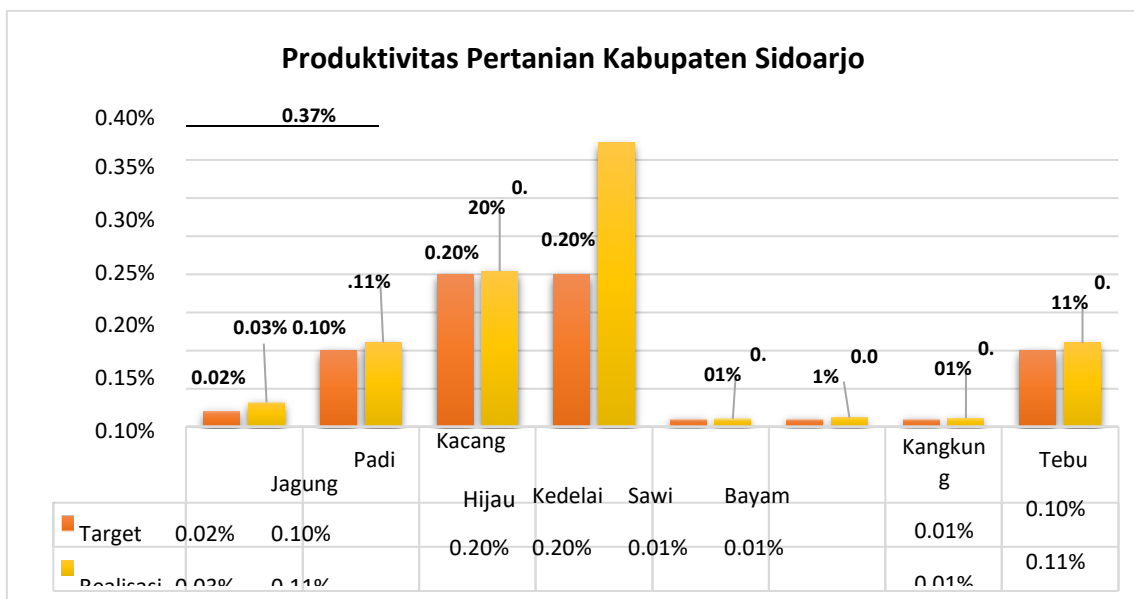
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, antara lain :

- Peralihan Lahan Pertanian : Kabupaten Sidoarjo mengalami urbanisasi yang cukup pesat, yang berakibat mengurangi luas lahan pertanian;
- Efisiensi Produksi : Jika inovasi atau modernisasi pertanian tidak cukup cepat diadopsi, pertumbuhan bisa melambat;
- Harga dan Permintaan Pasar : Harga komoditas yang tidak stabil serta daya beli masyarakat juga dapat mempengaruhi sektor ini.

Jika tren perlambatan ini berlanjut tanpa ada intervensi kebijakan atau inovasi, laju pertumbuhan sektor pertanian bisa terus menurun dalam beberapa tahun ke depan.

Sejalan dengan tren tersebut, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 3,25 persen, maka capaian tahun ini masih jauh dari target akhir RPJMD. sedangkan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia tahun 2023 sebesar 12,53 persen.

Adapun kinerja yang mendukung peningkatan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas, antara lain



Produktivitas Pertanian

Perkembangan produktivitas pertanian Tahun 2024, dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.33 Produktivitas Pertanian

No.	Tanaman Pangan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
1	Padi	0,020%	0,0319%	127,5%
2	Jagung	0,100%	0,1106%	110,6%
3	Kacang Hijau	0,200%	0,2040%	102%
4	Kedelai	0,200%	0,3725%	186,25%
5	Sawi	0,010%	0,0104%	104%
6	Bayam	0,010%	0,0121%	121%
7	Kangkung	0,010%	0,0114%	114%
8	Tebu	0,100%	0,11%	110%

Tren realisasi produktivitas pertanian terlihat bahwa dari 8 jenis tanaman pangan, telah tercapai semua dari target yang telah ditetapkan, sebagaimana grafik berikut :

Produksi Peternakan

Perkembangan produktivitas peternakan Tahun 2024, dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.34 Produktivitas Peternakan

No.	Hasil Peternakan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
1.	Daging	0,85%	1,35%	158,82%
2.	Telur	0,85%	0,99%	116,47%
3.	Susu	0,85%	1,12%	186,67%

Tren realisasi produktivitas peternakan, sebagaimana grafik berikut:

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan produksi peternakan, antara lain :

- Optimalisasi penyaluran bibit peternakan
- Optimalisasi pelayanan kesehatan hewan

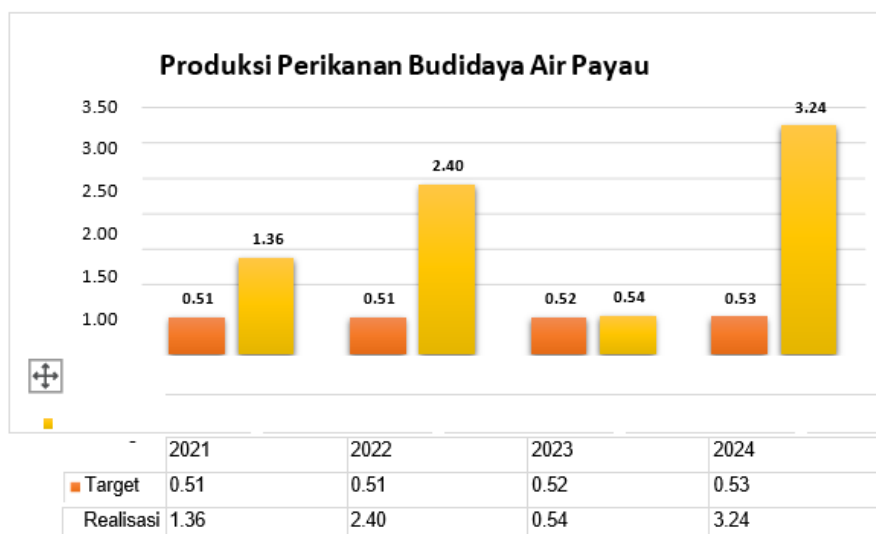
Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Perkembangan hasil produksi perikanan budidaya air payau, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.35 Produktivitas Perikanan

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	0,51%	0,51%	0,52%	0,53%
Realisasi	1,36%	2,4%	0,54%	3,24%
Capaian	266,67%	470,59%	103,85%	611,3%

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan budidaya air payau dilihat sebagai berikut:



Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan budidaya air payau semakin meningkat, yaitu:

- Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia (Pembudidaya) dengan cara memberikan pelatihan dan sosialisasi cara berbudidaya dengan baik dan benar.
- Pemberian hibah dan bantuan dan diadakannya KURDA.

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Perkembangan hasil produksi perikanan tangkap, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.36 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap

Tahun	2021	2023	2024
Target	0,55%	0,56%	0,57%
Realisasi	0,77%	0,56%	0,57%
Capaian	139,66%	100%	100%

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil produksi perikanan tangkap laut dapat dilihat sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan agar hasil produksi perikanan tangkap laut semakin meningkat, yaitu :

- Pemberian hibah / Bantuan sarana dan prasarana untuk nelayan sehingga dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan

para nelayan.

- Pemberian modal / bantuan modal kepada nelayan sehingga memungkinkan nelayan untuk meningkatkan produksi hasil tangkapan para nelayan.

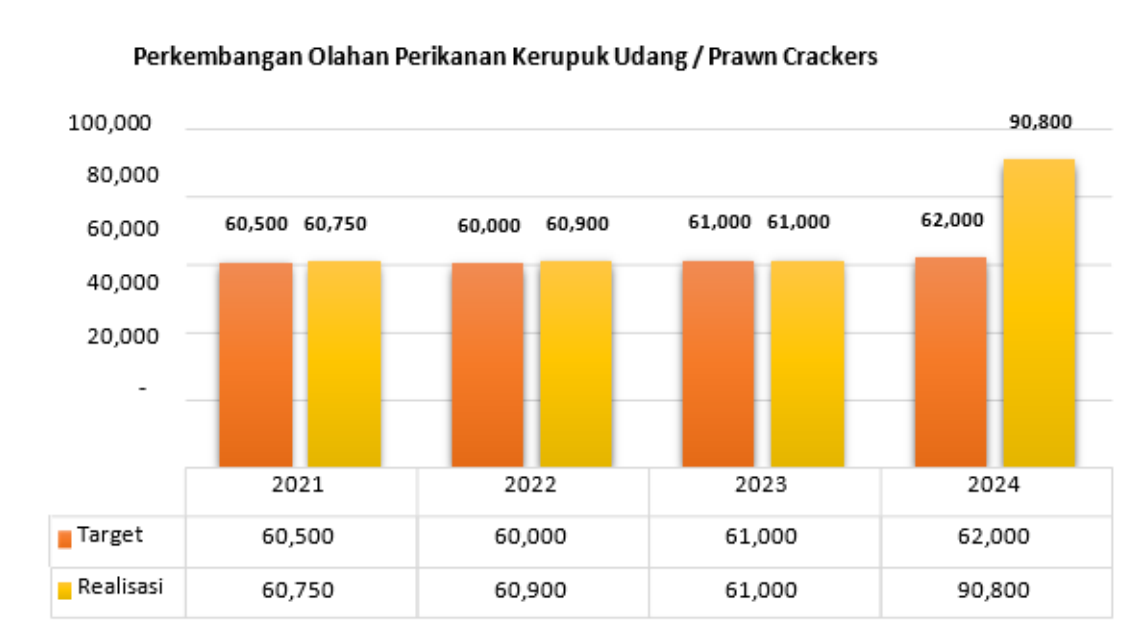
Nilai tambah produksi olahan hasil perikanan kerupuk udang/ prawn crackers.

Perkembangan hasil olahan perikanan kerupuk udang / prawn crackers, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.37 Perkembangan Hasil Olahan Perikanan

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target	Rp 60.500/kg	Rp 60.000/kg	Rp 61.000/kg	Rp 62.000/kg
Realisasi	Rp 60.750/kg	Rp 60.900/kg	Rp 61.000/kg	Rp 90.800/kg
Capaian	101,25%	103,22%	100,16%	146,45%

Sedangkan apabila diilustrasikan dalam bentuk grafik, maka perkembangan hasil olahan perikanan kerupuk udang / prawn crackers dapat dilihat sebagai berikut :

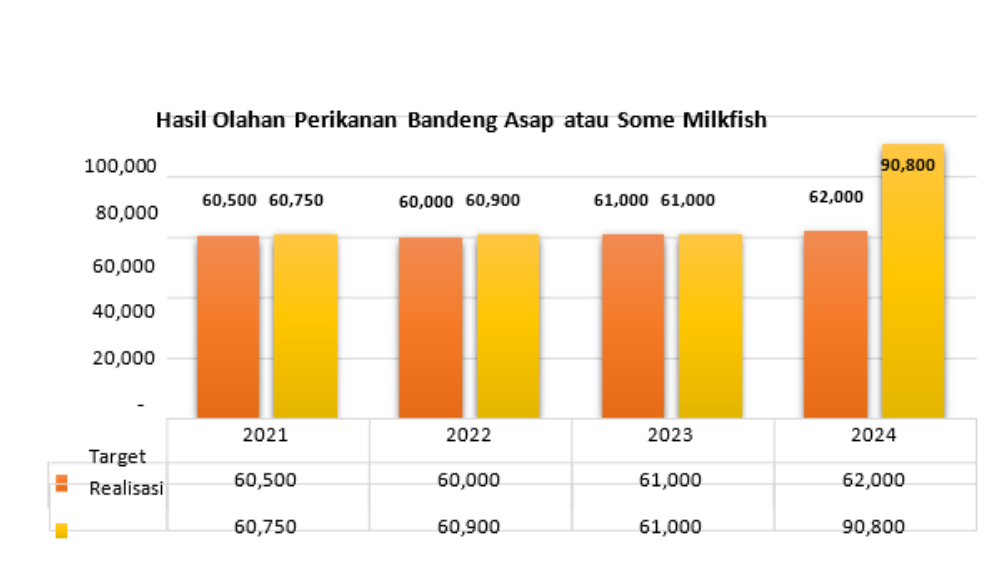


Upaya yang dilakukan agar Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kerupuk Udang / Prawn Crackers semakin meningkat, yaitu:

- Harus memiliki sertifikasi keamanan mutu produksi olahan hasil perikanan
- Melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada para pengolah.
- Melakukan pengawasan yang baik sesuai dengan standart

Nilai tambah produksi olahan hasil perikanan bandeng asap/ smoke milkfish

Perkembangan hasil olahan perikanan bandeng asap atau smoke milkfish, sebagaimana tabel berikut:



Upaya yang dilakukan agar Nilai Tambah Produksi Olahan Hasil Perikanan Bandeng Asap / Smoke Milkfish semakin meningkat, yaitu:

- Harus memiliki sertifikasi keamanan mutu produksi olahan hasil perikanan
- Melakukan pelatihan atau sosialisasi kepada para pengolah.
- Melakukan pengawasan yang baik sesuai dengan standart

Sasaran 3

Indikator Kinerja 12: Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi

Tabel 3.38 Realisasi Nilai Investasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
12	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	1,29	24,9	1930,23	1,52	1638,16 %	Tercapai

Sumber Data: BKPM Tahun 2024

Investasi yang ada di Pemerintah Daerah meliputi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). PMA adalah kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

**Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Dengan Target RPJMD**

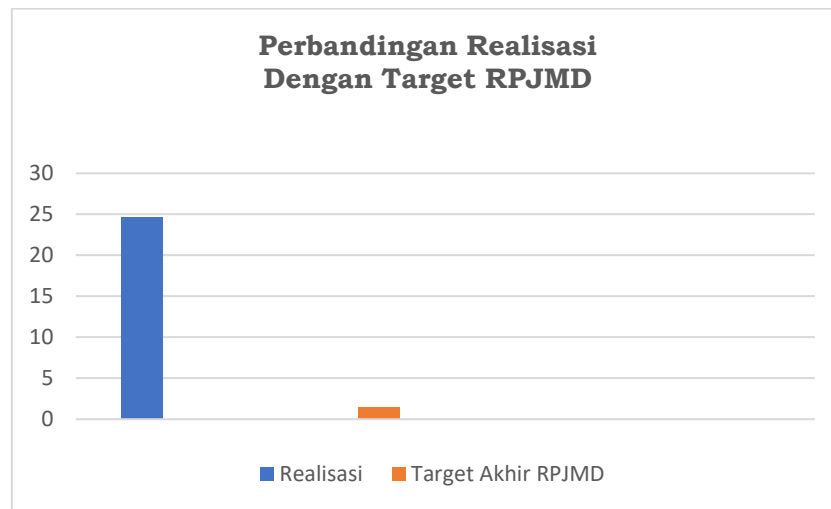
Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	24,6	1,52	1638,16

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021- 2026

Berdasarkan rilis BKPM RI, realisasi Investasi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 sebesar Rp. 17.046.441.000.000,00 (17,046 triliun) melampaui dari yang ditargetkan Rp. 12.000.000.000.000,00 (12 triliun), tercapai 142% atau melebihi target sebesar Rp. 5,046 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 13.681.823.120.000,00 atau 13,681 triliun maka terjadi peningkatan 24,6% atau senilai Rp.3,364 triliun, terjadi lonjakan cukup tinggi dari

tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya perbaikan iklim investasi, peningkatan infrastruktur,

kemudahan perijinan, kedekatan Sidoarjo dengan Surabaya serta akses logistik yang baik dan lain-lain.



Nilai investasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023- 2024

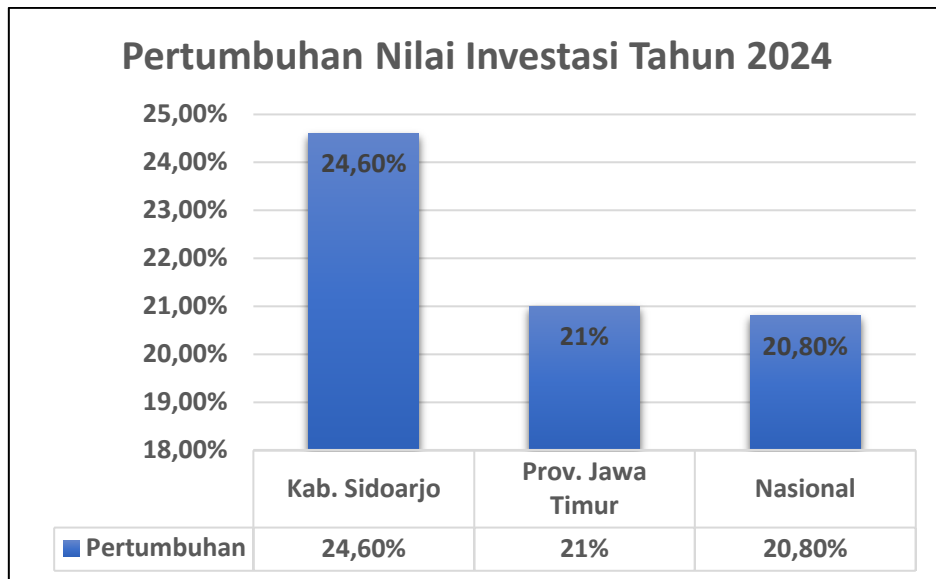
Tabel 3.40 Nilai investasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023- 2024

No	Jenis Penanaman Modal	Nilai Investasi		Selisih	Pertumbuhan Investasi
		2023	2024		
1	Penanaman Modal Asing (PMA)	1.351.305.120.000,00	4.951.414.500.000,00	3.600.109.380.000,00	266,4
2	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	12.330.518.000.000,00	12.095.026.500.000,00	-235.491.500.000,00	-1,9
	Jumlah	13.681.823.120.000,00	17.046.441.000.000,00	3.364.617.880.000,00	24,6

Sumber Data: BKPM RI 2024

Dengan realisasi pertumbuhan nilai investasi tahun 2024 sebesar 24,6%, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 1,52%, maka capaian tahun ini sudah jauh melampaui. Demikian halnya apabila dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, pertumbuhan investasi di Kabupaten Sidoarjo sebesar **24,6%** lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan investasi di tingkat provinsi Jawa Timur (**21%**) dan nasional (**20,8%**). Hal ini

menunjukkan bahwa Sidoarjo memiliki daya tarik investasi yang kuat dan berhasil menciptakan iklim investasi yang kondusif.



Berdasarkan data pertumbuhan investasi Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun terakhir, dinyatakan sebagai berikut :

- Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -3,69%
- Tahun 2021 melonjak pada angka 38,87%
- Tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan sebesar 44,13%
- Tahun 2023 penurunan kembali di angka -2,87%
- Tahun 2024 terjadi pemulihan sebesar 24,60

Berikut grafik perkembangan Nilai Investasi dan Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2020 – 2024 :



Sumber Data: DPMPSTSP Kab Sidoarjo Tahun 2024

Secara keseluruhan, tren investasi di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan **fluktuasi signifikan**, dengan periode pertumbuhan tinggi di 2021-2022, diikuti oleh penurunan pada 2023, dan pemulihan di 2024.

Faktor yang Mempengaruhi Tren :

- **2020 (-3,69%)**: Pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan ekonomi global, termasuk investasi yang berkontraksi akibat pembatasan aktivitas bisnis.
- **2021 (+38,87%)**: Pemulihan ekonomi pasca pandemi, didorong oleh kebijakan stimulus, kemudahan investasi, dan kembalinya aktivitas industri dan perdagangan.
- **2022 (+44,13%)**: Investasi terus meningkat seiring pulihnya daya beli dan ekspansi industri, terutama sektor manufaktur dan perdagangan.
- **2023 (-2,87%)**: Penurunan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, inflasi, atau kebijakan moneter yang lebih ketat.
- **2024 (+24,60%)**: Pemulihan investasi menandakan kepercayaan investor kembali meningkat, didukung oleh perbaikan iklim bisnis dan peningkatan infrastruktur.

Prospek ke Depan:

Jika melihat pola sebelumnya, Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi **pertumbuhan investasi yang positif** dalam beberapa tahun ke depan. Untuk menjaga tren naik, strategi berikut perlu dilakukan oleh Kabupaten Sidoarjo :

- **Memperkuat daya tarik investasi** dengan insentif pajak dan kemudahan perizinan;
- **Mengembangkan sektor unggulan**, seperti industri manufaktur, perdagangan, dan teknologi;
- **Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas** untuk menarik lebih banyak investor;

- **Mendorong investasi hijau dan berkelanjutan** sebagai bagian dari tren global.

Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Sidoarjo bisa menjaga pertumbuhan investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Sasaran 4: Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa

Tabel 3.41 Indikator Kinerja Sasaran IV

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
13	Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	2,04	2,21	108,33	2,15	102,79	Sangat Baik
14	Persentase Koperasi Berkualitas	%	26,39	26,73	101,29	30,34	88,10	Sangat Baik
15	Persentase Desa Mandiri	%	28,88	67,92	235,18	18,63	364,573	Sangat Baik

Sasaran 4

Indikator Kinerja ke- 13: Persentase Usaha Mikro Mandiri

Tabel 3.42 Persentase Usaha Mikro Mandiri

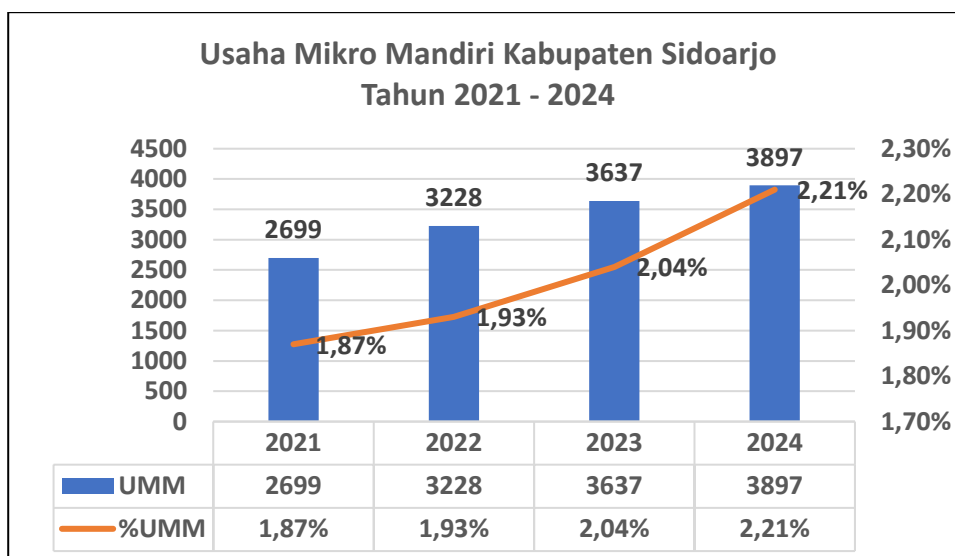
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
13	Persentase Usaha Mikro Mandiri	Persen	2,04	2,21	108,33	2,15	102,79	Sangat Baik

Sumber Data: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Usaha Mandiri merupakan usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berinisiatif dan bekerja keras dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal, menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggung jawabkannya berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri.

Pada tahun 2024, jumlah usaha mikro yang mandiri di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebanyak 3.897 usaha mikro, yang setara dengan 2,21% dari total keseluruhan 175.426 usaha mikro yang ada, atau tercapai dari target 1,98%. Meskipun persentasenya masih tergolong kecil, pencapaian ini menunjukkan adanya upaya yang terus dilakukan untuk membantu usaha mikro agar bisa menjadi lebih mandiri dan berkembang, baik dari sisi manajerial, finansial, maupun pemasaran. Program-program pemerintah dan lembaga terkait sangat berperan dalam mendukung usaha mikro untuk meningkatkan kualitas dan daya saing mereka di pasar.

Perbandingan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 2,04% atau sebanyak 3.637 usaha mikro sehingga terdapat peningkatan sebanyak 260 usaha mikro. Adapun perkembangan jumlah usaha mikro yang mandiri dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, Persentase Usaha Mikro Mandiri tahun 2024 adalah 2,21 dari target 2,15 pada akhir RPJMD, yang berarti realisasinya sudah tercapai melebihi target akhir RPJMD dengan capaian 102,79%. Untuk tingkat nasional, sampai laporan ini disusun kami belum mendapatkan data capaian ditingkat nasional tersebut, sehingga tidak bisa disampaikan di laporan ini.

Usaha mikro yang ada di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2024, terbanyak adalah dari kelompok usaha mikro, sebagai berikut :

Tabel 3.43 Kelompok Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No.	Klasifikasi Usaha Mikro	Persentase
1.	Perdagangan	47,77%
2.	Kuliner	30,27%
3.	Jasa	9,24%
4.	Lain- lain	6,95%
5.	Fashion	4,33%
6.	Agribisnis	1,26%

Dalam rangka penguatan usaha mikro agar terus berkembang dan lebih lebih banyak lagi yang dapat mandiri, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 telah merenovasi 1.210 warung milik pelaku usaha mikro. Program renovasi ini bertujuan meningkatkan kenyamanan dan daya tarik warung, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mikro dan kesejahteraan masyarakat setempat. Renovasi ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM, termasuk melalui fasilitasi pendaftaran produk ke e-katalog local.

Upaya kedepan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar semakin banyak usaha mikro yang masuk kategori usaha mikro yang mandiri, yaitu :

- Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro melalui pelatihan

kewirausahaan, bimbingan teknis, perizinan, dan pengelolaan usaha.

- Menyediakan pendampingan usaha mikro melalui klinik usaha mikro dan kegiatan non anggaran seperti sedekah ilmu.
- Memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk sosialisasi bekerja

sama dengan lembaga keuangan dan perbankan.

- Perluasan akses pasar dalam berbagai bentuk pameran, fasilitasi kemitraan dan jaringan usaha.
- Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi swasta (PTS) dan lembaga lainnya.

Sasaran 4

Indikator Kinerja ke- 14: Persentase Koperasi Berkualitas

Tabel 3.44 Realisasi Koperasi Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
14	Persentase Koperasi Berkualitas	Persen	26,39	26,73	101,29	30,34	88,10	Sangat Baik

Sumber Data: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

Parameter yang menjadi dasar koperasi berkualitas adalah apabila memenuhi 5 (lima) aspek yang terdiri dari :

- Aspek Kelembagaan Koperasi, meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota.
- Aspek Usaha Koperasi, ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi dalam

hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagi risiko (risk sharing), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan aset,

peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan keuntungan.

- Aspek Keuangan Koperasi, ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya seperti prosentase pelunasan simpanan wajib dan prosentase besaran simpanan sukarela.
- Aspek Manfaat Koperasi terhadap Anggota, ditunjukkan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka.
- Aspek Manfaat Koperasi terhadap Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

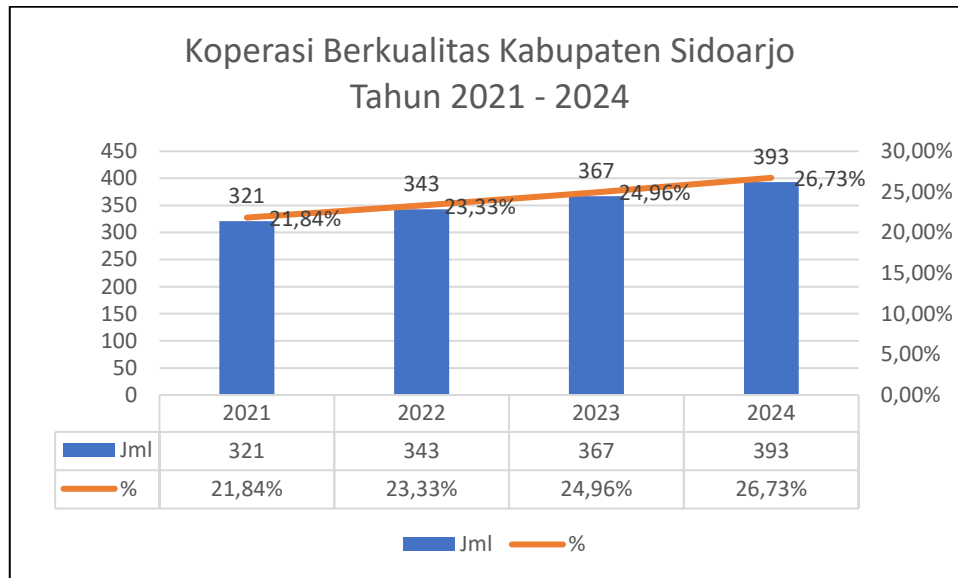
Pada tahun 2024, jumlah koperasi yang berkualitas di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebanyak 393 koperasi, yang setara dengan 26,73% dari total keseluruhan 1.470 koperasi yang ada. Pencapaian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 26,39%. Artinya, Kabupaten Sidoarjo berhasil melampaui target yang ditentukan.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023, yaitu 24,96% atau sebanyak 367 koperasi, terdapat peningkatan sebanyak 26 koperasi. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan yang positif dalam kualitas koperasi di Kabupaten Sidoarjo, yang mencerminkan efektivitas berbagai program dan upaya untuk meningkatkan kinerja koperasi di Kabupaten Sidoarjo.

Sebagian besar koperasi di Kabupaten Sidoarjo masih dalam proses pengembangan untuk mencapai standar kualitas yang lebih baik, meskipun sudah ada sejumlah koperasi yang berhasil mencapai status kualitas tinggi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong

pembenahan dan peningkatan kualitas koperasi agar dapat berkontribusi lebih maksimal terhadap perekonomian daerah.

Dalam perkembangannya, kualitas koperasi di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ketahun terus meningkat. Sebagai ilustrasi, berikut grafik perkembangan koperasi dari tahun 2021 – 2024:



Sumber Data: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2024

Peningkatan kualitas koperasi di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 tentu tidak lepas dari berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Beberapa program kegiatan yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas koperasi di Kabupaten Sidoarjo antara lain:

1. **Pelatihan dan Pembinaan Koperasi**

Program pelatihan manajemen dan pembinaan untuk pengurus dan anggota koperasi sangat penting dalam meningkatkan kualitas koperasi. Pelatihan ini mencakup aspek pengelolaan administrasi, keuangan, pemasaran, dan pengembangan usaha yang profesional.

2. **Peningkatan Akses ke Pembiayaan**

Pemerintah daerah sering kali bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah bagi koperasi. Program ini bertujuan

membantu koperasi dalam mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan kapasitas finansial.

3. Renovasi dan Pengembangan Infrastruktur Koperasi

Program renovasi warung atau tempat usaha yang dijalankan oleh koperasi, seperti yang dilakukan pada tahun 2024, bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan daya tarik koperasi. Hal ini juga mencakup peningkatan fasilitas fisik yang mendukung kegiatan usaha koperasi.

4. Fasilitas Pendaftaran Produk ke E-Katalog Lokal

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memfasilitasi koperasi untuk mendaftarkan produk mereka ke e-katalog lokal, yang memungkinkan produk koperasi lebih mudah diakses oleh konsumen dan instansi pemerintah. Hal ini juga memberikan peluang pasar yang lebih luas.

5. Program Pemberdayaan UMKM

Program-program pemberdayaan UMKM yang melibatkan koperasi, seperti pemberian bantuan peralatan, pengembangan produk, dan pendampingan, turut membantu koperasi dalam mengembangkan kapasitas usaha mereka, sehingga mampu berkompetisi di pasar yang lebih luas.

6. Audit dan Penilaian Kinerja Koperasi

Pemerintah daerah melakukan audit dan penilaian terhadap kinerja koperasi untuk memastikan pengelolaan koperasi sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini membantu koperasi dalam memperbaiki kelemahan dan terus meningkatkan kualitas operasional mereka.

7. Kegiatan Penguatan Jaringan dan Kerja Sama

Program untuk memperkuat jaringan koperasi, baik antar koperasi di tingkat daerah maupun dengan koperasi luar daerah, serta kerjasama dengan perusahaan swasta dan pemerintah, memperluas peluang pasar dan meningkatkan daya saing koperasi.

Dengan adanya berbagai program ini, koperasi di Kabupaten Sidoarjo terus berkembang dan mengalami peningkatan dalam kualitas, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan anggotanya.

Untuk tahun 2025 diperkirakan jumlah koperasi di Kabupaten Sidoarjo akan bertambah. Hal ini seiring dengan dinamika perekonomian regional dan adanya regulasi kemudahan pembentukan koperasi.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 30,34 persen, maka realisasi persentase koperasi berkualitas di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sudah mencapai 88,10% atau masih membutuhkan 1,9 poin untuk mencapai target akhir RPJMD. Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian nasional, tidak ada informasi mengenai persentase kualitas koperasi berkualitas secara nasional pada tahun 2024. Namun, berikut adalah beberapa informasi mengenai koperasi di Indonesia:

- Jumlah koperasi aktif di Indonesia menurun 79.000 unit dalam 9 tahun.
- Nilai keseluruhan aset koperasi aktif mencapai Rp 254,7 triliun.
- Koperasi seringkali tidak dapat berfungsi optimal karena anggota tidak sepenuhnya memanfaatkan fasilitas yang disediakan.
- Harapan anggota yang terlalu tinggi juga seringkali menyebabkan kendala.
- UMKM merupakan sektor yang mendominasi struktur ekonomi Indonesia.
- Berdasarkan data Kementerian UMKM per Desember 2024, terdapat 65,5 juta unit usaha mikro kecil di Indonesia. UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional, dengan nilai mencapai Rp9.300 triliun.

Upaya yang dilakukan agar kualitas koperasi-koperasi di Kabupaten Sidoarjo kedepan bisa meningkat lebih signifikan, maka yang perlu dilakukan antara lain :

- Peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi

melalui fasilitasi bimtek/pelatihan perkoperasian dan study benchmarking di koperasi yang lebih maju

- Memberikan fasilitas izin usaha koperasi melalui sosialisasi dan pendampingan usaha
- Meningkatkan kinerja usaha koperasi melalui pelatihan manajemen perkoperasian
- Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi

Sasaran 4

Indikator Kinerja ke-16: Persentase Desa Mandiri

Tabel 3.45 Realisasi Desa Mandiri

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
15	Persentase Desa Mandiri	Persen	28,88	67,92	235,18	18,63	364,57	Sangat Baik

Sumber Data: Kemendes 2024

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang memiliki pelayanan umum yang bagus, serta 106 penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Pengukuran status desa diformulasikan melalui Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu sebuah indeks komposit (kombinasi) yang dibentuk dari indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi.

Pada tahun 2024, Kabupaten Sidoarjo berhasil melebihi target Desa Mandiri yang ditetapkan. Dari target 28,88%, sebanyak 67,92% atau 216 desa dari 318 desa di Kabupaten Sidoarjo telah berhasil mencapai status Desa Mandiri, 98 desa atau 30,82% dengan status Desa

Maju dan 4 desa atau 1,26% merupakan Desa Berkembang. Ini menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam program pemberdayaan desa di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk lebih jelasnya, berikut Tabel Jumlah Desa Menurut Tingkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, berdasarkan buku Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2025.

Kecamatan Subdistrict	2024					Jumlah Desa
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tarik	3	17	-	-	-	20
Prambon	11	9	-	-	-	20
Krembung	19	-	-	-	-	19
Porong	5	7	-	-	-	12
Jabon	4	7	2	-	-	13
Tanggulangin	9	9	-	-	-	18
Candi	24	-	-	-	-	24
Tulangan	9	11	2	-	-	22
Wonoayu	9	14	-	-	-	23
Sukodono	19	-	-	-	-	19
Sidoarjo	10	-	-	-	-	10
Buduran	15	-	-	-	-	15
Sedati	7	9	-	-	-	16
Waru	17	-	-	-	-	17
Gedangan	15	-	-	-	-	15
Taman	10	6	-	-	-	16
Krian	19	-	-	-	-	19
Balong Bendo	11	9	-	-	-	20
Kabupaten Sidoarjo	216	98	4	-	-	318

Catatan/Note: -
Sumber/Source: Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo/Community and Village Empowerment Office of Sidoarjo Regency

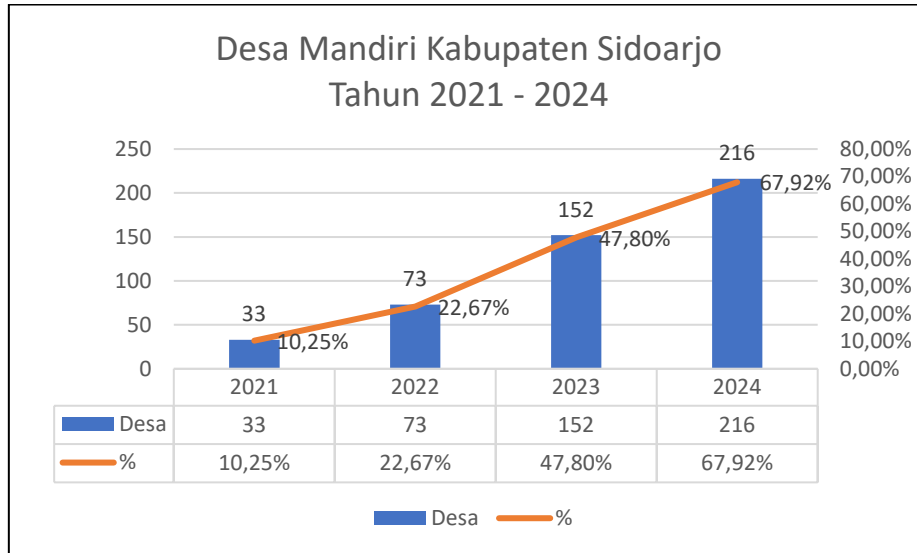
Jumlah Desa di Kabupaten Sidoarjo turun menjadi 318 Desa, dari sebelumnya 322 Desa dikarenakan penggabungan akibat lumpur lapindo sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa Dalam Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagai berikut :

1. Desa Renokenongo digabung dengan Desa Glagaharum menjadi Desa Glagaharum Kecamatan Porong
2. Desa Besuki digabung dengan Desa Dukuhsari menjadi Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon
3. Desa Pejarakan digabung dengan Desa Kedungcangkring menjadi Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon

4. Desa Kedungbendo digabung dengan Desa Ketapang menjadi

5. Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin

Dalam perkembangannya, jumlah desa mandiri di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun selalu meningkat cukup signifikan. Sebagai ilustrasi, berikut grafik perkembangan desa mandiri dari Tahun 2021 – 2024 :



Perkembangan desa mandiri di Kabupaten Sidoarjo terus menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun 2024. Program desa mandiri di Sidoarjo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mengembangkan potensi ekonomi di tingkat desa. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai perkembangan desa mandiri di Kabupaten Sidoarjo:

1. **Pencapaian Tahun 2024:** Pada tahun 2024, Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai **67,92%** dari target **28,88%** desa mandiri. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa, mengingat target awalnya lebih rendah. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pemberdayaan desa yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
2. **Fokus pada Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi:** Pengembangan desa mandiri di Sidoarjo melibatkan perbaikan

infrastruktur dasar seperti jalan, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah. Selain itu, pemberdayaan ekonomi lokal melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi fokus utama. Pembinaan terhadap petani, nelayan, dan pengrajin lokal turut serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan desa.

3. **Pendampingan dan Pelatihan:** Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada warga desa dalam mengelola potensi desa, baik dalam bidang pertanian, perikanan, kerajinan tangan, dan sektor lainnya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa.
4. **Sinergi dengan Program Nasional dan Provinsi:** Program desa mandiri di Sidoarjo juga berkoordinasi dengan program-program yang ada di tingkat provinsi Jawa Timur dan nasional. Misalnya, dengan program Dana Desa, bantuan sosial, serta program pemberdayaan UMKM, yang dapat mempercepat laju transformasi desa menuju kemandirian ekonomi.
5. **Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat:** Selain dari sisi ekonomi, perkembangan desa mandiri di Sidoarjo juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mengutamakan pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik. Ini berdampak langsung pada kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen untuk mempercepat pencapaian desa mandiri. Capaian yang lebih dari target ini menunjukkan potensi besar bagi Sidoarjo untuk terus berkembang dan menjadi model bagi daerah lain di Jawa Timur maupun nasional dalam hal pemberdayaan desa.

Pada tahun 2024, Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai 67,92% dari target 28,88% untuk desa mandiri, yang menunjukkan capaian yang sangat baik. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, kita bisa

melihat capaian rata-rata desa mandiri di Jawa Timur dan secara nasional.

- **Jawa Timur:** Secara umum, capaian desa mandiri di Jawa Timur pada tahun 2024 sekitar **50-60%**, tergantung pada daerah dan program yang diterapkan. Beberapa kabupaten di Jawa Timur juga menunjukkan kinerja yang baik dalam program pemberdayaan desa, tetapi Sidoarjo berada di atas rata-rata provinsi.
- **Nasional:** Di tingkat nasional, rata-rata desa mandiri yang tercatat pada tahun 2024 masih berada di sekitar **40-50%**, dengan beberapa daerah yang sudah jauh lebih maju, dan beberapa lainnya masih berusaha untuk mencapai target.

Dengan demikian, capaian Sidoarjo yang mencapai **67,92%** jauh melampaui rata-rata Jawa Timur dan nasional, menandakan bahwa Sidoarjo telah berhasil meningkatkan pemberdayaan desa dengan signifikan pada tahun 2024.

Upaya yang telah dilakukan agar semakin banyak Desa yang berstatus menjadi Desa Mandiri, yaitu :

- Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas BUMDesa / BUMDesa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa;
- Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa / BUMDesa Bersama;
- Pengembangan Desa Wisata yang dikelola BUMDesa / BUMDesa Bersama;
- Pengembangan usaha ekonomi produktif Desa melalui pemanfaatan TTG yang ramah lingkungan;
- Peningkatan kapasitas RT/RW bertujuan untuk pemahaman tugas dan fungsi dari RT/RW.

Tabel 3.4

Analisis Capaian Kinerja

Tujuan Ke-3: Terciptanya Lapangan Kerja yang Berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan
--

Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,96	6,49	122,65	BPS
Persentase Penduduk Miskin	%	4,87	4,53	107,51	BPS

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya. Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 sebesar 6,49 persen, turun 1,56 poin dibandingkan dengan tahun 2023 yang berada pada angka 8,05 persen. Penurunan ini mencerminkan adanya **peningkatan lapangan kerja** dan **perbaikan kondisi ekonomi daerah**, juga menunjukkan perbaikan signifikan dalam kondisi ketenagakerjaan. Jika diperbandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 9,76 persen, maka capaian ini lebih baik dari target dengan selisih 3,27 poin lebih rendah dari yang direncanakan.

Berikut ini tren **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** di **Kabupaten Sidoarjo** dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan data yang tersedia:



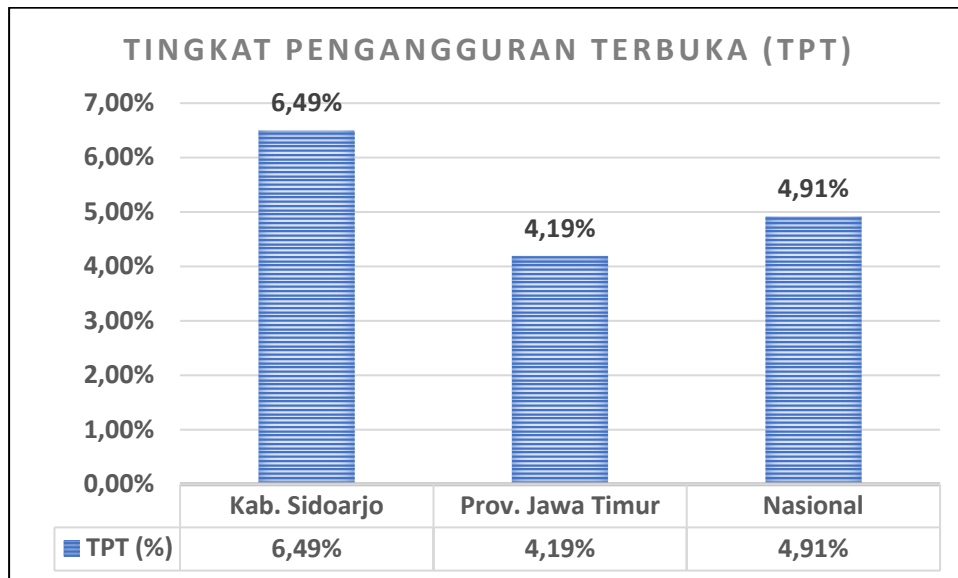
Sumber: BPS Tahun 2024

Analisis Tren TPT (2020 - 2024) :

- **2020 - 2021:** TPT **hampir stagnan**, hanya turun **0,10 poin**. Ini menunjukkan dampak pandemi COVID-19 masih kuat, dan pemulihan ekonomi belum signifikan.
- **2021 - 2022:** **Penurunan drastis sebesar 2,07 poin**. Ini menandakan pemulihan ekonomi mulai terasa, terutama dengan meningkatnya kembali aktivitas bisnis dan industri.
- **2022 - 2023:** Penurunan **melambat** menjadi **0,75 poin**, menunjukkan pasar tenaga kerja masih dalam proses pemulihan.
- **2023 - 2024:** **Turun signifikan lagi sebesar 1,56 poin**, mencerminkan perbaikan ekonomi yang lebih kuat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo pada tahun **2024 sebesar 6,49%**, yang **jauh lebih rendah** dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun **2026 sebesar 9,14%**. Ini menunjukkan bahwa capaian TPT saat ini **sudah melampaui target** yang direncanakan untuk dua tahun ke depan. Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 tercatat sebesar 6,49%. Angka ini **lebih tinggi** dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 4,19% , serta **lebih tinggi** dibandingkan TPT nasional yang tercatat sebesar **4,91%**.



Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa :

- **Kabupaten Sidoarjo:** Dengan TPT sebesar **6,49%**, angka ini **lebih tinggi** dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan **penurunan signifikan** dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu **8,05%** pada tahun 2023.
- **Provinsi Jawa Timur:** TPT sebesar **4,19%** menunjukkan **penurunan** dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di bawah rata-rata nasional.
- **Nasional:** TPT nasional sebesar **4,91%** juga menunjukkan **penurunan** dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan secara umum di Indonesia.

Meskipun **Kabupaten Sidoarjo** memiliki TPT yang **lebih tinggi** dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, tren penurunan yang signifikan menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di Sidoarjo. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk terus

menurunkan angka pengangguran dan mencapai tingkat yang lebih rendah di masa mendatang.

Faktor yang berkontribusi dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo, antara lain :

- a. Adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi, Dunia usaha terutama sektor industri dan perdagangan mulai pulih dan menyerap lebih banyak tenaga kerja;
- b. Investasi dan Industrialisasi, Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai kawasan industri yang berkembang pesat. Jika investasi meningkat, maka akan tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan;
- c. Program Pemerintah Daerah, Program pelatihan keterampilan, UMKM, dan bantuan usaha membantu mengurangi angka pengangguran;
- d. Sektor Informal dan Digital Economy, Meningkatnya pekerjaan berbasis digital dan sektor informal bisa berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

Untuk menurunkan angka kemiskinan, Kabupaten Sidoarjo dapat melakukan berbagai upaya, seperti:

- a. **Pendataan:** Melakukan pendataan penduduk miskin secara akurat dan terpadu
- b. **Pemberdayaan:** Memberdayakan masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pengembangan usaha mikro
- c. **Pengurangan beban:** Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- d. **Peningkatan pendapatan:** Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- e. **Penguatan kelembagaan:** Memperkuat kelembagaan penanggulangan kemiskinan

- f. **Program kesejahteraan sosial:** Mendukung program kesejahteraan sosial masyarakat, seperti PKH, BPNT, dan Jaminan Kesehatan Nasional
- g. **Koordinasi:** Melakukan koordinasi antar lintas untuk percepatan pengentasan kemiskinan
- h. **Inovasi:** Membuat inovasi dalam mengurangi kemiskinan
- i. **Pemanfaatan data:** Memanfaatkan data yang valid untuk merumuskan upaya pengurangan kemiskinan
- j. Selain itu, masyarakat miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, seperti pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

2. **Persentase Penduduk Miskin**

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,53%, yang sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan, yaitu 4,87%, atau tercapai 107,51%. Ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penurunan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 5,00 persen, kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menurun 0,47 poin.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2024 mencapai 109,39 ribu jiwa. Berkurang sebesar

9,76 ribu jiwa, dibandingkan kondisi Maret 2023 yang sebesar 119,15 ribu jiwa.

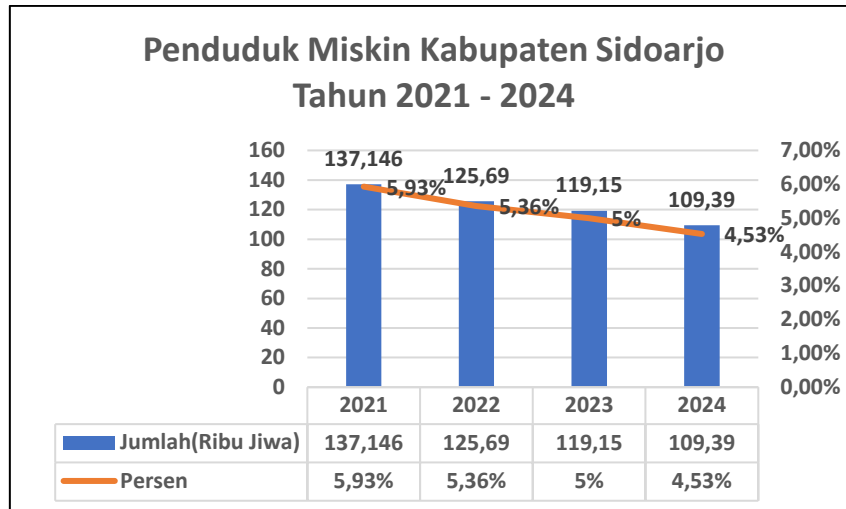
Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2024 sebesar Rp 597.284 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 25.588 atau meningkat sebesar 4,48 persen, dibandingkan kondisi Maret 2023 yang sebesar Rp 571.696.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P) Kabupaten Sidoarjo Maret 2024 sebesar 0,64 mengalami penurunan sebesar 0,08 poin dibandingkan Maret 2023.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidoarjo Maret 2024 sebesar 0,18 mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin dibandingkan Maret 2023

Pada level kabupaten, tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 berada pada posisi terendah, kemudian diikuti oleh Kabupaten Tulungagung, Banyuwangi, Blitar dan Kabupaten Jombang. Sedangkan untuk level kabupaten/kota se-Jawa Timur, tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo berada pada urutan ke-5 terendah setelah Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya dan Kota Madiun.

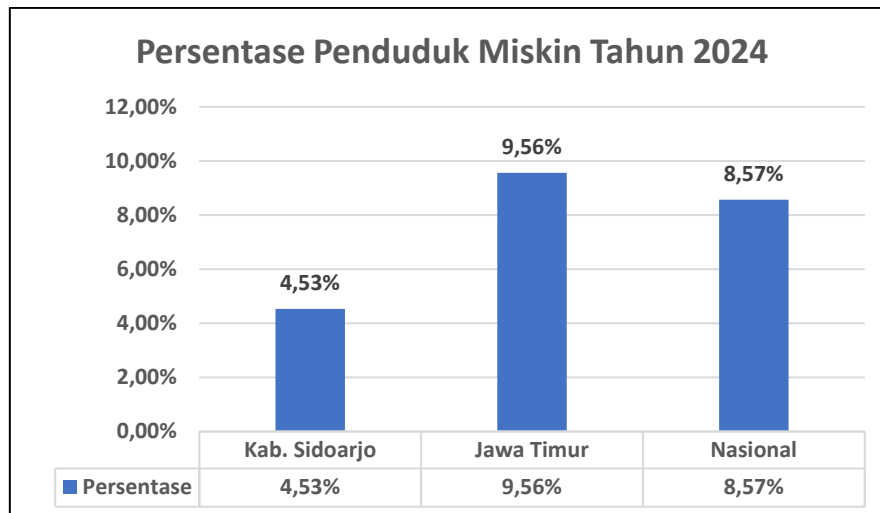
Dalam Perkembangannya, Persentase Penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo dari Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Secara umum, dalam periode 2021-2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 137,146 ribu jiwa, berkurang sebesar 27,756 ribu jiwa menjadi 109,39 ribu jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 sebesar 5,93 persen, berkurang sebesar 1,4 poin atau menjadi 4,53 persen pada tahun 2024.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sebesar 4,53 persen, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 5 persen, tentu tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo tahun ini sudah melampaui target akhir RPJMD. Sedangkan kalau dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Jawa Timur 9,56 persen dan Nasional sebesar 8,57 persen, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Timur maupun Nasional.



Sumber Data : BPS Maret Tahun 2024

Kabupaten Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, beberapa di antaranya melibatkan kebijakan sosial, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut beberapa langkah yang telah dilakukan:

a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah fokus pada pemberdayaan ekonomi melalui program pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Program-program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik.

b. Program Bantuan Sosial dan Subsidi

Pemberian bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan pangan, digunakan untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program subsidi untuk pendidikan dan kesehatan juga membantu meringankan beban masyarakat.

c. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah Sidoarjo berfokus pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan serta layanan kesehatan untuk masyarakat miskin. Pendidikan yang lebih baik membuka peluang kerja yang lebih baik,

sementara layanan kesehatan yang terjangkau membantu mengurangi beban biaya medis bagi keluarga miskin.

d. **Pembangunan Infrastruktur dan Keterhubungan**

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan akses air bersih juga telah mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas hidup dan mendukung kegiatan ekonomi di daerah yang sebelumnya tertinggal.

e. **Program Desa Mandiri**

Sidoarjo menjalankan program pemberdayaan desa, seperti program desa mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial di tingkat desa. Program ini melibatkan pengembangan sektor pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan sesuai dengan potensi daerah setempat.

f. **Kerjasama dengan Lembaga Swasta dan NGO**

Kolaborasi antara pemerintah kabupaten, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah (NGO) juga menjadi bagian dari upaya penurunan angka kemiskinan. Mereka sering menyediakan bantuan pendanaan, pelatihan, dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

g. **Pemantauan dan Evaluasi Program**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan untuk memastikan mereka efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Ini termasuk penyesuaian dan pembaruan kebijakan untuk menjawab tantangan yang muncul di lapangan.

Untuk mewujudkan ketercapaian tujuan ke-3 tersebut yaitu **Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan**, telah didukung oleh 2 sasaran antara lain :

1. Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran;
2. Menurunnya Penduduk Miskin.

Sasaran 5 : Terserapnya Tenaga Kerja Mengatasi Pengangguran
Indikator Kinerja 16 : Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di Sembilan Sector

Tabel 3.47 Realisasi Tenaga Kerja yang Terserap di Sembilan sektor

No	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
16	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di sembilan sektor	%	91,95	93,51	103,62	90,86	102,92	Sangat Baik

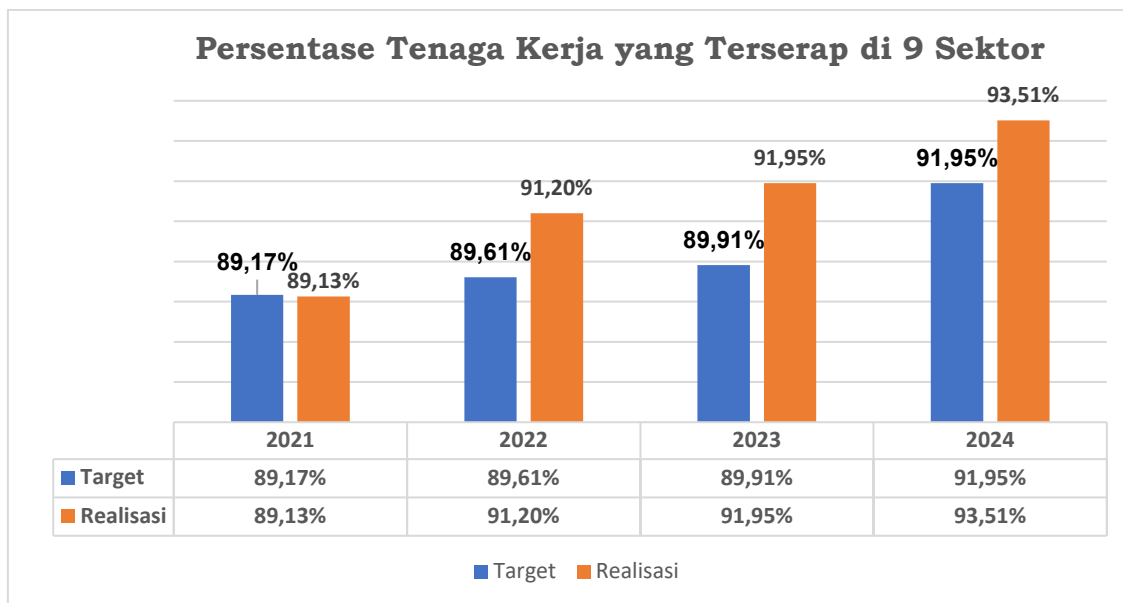
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo Tahun 2024

Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor di Tahun 2024 tercapai 93,51% dari target 91,95% maka capaian sudah melampaui target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 91,95% maka terdapat peningkatan angka 1,56 atau sekitar 1,6%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 90,86%, maka capaian 2024 sudah melampaui target akhir RPJMD.

sektor yang menyerap tenaga kerja dimaksud, yaitu :

- Sektor Pertanian Sembilan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
- Sektor Pertambangan dan Penggalan
- Sektor Industri Pengolahan
- Sektor Listrik, Gas dan Air
- Sektor Bangunan
- Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel
- Sektor Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi
- Sektor Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, Dan Jasa Perusahaan
- Sektor Jasa Kemasyarakatan

Adapun perkembangan persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo Tahun 2024

Sebagaimana grafik diatas, dapat dilihat perkembangan persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor dari tahun 2021 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan atau mengalami tren positif dalam penyerapan tenaga kerja.

a. Tahun 2021: 89,13%

- Pada tahun 2021, persentase tenaga kerja yang terserap di sembilan sektor Kabupaten Sidoarjo berada pada angka 89,13%. Meskipun sudah relatif tinggi, angka ini menunjukkan adanya potensi untuk lebih meningkatkan penyerapan tenaga kerja, baik melalui sektor formal maupun informal.
- Pada saat ini, perekonomian Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, yang memengaruhi banyak sektor industri, termasuk perdagangan, manufaktur, dan jasa.

b. Tahun 2022: 91,20%

- Pada tahun 2022, ada peningkatan signifikan, mencapai 91,20%. Ini menunjukkan pemulihan yang stabil pasca-pandemi, dengan sektor-sektor seperti perdagangan, industri manufaktur, dan jasa semakin mampu menyerap tenaga kerja.

- Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung sektor-sektor unggulan di Sidoarjo, seperti industri kimia dan farmasi, serta sektor logistik dan perdagangan, berkontribusi pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

c. Tahun 2023: 91,95%

- Pada tahun 2023, penyerapan tenaga kerja kembali menunjukkan angka positif, mencapai 91,95%. Peningkatan ini lebih kecil dibandingkan dengan lonjakan pada tahun 2022, namun tetap menunjukkan perkembangan yang stabil.
- Peningkatan ini bisa disebabkan oleh optimalisasi sektor-sektor ekonomi yang ada, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan sektor UMKM yang mulai semakin berkembang di wilayah Sidoarjo.
- Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa program-program pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, seperti pelatihan vokasi dan pemberdayaan masyarakat, mulai berbuah hasil.

d. Tahun 2024: 93,51%

- Angka 93,51% yang tercatat pada tahun 2024 menandakan pencapaian yang sangat baik. Ini mencerminkan peningkatan yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
- Pencapaian ini bisa jadi merupakan hasil dari kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan investasi di sektor-sektor yang ada di Sidoarjo. Program-program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mungkin juga turut berperan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Selain itu, sektor-sektor seperti manufaktur, perdagangan, dan industri kreatif kemungkinan besar turut berkontribusi dalam pencapaian ini, dengan semakin berkembangnya teknologi dan digitalisasi yang membuka peluang pekerjaan baru.

Faktor Pendorong Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja

- **Kebijakan Pemerintah Daerah:** Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mendorong pengembangan ekonomi lokal, investasi industri, serta program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
- **Diversifikasi Sektor Ekonomi:** Meningkatnya investasi di sektor manufaktur, industri kreatif, perdagangan, dan sektor lainnya memungkinkan pembukaan lebih banyak lapangan kerja.
- **Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi:** Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, banyak sektor mulai berkembang kembali, dan ini menciptakan peluang lebih banyak bagi tenaga kerja lokal untuk terserap.

Secara keseluruhan, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren positif dalam penyerapan tenaga kerja di sembilan sektor dari tahun 2021 hingga 2024. Peningkatan yang konsisten menunjukkan keberhasilan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas lapangan kerja. Dengan tingkat penyerapan yang mencapai 93,51% pada tahun 2024, Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mencatatkan hasil yang baik, tetapi juga menegaskan bahwa Kabupaten Sidoarjo sedang menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat melalui peningkatan partisipasi tenaga kerja di berbagai sektor.

Upaya yang dilakukan agar semakin banyak tenaga kerja yang terserap di 9 sektor yaitu :

- Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi profesi untuk mempermudah pencari kerja untuk terserap di dunia kerja.
- Penguatan Bursa Kerja Khusus dalam penempatan tenaga kerja lulusan SMK.
- *Link and match* kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri dan usaha.

- Penguatan hubungan industrial dalam upaya menjaga kondusifitas hubungan kerja untuk mengurangi perselisihan yang berdampak PHK.

Sasaran 6 : Menurunnya Penduduk Miskin

Indikator Kinerja 16 : Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)

Tabel 3.48 Realisasi Garis Kemiskinan

No	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
17	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	%	95,13	95,47	100,36	95,00	100,49	Sangat Baik

Sumber Data : Sidoarjo Dalam Angka 2024

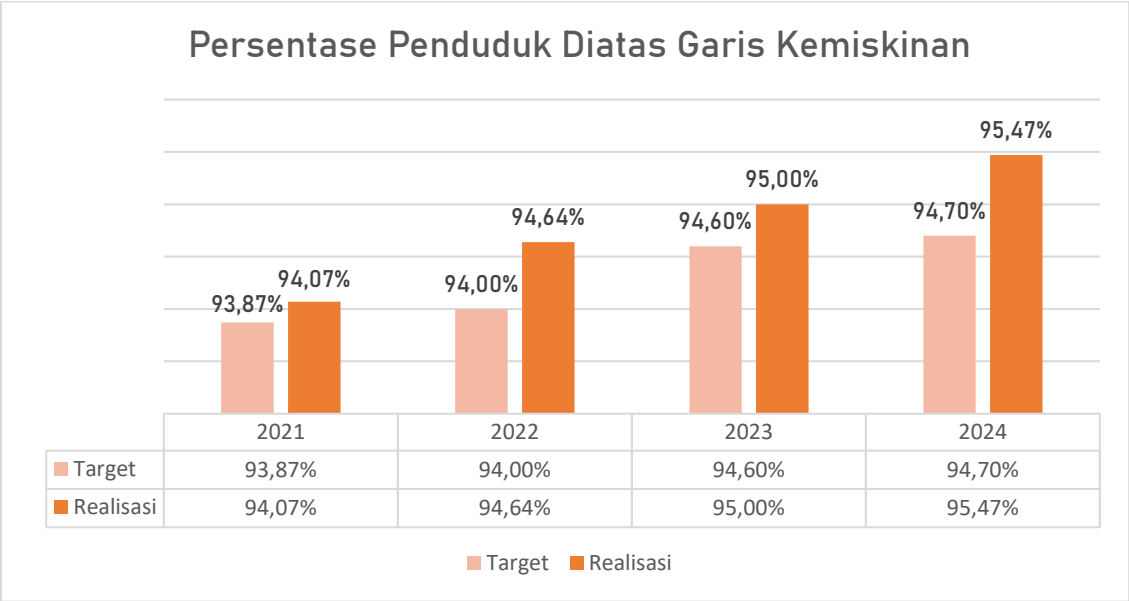
Yang dimaksud dengan "Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sedangkan yang dimaksud Penduduk diatas garis kemiskinan adalah penduduk yang berada di atas suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2024 mencapai 109,39 ribu jiwa. Berkurang sebesar 9,76 ribu jiwa, dibandingkan kondisi Maret 2023 yang sebesar 119,15 ribu jiwa.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2024 sebesar Rp 597.284 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 25.588 atau meningkat sebesar 4,48 persen, dibandingkan kondisi Maret 2023 yang sebesar Rp 571.696. Jumlah penduduk diatas garis

kemiskinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2024 sebanyak 95,47% dari jumlah penduduk dengan target 94,70% sehingga sudah melampaui target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 95,00% maka penduduk yang berada diatas garis kemiskinan semakin meningkat.

Perkembangan persentase penduduk diatas garis kemiskinan dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

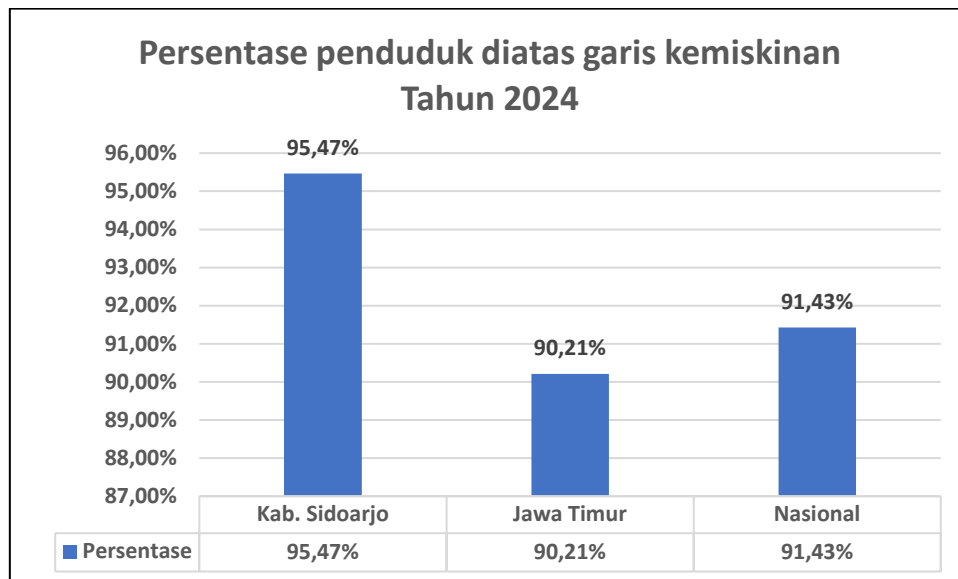


Sumber Data : Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Tahun 2024

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari 9,03% pada Maret 2024 menjadi 8,57% pada September 2024. Namun, data spesifik mengenai persentase penduduk miskin yang terdistribusi di setiap sektor ekonomi belum tersedia secara public.

Adapun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 95,00%, sedangkan realisasi persentase penduduk diatas garis kemiskinan tahun 2024 adalah 95,47%, maka capaian tersebut sudah melampaui sebesar 0,47 poin dari target akhir RPJMD. Apabila dibandingkan dengan capaian Jawa Timur dan Nasional, maka Kabupaten Sidoarjo tahun ini persentase penduduk diatas garis

kemiskinan telah melampaui atau berada diatas Jawa Timur sebesar 90,21% dan Nasional sebesar 91,43%.



Kabupaten Sidoarjo memiliki persentase penduduk di atas garis kemiskinan yang sangat tinggi, yakni **95,47%** pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Sidoarjo tidak hidup di bawah garis kemiskinan.

Sebagai perbandingan:

- **Jawa Timur** memiliki persentase penduduk di atas garis kemiskinan sebesar **90,21%**.
- **Secara Nasional**, persentase penduduk di atas garis kemiskinan adalah **91,43%**.

Dari data ini, dapat dilihat bahwa Sidoarjo memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur dan rata-rata nasional, yang menunjukkan upaya atau kebijakan di Kabupaten Sidoarjo yang lebih efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, angka ini juga menunjukkan bahwa masih ada segmen penduduk yang rentan atau di bawah garis kemiskinan, meskipun lebih kecil persentasenya dibandingkan daerah lain.

Secara umum, sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, industri pengolahan, dan jasa memiliki kontribusi signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam sektor-sektor tersebut dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai distribusi kemiskinan per sektor, disarankan merujuk langsung ke publikasi resmi BPS atau instansi terkait lainnya.

Pencapaian penurunan persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2024, yang tercatat menurun menjadi 8,57% pada September, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling mendukung dalam upaya pengentasan kemiskinan. **Beberapa faktor utama yang menyebabkan keberhasilan ini antara lain** adalah kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor-sektor ekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor kunci adalah **pembangunan sektor pertanian** yang masih menjadi penyumbang utama pendapatan bagi sebagian besar penduduk miskin, terutama di wilayah pedesaan. Pemerintah telah meningkatkan akses terhadap teknologi pertanian dan program pembiayaan bagi petani, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, keberhasilan **program-program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),** juga berperan besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan dan dukungan akses permodalan bagi para pelaku UMKM, yang membantu meningkatkan pendapatan mereka dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, sektor industri pengolahan juga turut berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan industri ini menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal. Peningkatan investasi di sektor industri, baik yang berbasis manufaktur maupun teknologi, memberikan peluang bagi masyarakat dengan berbagai tingkat keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih stabil. Program jaring pengaman sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan

Sosial lainnya, juga membantu meringankan beban penduduk miskin, sehingga mereka dapat bertahan di tengah tantangan ekonomi.

Dengan adanya sinergi antara kebijakan pemerintah yang memperkuat sektor-sektor produktif, pengembangan ekonomi lokal, serta program perlindungan sosial, Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas berbagai program pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih inklusif.

Tabel 3.49 Realisasi Indeks Infrastruktur dan IKLH

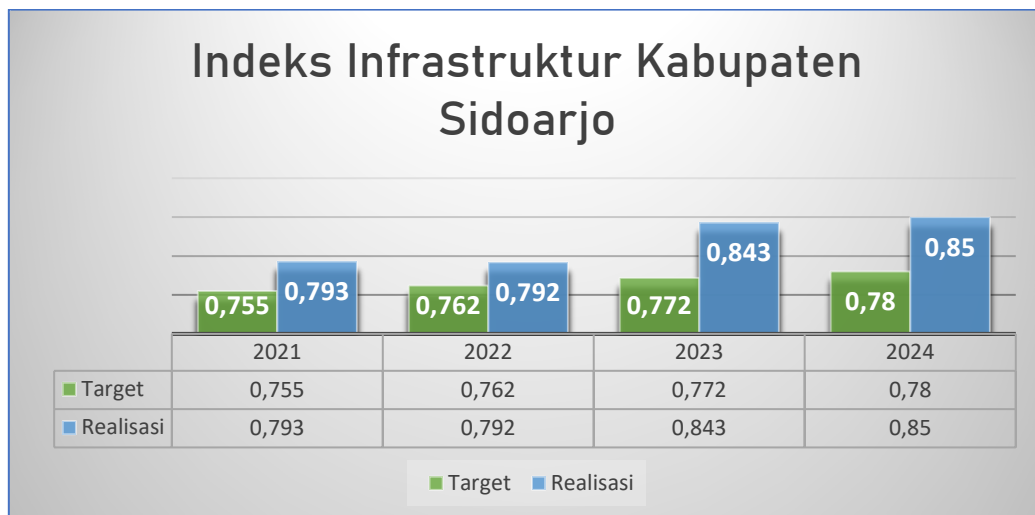
Tujuan Ke-4 Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan					
Indikator Kinerja Utama/Kinerja Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
Indeks Infrastruktur	Indeks	0,78	0,85	108,97	BPS
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,82	53,35	89,18	BPS

3. Indeks Infrastruktur

Indeks pengukuran infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa infrastruktur yang antara lain meliputi Infrastruktur PU Kebinamargaan, Permukiman dan Cipta Karya, Perhubungan, Pendidikan dan Kesehatan. Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pengukuran dimaksud meliputi dimensi pengukuran sebagai berikut :

- 1) Jalan kondisi mantap, sedang dan baik
- 2) Saluran irigasi dan drainase baik
- 3) Sarana dasar permukiman baik
- 4) Sarpras perhubungan baik
- 5) Fasilitas pendidikan baik
- 6) Fasilitas kesehatan baik

Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 mencapai 0,850 dari target 0,780 sehingga mencapai target dengan capaian 108,97%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 0,843 , maka mengalami kenaikan sebesar 0,01 atau 0,83%.



Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Infrastruktur Tahun 2024

Pada tahun 2024 banyak terdapat penambahan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat yang meliputi : Pembangunan Jalan dan Jembatan Frontage Road, Peningkatan / Betonisasi Jalan, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan, Pembangunan Unit Sekolah Baru, Revitalisasi Taman, Pembangunan Trotoar Jalan Raya, Rehabilitasi Puskesmas, Peningkatan Afvoer, dan lain sebagainya.

Apabila dijabarkan hasil perhitungan Indeks Infrastruktur untuk setiap aspek, maka dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target 2024

No.	Variabel	Target 2024	Realisasi 2024
1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	0,766	0,822
2	Indeks Infrastruktur Kesehatan	72,32	84,82
3	Indeks Infrastruktur Pendidikan	86,64	95,60
Indeks Infrastruktur		0,780	0,850

Sumber Data : Laporan Hasil Pengukuran Indeks Infrastruktur

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 0,796 dan realisasi Indeks Infrastruktur tahun 2024 sebesar 0,85, maka Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sudah melampaui target akhir RPJMD sebesar 0,054 poin. Sedangkan apabila dibandingkan dengan indeks infrastruktur nasional, maka angka indeks ini tidak dapat dibandingkan karena komponen yang dihitung berbeda. Komponen infrastruktur nasional jauh lebih luas, seperti diantaranya infrastruktur Bandara, IKN dll yang ini tidak ada pada kabupaten.

Kabupaten Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, baik itu infrastruktur jalan, transportasi, air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan:

a. Peningkatan Infrastruktur Jalan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya untuk memperbaiki dan membangun jalan-jalan yang ada, baik jalan utama maupun jalan lingkungan. Salah satu proyek besar yang dilakukan adalah perbaikan dan peningkatan kapasitas jalan yang menghubungkan Sidoarjo dengan daerah sekitar, seperti Surabaya dan Mojokerto. Perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas dan mendukung perekonomian daerah. Misalnya, pada tahun 2024 banyak jalan-jalan yang ditingkatkan dengan betonisasi, pembangunan frontage road disepanjang waru – Buduran, juga pembangunan flyover Juanda dan Trosobo.

b. Pengembangan Infrastruktur Transportasi

- c. Pemerintah daerah juga meningkatkan kualitas transportasi publik, termasuk pembangunan terminal dan fasilitas transportasi lainnya untuk mendukung mobilitas warga. Selain itu, pengembangan transportasi berbasis rel, seperti proyek jalur kereta api yang menghubungkan Sidoarjo dengan Surabaya, juga menjadi fokus.

d. **Penyediaan Air Bersih**

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh Kabupaten Sidoarjo adalah penyediaan air bersih. Untuk itu, pemerintah setempat berusaha untuk meningkatkan kualitas sistem penyediaan air bersih, baik melalui pembangunan instalasi pengolahan air bersih (IPA) maupun pengembangan sistem perpipaan yang lebih efisien. Ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kesulitan mendapatkan air bersih.

e. **Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Publik**

Kabupaten Sidoarjo juga melakukan peningkatan fasilitas publik, seperti pasar, rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan tempat-tempat ibadah. Dengan memperbaiki fasilitas ini, kualitas hidup warga dapat meningkat, serta mendorong pembangunan ekonomi dan sosial.

f. **Peningkatan Infrastruktur Keamanan dan Ketahanan Bencana**

Mengingat Sidoarjo merupakan wilayah yang rawan bencana, terutama terkait dengan erupsi lumpur Lapindo dan banjir, pemerintah daerah juga berfokus pada pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana. Pembenahan saluran drainase, pembangunan tanggul, dan sistem peringatan dini menjadi prioritas untuk mengurangi risiko bencana.

g. **Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Pemerintah Provinsi**

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Ini melibatkan pembiayaan bersama, serta kebijakan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

h. Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur Digital

Dalam era digital, Sidoarjo juga fokus pada pengembangan infrastruktur digital. Peningkatan konektivitas internet, terutama di area pedesaan, menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan akses informasi dan teknologi yang lebih baik bagi masyarakat.

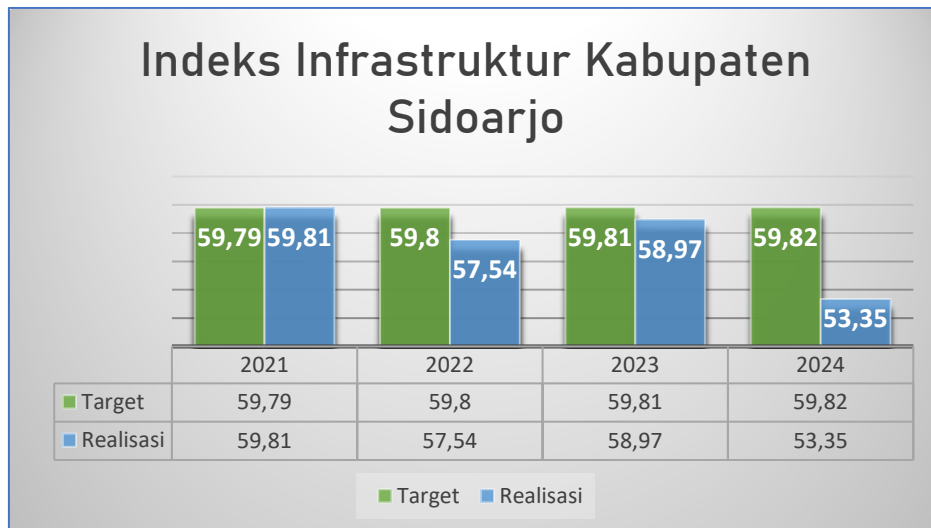
Dengan berbagai upaya tersebut, Kabupaten Sidoarjo berusaha untuk menciptakan infrastruktur yang lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2024 mencapai 53,35 dari target 59,82. Nilai Indeks Kualitas Hidup Kabupaten Sidoarjo tersebut termasuk dalam kategori sedang. Jika dibanding dengan capaian Tahun 2023 yaitu 58,99 maka terdapat penurunan 5,64 poin atau sekitar 9,56%.

Adapun perkembangan nilai/skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup setiap tahunnya dapat dilihat sebagaimana grafik berikut:



Sumber Data : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Tahun 2024

Yang menjadi faktor pengurang dari tidak tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup karena 3 Indikator yang menjadi dasar perhitungan tidak mencapai target yakni Indeks Kualitas Air senilai 49,71, Indeks Kualitas Udara senilai 71,91 dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang masih mencapai angka 25,28.

Hal ini dikarenakan definisi operasional dari Indeks Kualitas Lahan yang harus menunjukkan penghijauan dari tajuk ke tajuk, sedangkan sebagian besar taman di Kabupaten Sidoarjo, pepohonan belum mencapai ketinggian yang sampai menutupi dari tajuk ke tajuk.

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.51 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

INDIKATOR	SKOR
- Indeks Kualitas Air (IKA)	49,71
- Indeks Kualitas Udara (IKU)	71,91
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi (IKL)	25,28

Sumber Data : Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dengan capaian IKLH Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sebesar 59,82 dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 59,84, maka ada selisih 0,02 poin. Artinya dengan selisih yang sangat kecil sangat bisa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mencapainya diakhir RPJMD. Apabila dibandingkan dengan capaian IKLH Nasional sebesar 73,07, maka Kabupaten Sidoarjo masih tertinggal dengan capaian IKLH Nasional dengan selisih 13, 25 poin. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu kerja keras untuk bisa menyamai capaian nasional.

Untuk perbaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Sidoarjo ke depan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat, antara lain:

1. Pengelolaan Sampah yang Lebih Baik

- Menyusun sistem pengelolaan sampah yang efisien, seperti pengurangan sampah plastik, pemilahan sampah organik dan anorganik, serta peningkatan fasilitas daur ulang.
- Menyediakan tempat sampah yang memadai di ruang publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah.

2. Penanaman dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Meningkatkan luas dan kualitas ruang terbuka hijau di kota, serta melibatkan masyarakat dalam penanaman dan pemeliharaan tanaman.
- Memperkenalkan program penghijauan di berbagai titik strategis untuk meningkatkan kualitas udara dan keanekaragaman hayati.

3. Peningkatan Sistem Drainase dan Pengelolaan Air

- Meningkatkan kualitas dan kapasitas drainase untuk mencegah banjir, serta pengelolaan air yang berkelanjutan agar tidak terjadi kerusakan ekosistem perairan.
- Menjaga kualitas air di sungai dan saluran air dari pencemaran industri dan limbah domestik.

4. Pengendalian Polusi Udara dan Emisi Gas

- Meningkatkan pengawasan terhadap emisi kendaraan bermotor dan industri untuk menurunkan tingkat polusi udara.
- Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan di sektor industri, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak polusi udara.

5. Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan

- Melaksanakan program pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat, khususnya di tingkat sekolah dan komunitas.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti bersih-bersih sungai, penanaman pohon, atau pengurangan penggunaan bahan berbahaya.

6. Perbaikan Infrastruktur Transportasi Umum

- Meningkatkan kualitas transportasi umum untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang berkontribusi pada polusi udara.
- Mengembangkan jalur sepeda dan trotoar untuk mendukung mobilitas ramah lingkungan.

7. Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

- Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah oleh pihak industri atau individu.
- Meningkatkan transparansi dan pelaporan terkait kualitas lingkungan hidup di Sidoarjo.

Sasaran 7 : Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata**Tabel 3.52 Indikator Kinerja Sasaran 7**

No	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
18	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,766	0,822	107,31	0,777	105,79	Tercapai
19	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	88,64	95,6	107,85	92,71	103,12	Tercapai
20	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	72,32	84,82	117,28	72,59	116,85	Tercapai

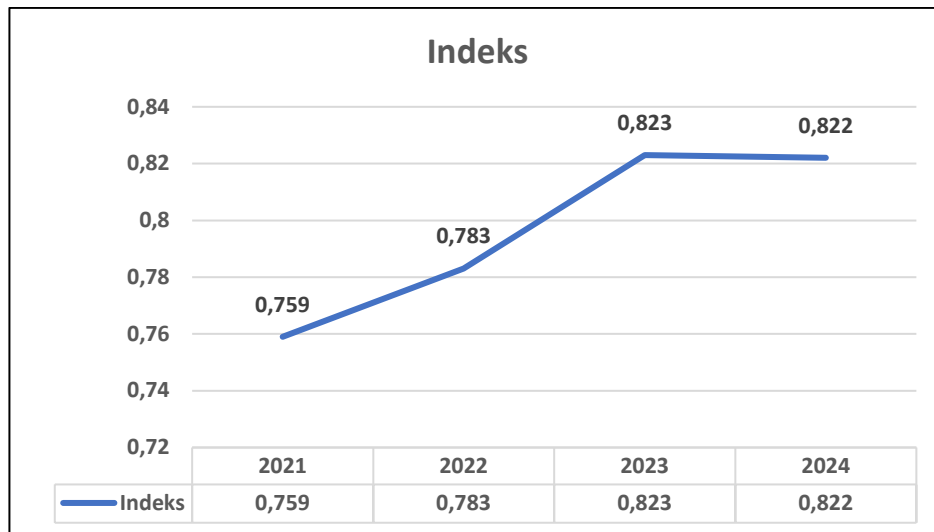
Sumber Data : Sidoarjo Dalam Angka 2025

Sasaran 7 :**Indikator Kinerja 18 : Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum****Tabel 3.53 Realisasi Infrastruktur Pekerjaan Umum**

No	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
18	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,766	0,822	107,31	0,777	105,79	Tercapai

Sumber Data : Sidoarjo Dalam Angka 2025

Capaian indeks infrastruktur pekerjaan umum tahun 2024 yaitu 0,822 yang apabila dibandingkan dengan target 0,766 maka sudah melampaui target. Apabila dilihat dalam perkembangan dari tahun ketahun, Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum di Kabupaten Sidoarjo cenderung meningkat lebih baik. Namun demikian pada tahun ini mengalami penurunan 0,001 poin dari capaian tahun 2023 sebesar 0,823. Berikut grafik perkembangan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dari Tahun 2021 - 2024 :



Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum di Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sebesar 0,822 mengalami penurunan 0,001 poin dari capaian tahun 2023. Ini disebabkan karena kondisi jalan di Kabupaten Sidoarjo masih banyak yang rusak diakibatkan terendam air hujan yang terus menerus dan dilewati oleh banyak kendaraan yang melebihi kelas jalan, sehingga cepat mengalami kerusakan padahal perawatan berkala terus dilakukan dan panjang jalan yang dibeton terus bertambah.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,777, maka capaian tahun ini sudah melebihi 0,045 poin dari target akhir RPJMD. Sedangkan untuk Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum di tingkat Nasional hingga laporan ini disusun, data tersebut belum didapatkan sehingga tidak bisa disampaikan dalam laporan ini.

Kinerja yang mendukung pencapaian Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, yaitu antara lain :

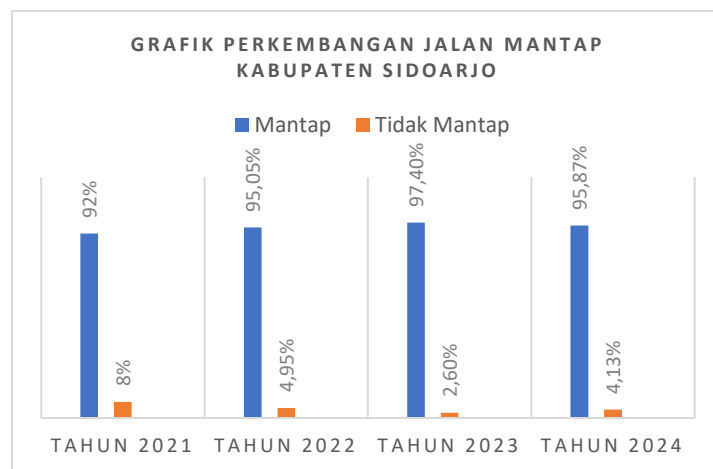
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Sampai dengan tahun 2024 telah terbangun ruas jalan Kabupaten sepanjang 1.028, 435 km dengan kondisi jalan sebagai berikut :

Tabel 3.54 Persentase Jalan Kabupaten

No.	Kondisi	Panjang Jalan (km)	%
1	Kondisi Mantap :		
	➤ Kondisi Baik	643.534	62,58
	➤ Kondisi Sedang	342.413	33,29
	Sub Jumlah	985.947	95,87
2	Kondisi Tidak Mantap		
	➤ Rusak Ringan	38.484	3,74
	➤ Rusak Berat	4.005	0,39
	Sub Jumlah	42.489	4,13
Total Panjang Jalan		1.028,435	100,00

Panjang jalan yang dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan kondisi rusak ringan/sedang, dimana capaian tahun 2024 adalah 95,87% dari target 95,5% sehingga sudah mencapai target dengan capaian 100,39%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 95,05% sudah terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan jalan, peningkatan jalan berupa konstruksi beton maupun aspal, dan pemeliharaan rutin jalan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan sehingga mampu menambah panjang jalan dalam kondisi mantap. Adapun tren capaian persentase jalan Kabupaten kondisi mantap dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut:



Sumber Data : Laporan Kondisi Jalan Kabupaten Sidoarjo 2024

Kondisi jalan dimaksud, apabila dijabarkan kondisi setiap Kecamatan, sebagaimana tabel berikut:

Kondisi jalan dimaksud, apabila dijabarkan kondisi setiap Kecamatan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.55 Kondisi Jalan Kabupaten Sidoarjo

No.	Kecamatan	Panjang Ruas (Km)	Panjang Tiap Kondisi			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
			Km	Km	km	Km
1	Jabon	74,063	47,926	22,809	2,278	1,050
2	Tanggulangin	71,727	44,572	23,019	2,860	1,275
3	Sidoarjo	62,882	38,505	24,294	0,083	0,000
4	Candi	68,807	39,638	25,691	3,478	0,000
5	Buduran	57,988	34,591	22,914	0,483	0,000
6	Gedangan	54,429	37,482	16,864	0,083	0,000
7	Porong	48,280	28,755	17,847	1,678	0,000
8	Tulangan	76,687	46,996	26,413	3,278	0,000
9	Krembung	53,115	21,342	25,900	4,673	1,200
10	Prambon	58,595	35,047	20,999	2,549	0,000
11	Tarik	55,528	34,008	17,800	3,720	0,000
12	Balongbendo	49,997	37,709	8,415	3,493	0,380
13	Krian	79,412	56,780	19,654	2,978	0,000
14	Taman	36,505	22,326	14,096	0,083	0,000
15	Wonoayu	51,778	32,249	17,601	1,928	0,000
16	Sukodono	53,252	34,456	18,313	0,483	0,000
17	Waru	40,483	27,404	10,601	2,478	0,000
18	Sedati	34,908	23,747	9,183	1,878	0,100
Total		1028,435	643,534	342,413	38,484	4,005
		100,00 %	62,57 %	33,29 %	3,74 %	0,39 %

Sumber : Laporan Kondisi Jalan Kabupaten Sidoarjo

Pada tahun 2024 dilakukan betonisasi jalan sepanjang 28.909,55 meter, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 3.56 Rekapitulasi Betonisasi Jalan Kabupaten Sidoarjo

No.	Nama Paket Pekerjaan	Kecamatan	Realisasi	
			Panjang (m)	Lebar (m)
1	Peningkatan Jalan Bakungpringgondani – Penambangan (DAK)	Balongbendo	2.523,10	4,00 - 5,00
2	Peningkatan Jalan Banjarsari, Tanggulangin	Tanggulangin	1.017,60	5,00
3	Peningkatan Jalan Banjarsari - Dukuhtengah (LJT)	Buduran	1.886,00	3,04 - 6,5
4	Peningkatan Jalan Barengkrajan - Ngelom (DAK)	Krian	2.450,00	5,00
5	Peningkatan Jalan Bringinbendo – Sidodadi	Taman	856,00	3,70 - 4,00
6	Peningkatan Jalan Candinegoro – Terungkulon	Wonoayu	1.961,75	5,00
7	Peningkatan Jalan Desa Bakungpringgodani	Balongbendo	893,70	4,00
8	Peningkatan Jalan Dukuhsari – Semambung	Jabon	1.731,00	STA 0+000-0+350 = 4,50 STA 0+350-1+700 = 5,00
9	Peningkatan Jalan dusun delik desa seduri s/d dusun girang desa wonokupang	Balongbendo	1.994,70	3,70 - 4,00
			784,53	4,00
10	Peningkatan Jalan Kludan – Tulangan	Tulangan	1.280,70	8,00
11	Peningkatan Jalan Masanganwetan - Sukodono (DAK)	Sukodono	2.620,00	6,00
12	Peningkatan Jalan Modong - Grabagan (DAK)	Tulangan	3.521,50	3,10 - 4,00
13	Peningkatan Jalan Pabean - Semampir (Jalan. KH. Husein)	Sedati	537,87	3,70 - 5,00
14	Peningkatan Jalan Pilang – Sawocangkring	Wonoayu	1.339,40	5,00
15	Peningkatan Jalan Tebel – Gemurung	Gedangan	937,00	4,00

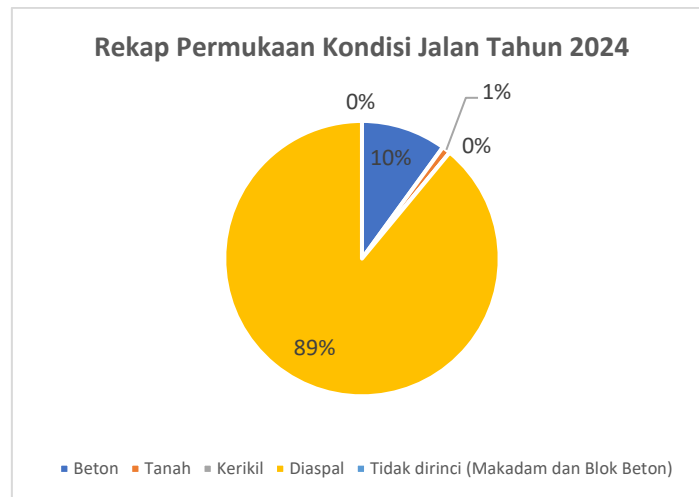
16	Peningkatan Jalan Wage (Jalan Jeruk dan Jalan Mangga)	Taman	Panjang = 83,7m (Mangga S1), 392,2 (Mangga S2), 378,8 (Jeruk)	4,00
		Gedangan		
17	Peningkatan Jalan Wonoplintahan - Jedongcangkring (LJT)	Prambon	1.720,00	6,00
TOTAL JALAN BETON 2024			28.909,55	3,04 - 8,00

Sumber : Laporan Betonisasi Jalan Kabupaten Sidoarjo

Adapun upaya yang telah dilakukan agar jalan dan jembatan Kabupaten terjaga dalam kondisi mantap, antara lain :

1. Dilaksanakan Pembangunan Jalan pada beberapa ruas
2. Dilaksanakan rekonstruksi jalan dengan menggunakan konstruksi beton maupun aspal pada beberapa ruas yang perlu segera dilaksanakan peningkatan
3. Dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan secara berkala

Berdasarkan data diatas analisa penyebab keberhasilan menjadi meningkat dikarenakan beberapa ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo telah banyak yang dibetonisasi, sehingga mampu meminimalisir kerusakan jalan dan mempertahankan kondisi jalan tetap baik. Berikut rekap permukaan kondisi jalan yang ada di kabupaten Sidoarjo :



Sumber Data : Laporan Permukaan Jalan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

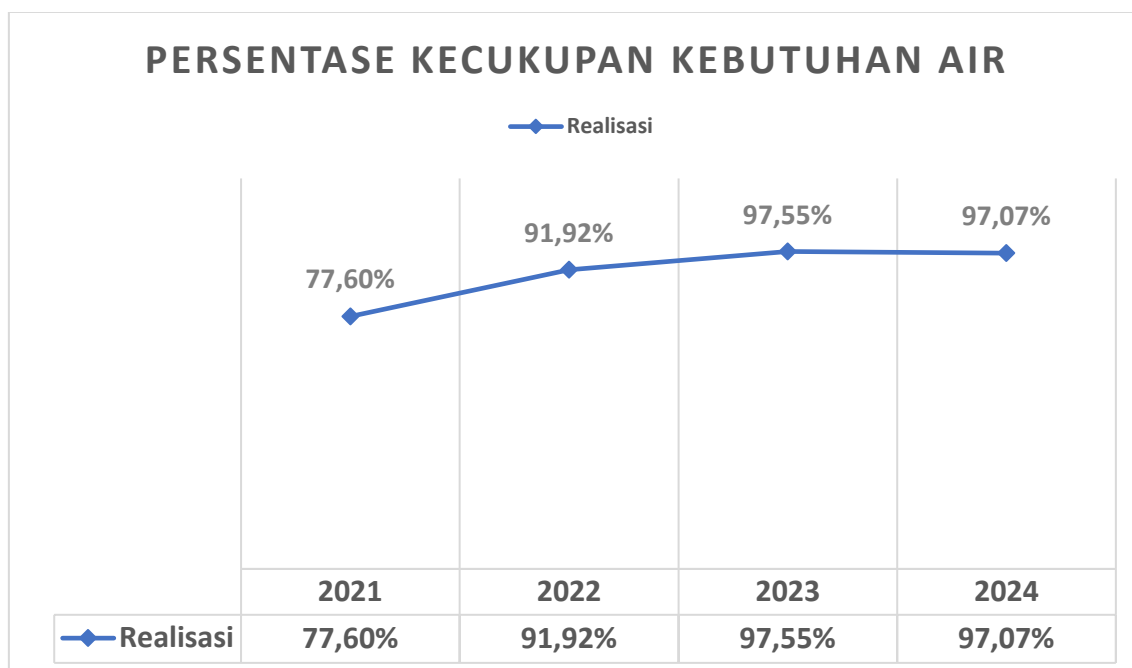
Persentase Kecukupan Kebutuhan Air Irigasi

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Sampai dengan Tahun 2024 baku sawah yang tercukupi kebutuhan air irigasi yaitu 3.840 hektar dari kebutuhan yang seharusnya 3.956 hektar sehingga capaian persentase kecukupan kebutuhan air irigasi tahun 2024 adalah 97,07% dari target 92,5% sehingga sudah mencapai target dengan persentase sebesar 104,94%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra Tahun 2026 dengan target 93,5% maka pada Tahun 2024 sudah tercapai nilai 97,07%, dengan persentase capaian sebesar 103,82%.

Adapun rumus untuk menghitung realisasi kecukupan kebutuhan air irigasi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\text{Luas sawah yang dapat diairi} = \frac{3.840}{3.956} \times 100\% = 97,07\%$$

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan air irigasi dapat diilustrasikan sebagaimana grafik :



Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /Prt/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yang menyebutkan bahwa DI (Daerah Irigasi) berada dalam satu Kab/Kota (DI kecil) dibawah 1000 Ha adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga pada saat ini Kabupaten Sidoarjo hanya mengelola 18 DI. Berikut Data Ketersediaan Air yang ada di kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 berdasarkan Daerah Irigasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.57 Data Ketersediaan Air Tahun 2023

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Baku Sawah yang Ada (Ha)	Luas Baku Sawah yang Diairi (Ha)	Kebutuhan Air (Ltr/Dtk)	Ketersediaan Air (Ltr/Dtk)	Pengambilan Air
1	D.I. Kedunguling Kiri	325	308	278	1.200	Afvoer Kedunguling
2	D.I. Kedunguling Kanan	674	663	740	1.200	Afvoer Kedunguling
3	D.I. Bader	376	360	290	440	Afvoer Bader
4	D.I. Bulubendo	91	80	93	200	Afvoer Bulubendo

5	D.I. Buntung	80	28	33	150	Afvoer Buntung
---	--------------	----	----	----	-----	-------------------

6	D.I. Kalidawir	440	440	255	550	Afvoer Kedungan
7	D.I. Gedek	140	140	122	275	Afvoer Kedungan
8	D.I. Kedungpandan	233	233	173	700	Kali Bangil Tak
9	D.I. Wilayut II	196	183	206	350	Afvoer Wilayut
10	D.I. Kali Pucang	191	179	165	275	Afvoer Pucang
11	D.I. Bahgepuk	341	341	319	400	Afvoer Bahgepuk
12	D.I. Kragan	45	35	46	120	Afvoer Kragan
13	D.I. Jomblong	41	51	67	125	Afvoer Jomblong
14	D.I. Karangbong I	86	98	129	200	Afvoer Karangbong
15	D.I. Karangbong II	114	114	151	200	Afvoer Karangbong
16	D.I. Wilayut I	29	33	43	75	Afvoer Wilayut
17	D.I. Jatianom	397	397	267	275	Afvoer Jatianom
18	D.I. Kedungan	157	157	179	325	Afvoer Kedungan
JUMLAH		3.956	3.840	3.556	7.060	

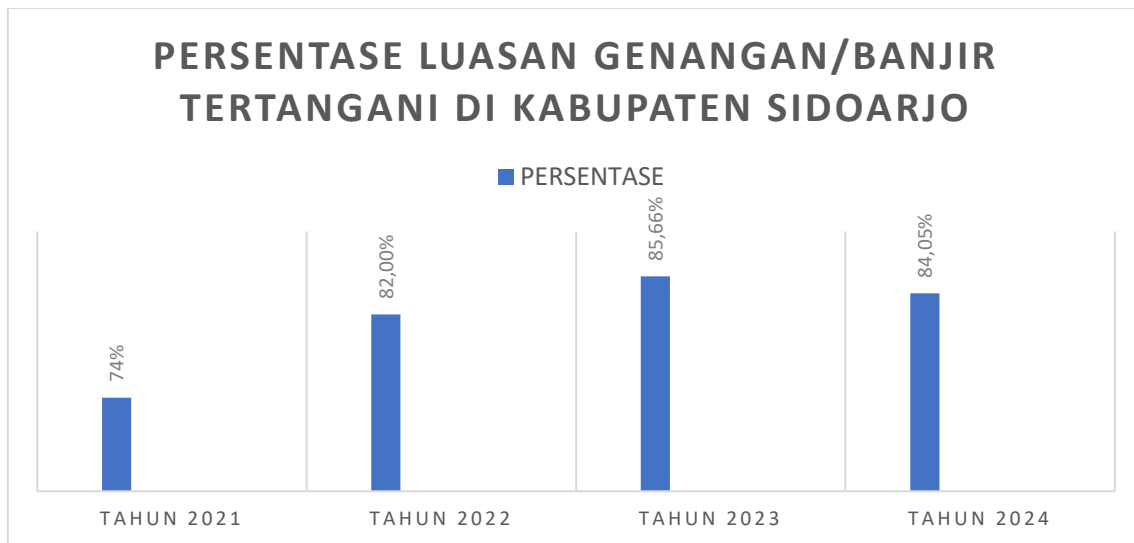
Adapun upaya yang telah dilakukan agar kebutuhan air irigasi dapat tercukupi optimal, antara lain :

1. Pemberian air yang dilakukan secara terus menerus maupun dengan pola giliran sesuai ketersediaan debit yang ada.
2. Pemenuhan air irigasi dari dam/ bendung suplesi yang berada di afvoer maupun bantuan pompa air, sehingga kebutuhan air dapat dicukupi
3. Pengaturan operasional DAM penerus sesuai dengan kebutuhan pola tata tanam

Persentase Luasan Genangan/Banjir Tertangani

Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah delta memiliki resiko yang tinggi terkena genangan / banjir. Persentase luasan genangan / banjir tertangani pada tahun 2024 adalah 84,05% dari target 83,5% atau tercapai dengan capaian 100,66%.

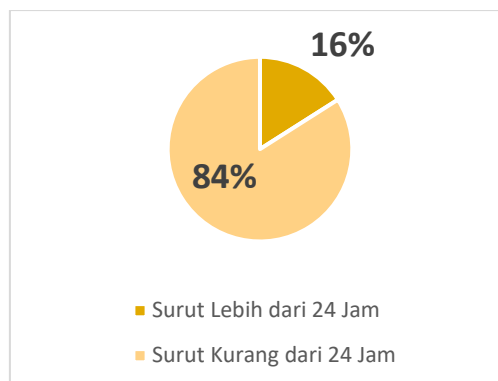
Adapun tren capaian persentase luasan genangan/anjir tertangani diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Adapun rumus untuk menghitung realisasi luasan genangan / banjir tertangani pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas area genangan tertangani}}{\text{Luas area genangan tertangani}} \times 100\% = \frac{480 \text{ Ha}}{558 \text{ Ha}} \times 100\% = 84,05\%$$

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menangani genangan/banjir, yaitu antara lain Melakukan pengendalian banjir, pembangunan rumah pompa, pembangunan/rehabilitasi plengsengan dan normalisasi/pengerukan sedimen di saluran/sungai. Sedangkan grafik kondisi genangan tertangani tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber Data : Laporan Genangan Air Tertangani Tahun 2024

Kawasan permukiman yang rawan banjir di Kabupaten Sidoarjo, antara lain :

Tabel 3.58 Kawasan Pemukiman Rawan Banjir

No	Uraian	Kecamatan	Luas Kawasan Rawan Genangan (Ha)	Luas Kawasan Rawan Genangan (Ha)		Luas Catchment Area Pompa (Ha)
				Surut Kurang dari 24 Jam	Surut Lebih dari 24 Jam	
1	Bringinbendo / Sidodadi	Taman	75	65	10	180
2	Pucanganom	Sidoarjo	30	30	0	38
3	Lemahputro		32	32	0	32
4	Rangkahkidul		40	35	5	25
5	Sidokare		38	38	0	86
6	Bluru Kidul		14	13	1	15
7	Kemiri		7	6	1	7
8	Tambakrejo / Tropodo	Waru	98	57	41	92
9	Tambak Sawah		70	53	17	122
10	Banjarasri	Tanggulangin	30	30	0	121
11	Banjarpanji		10	10	0	38
12	Kalitengah		7	6	1	11
13	Kedungbanteng		17	17	0	52
14	Porong	Porong	30	30	0	0
15	Pesawahan		28	25	3	0
16	Candipari		18	12	6	0
17	Wunut		10	8	2	0
18	Balongdowo	Candi	4	2	2	15
Jumlah			558	469	89	834

Sumber Data : Laporan Genangan Air Tertangani Tahun 2024

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa ada beberapa wilayah rawan genangan yang belum bisa tertangani kurang dari 24 jam diantaranya sebagian besar merupakan wilayah yang ada pada Kecamatan Waru. Sehingga diharapkan pada tahun mendatang (n+1) dapat teranggarkan alokasi dana penanganan genangan sesuai kebutuhan dalam menangani permasalahan yang ada

Persentase Pelayanan Air Minum Aman

Persentase pelayanan air minum aman Tahun 2024 dengan realisasi 45,02% dari target 46,86%, dengan persentase capaian sebesar 96,07%. Pada Tahun 2024 dari target sebanyak 8.088 SR dapat tercapai

100%. Sehingga untuk akumulasi capaian air minum perkotaan dan perkotaan adalah sebanyak 202.555 SR dari target 213.618 SR atau

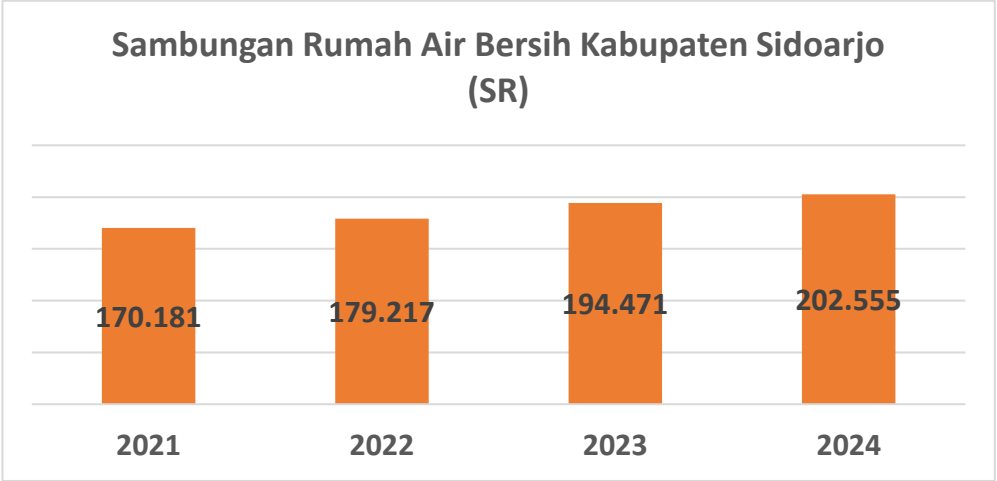
sebesar 45,02%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 47,48% maka pada tahun 2024 sudah tercapai nilai 94,82%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yaitu 194.471 dengan persentase kenaikan sebesar 4,16% maka terdapat peningkatan yang cukup tinggi. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.59 Persentase Pelayanan Air Minum Aman 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Target SR	907	754	697	317
PEMDA	8.805	10.062	10.759	11.076
PDAM	161.376	169.155	183.712	191.479
SR pengguna air bersih (TOTAL)	170.181	179.217	194.471	202.555

Sumber : Persentase Pelayanan Air Minum Aman Tahun 2021-2024

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan air bersih dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : Laporan Sambungan Rumah Air Bersih Tahun 2021-2024

Jika dijabarkan masing-masing realisasi pelayanan air bersih, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.60 Realisasi Pelayanan Air Bersih

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target SR	200	760	430	676	907	754	4706
PEMDA	3.001	4.624	6.671	7.898	8.805	10.062	14.768
PDAM	134.897	137.094	138.128	151.493	161.376	169.155	179.703
SR pengguna air bersih (TOTAL)	137.898	141.718	144.799	159.391	170.181	179.217	194.471

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan akses air bersih, yaitu selain pembangunan akses air bersih, telah dilakukan pendekatan ke masyarakat setempat untuk memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya air bersih bagi keberlangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang berkenan untuk dilakukan pemasangan sambungan rumah air bersih.

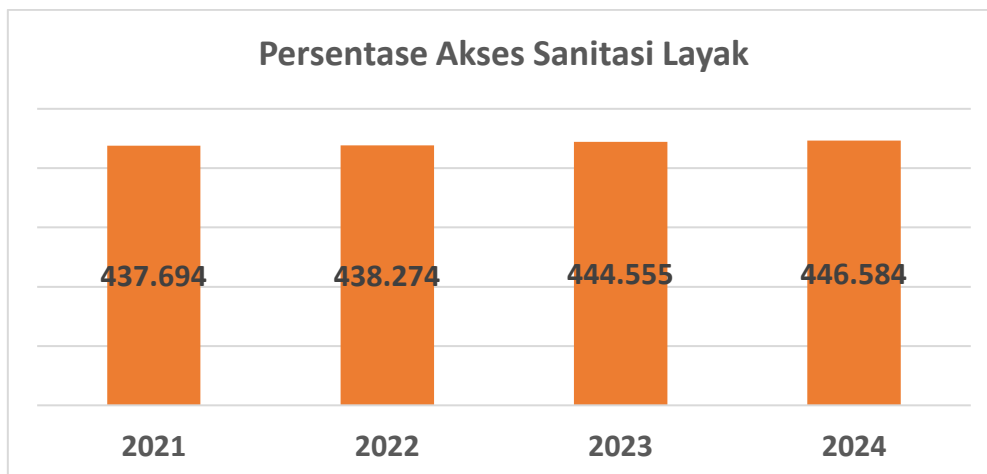
Persentase Akses Sanitasi Layak

Sampai dengan Tahun 2024 target pembangunan sanitasi sebanyak 2010 rumah tangga dan tercapai sebanyak 2029 rumah tangga atau 100%. Sehingga akumulasi capaian sanitasi hingga saat ini sebanyak 446.584 rumah tangga dari target 449.896 rumah tangga, atau tercapai sebesar 99,26%.

Adapun tren capaian persentase kecukupan kebutuhan sanitasi layak dapat diilustrasikan sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Tabel 3.61 Persentase Kecukupan Kebutuhan sanitasi Layak

Uraian	2021	2022	2023	2024
Target RT	8.033	557	6.308	2.029
RT bersanitasi sehat	437.694	438.247	444.555	446.584



Sumber Data : Laporan Persentase Akses Sanitasi Layak Tahun 2021-2024

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan akses sanitasi layak, yaitu selain pembangunan unit jamban untuk peningkatan akses sanitasi layak, telah dilakukan pendekatan ke masyarakat setempat untuk memberi edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi yang layak untuk unit jamban dan juga pengolahan limbah bagi keberlangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya untuk pelaksanaan pembangunan sanitasi layak akan selalu dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan Bappeda serta Dinas Kesehatan yang juga sebagai PD pengampu kegiatan terkait anggaran pelaksanaan kegiatan agar menjadi prioritas. Selain itu dapat pula dilakukan kerjasama atau corporate social responsibility (CSR) dengan perusahaan dalam bidang yang sesuai.

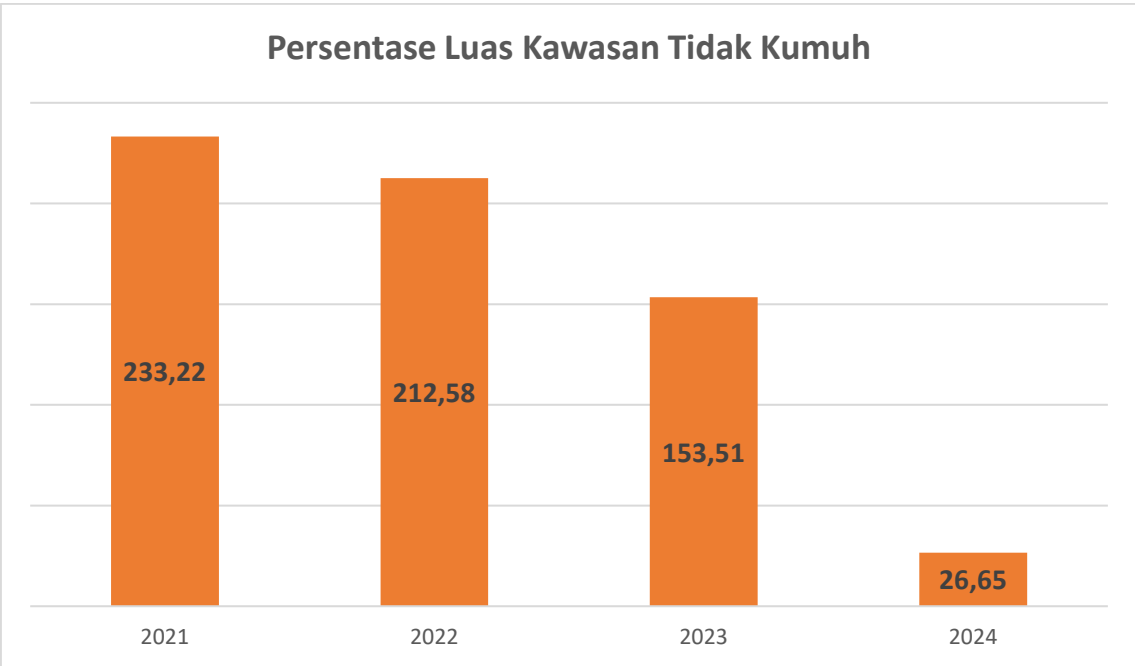
Persentase Luas Kawasan Tidak Kumuh

Sebagaimana SK Bupati Sidoarjo Nomor 311 Tahun 2021 bahwa luasan kawasan kumuh sesuai arahan PERMEN PUPR Nomor 14 Tahun 2018 seluas 276,62 Ha dari luas keseluruhan Kabupaten Sidoarjo 71.424,3 Hektar. Sampai dengan tahun 2024 kawasan kumuh telah terselesaikan seluas 126,86 Hektar, dengan sisa luas tidak kumuh

71.397,65 Hektar. Adapun tren capaian penanganan kawasan kumuh dapat diilustrasikan sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Tabel 3.62 Tren Capaian Penanganan Kawasan Kumuh

Tahun	Target	Realisasi	Luas Kumuh (Ha)
2021	97,4	97,41	233,22
2022	99,72	99,7	212,58
2023	99,79	99,79	153,51
2024	99,86	99,96	26,65



Sumber Data : Laporan Persentase Kawasan Tidak Kumuh Tahun 2021-2024

Indeks Infrastruktur Perhubungan

Indikator ini menggambarkan tentang kawasan yang tertib dalam berlalu lintas dengan mengutamakan keselamatan dan terminal sebagai tempat parkir untuk angkutan umum dalam mengangkut dan menurunkan penumpang. kecukupan sarpras perkeretaapian sebagai wujud keselamatan dalam berlalu lintas.

Komposit dari indikator infrastruktur perhubungan, antara lain :

- Jumlah titik lokasi tertib lalu lintas yang terjaga
- Jumlah terminal angkutan penumpang tipe C terkelola dengan baik
- Jumlah kecukupan sarana dan prasarana perkeretaapian yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Sidoarjo
-

Capaian dari masing-masing komposit indikator dimaksud, sebagai berikut :

Tabel 3.63 Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024
1	Persentase alat penerangan jalan yang layak fungsi	75%	100%
2	Tingkat konektivitas jaringan jalan	3,64	3,64
3	Rasio peningkatan fasilitas pelengkap jalan	0,90	0,86
4	Cakupan pelayanan angkutan umum	92,5%	100%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Upaya untuk peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan, antara lain :

- Menambah kawasan tertib lalu lintas yang terjaga
- pengelolaan terminal tipe C yang sesuai dengan standart
- Pemeliharaan terhadap pintu perlintasan kereta api
- Ketersediaan prasarana dan sarana serta system regulasi yg efektif, sehingga konektifitas lebih efisien;
- Memperbaiki layanan yang ada di terminal dan monitoring terhadap layanan angkutan umum;
- Pembangunan PJU 848 titik sudah terbangun di seluruh wilayah kabupaten sidoarjo serta tidak ada kendala dalam mencapai realisasi

Dari perbandingan tersebut menunjukkan bahwa realisasi dari Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum yaitu 0,822 melampaui target akhir RPJMD yaitu 0,777.

Sasaran 7

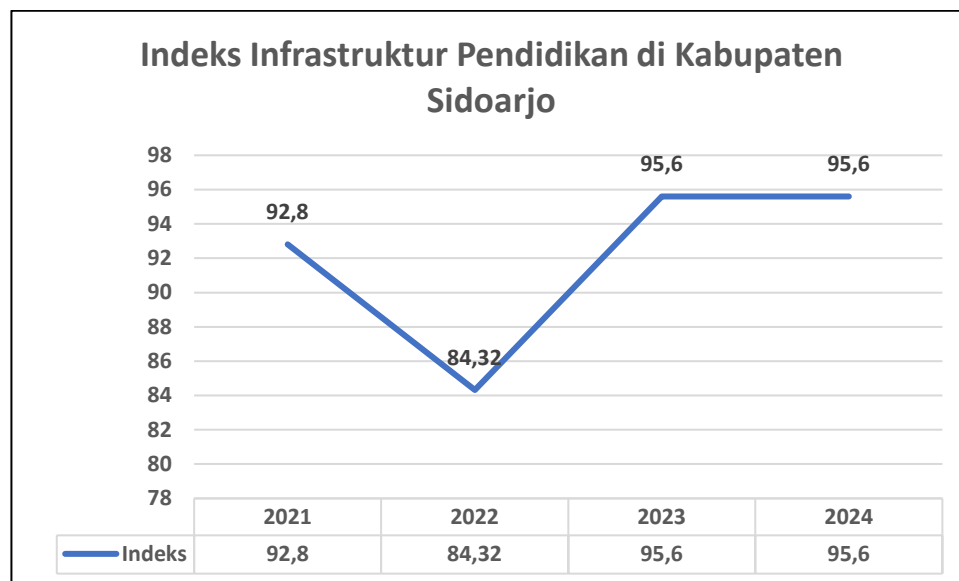
Indikator Kinerja 19 : Indeks Infrastruktur Pendidikan

Tabel 3.64 Indeks Infrastruktur Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
19	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	88,64	95,6	107,85	92,71	103,12	Sangat Baik

Sumber Data : Sidoarjo Dalam Angka 2024

Pada tahun 2024 Indeks Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 95,60 dengan target 88,64 sehingga sudah mencapai target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :



Perkembangan Indeks Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2021 – 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 telah mengalami penurunan diangka 84,32 setelah di tahun 2021 berada pada angka 92,8. Hal ini disebabkan karena kondisi tingkat kerusakan pada sarana dan sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Sidoarjo serta kondisi anggaran yang tersedia.

Dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 92,71, Indeks Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD. Untuk tingkat Nasional, data capaian Indeks tersebut belum didapatkan sehingga tidak bisa disampaikan pada laporan ini.

Untuk menjaga dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, antara lain :

- Selalu meng-update data infra struktur pendidikan yang ada dan yang dibutuhkan;
- Melakukan perawatan secara berkala pada infra struktur pendidikan yang ada;
- Segera melakukan perbaikan ketika ditemukan ada kerusakan;
- Membangun infrastruktur sesuai kebutuhan pendidikan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kondisi infrastruktur yang ada.

Adapun kinerja yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Infrastruktur Pendidikan, yaitu :

Persentase Bangunan Ruang Kelas Belajar dalam kondisi baik

Kondisi bangunan Ruang Kelas Belajar baik pada jenjang SDN maupun jenjang SMPN, adalah sebagai berikut :

SD Negeri

Tabel 3.65 Persentase Bangunan Ruang Kelas SD

Persentase Bangbunan Ruang	Target 2023	Realisasi 2023
Kelas SD Kategori Baik	95,45%	95,59%

SMP Negeri

Tabel 3.66 Persentase Bangunan Ruang Kelas SMP

Persentase Bangunan Ruang	Target 2023	Realisasi 2023
Kelas SMP Kategori Baik	95,65%	95,67%

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan infrastruktur pendidikan guna mendukung kualitas pembelajaran. Namun, terdapat ketimpangan akses dan kualitas infrastruktur pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pada tahun 2023, sekitar 82,2% siswa di perkotaan memiliki akses internet, sementara di pedesaan hanya 70,56%, menunjukkan adanya kesenjangan digital yang perlu diatasi.

Perbandingan Indeks Infrastruktur Pendidikan antara tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya beberapa **kemajuan signifikan**, terutama terkait dengan peningkatan **anggaran** pendidikan yang **mencapai Rp660,8 triliun pada 2024**. Kenaikan anggaran ini memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Selain itu, terdapat perbaikan pada berbagai indikator infrastruktur lainnya, seperti jembatan dan jalan, yang mendukung aksesibilitas pendidikan di wilayah terpencil.

Perbandingan antara realisasi dan target menunjukkan bahwa realisasi dari Indeks Infrastruktur Pendidikan telah melampaui target akhir RPJMD. Dengan realisasi ada pada nilai 95,6 dan target akhir ada pada nilai 92,71.

Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan dalam Indeks Infrastruktur Pendidikan, terutama dalam hal anggaran dan kualitas sarana pendidikan, tantangan untuk mencapai pemerataan dan

pengurangan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pemerintah perlu terus berfokus pada distribusi sumber daya yang lebih merata, serta meningkatkan kualitas pendidikan berbasis teknologi di daerah-daerah yang masih tertinggal, agar semua lapisan masyarakat bisa menikmati pendidikan berkualitas.

Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan peningkatan Indeks Infrastruktur Pendidikan di Indonesia didorong oleh kebijakan yang proaktif, investasi di sektor digital, pemerataan pembangunan, kolaborasi antara berbagai pihak, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui berbagai upaya ini, diharapkan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat diminimalisir, sehingga akses dan kualitas pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan agar bangunan ruang kelas belajar kondisi baik meningkat dan layak fungsi untuk dimanfaatkan proses belajar mengajar, baik untuk jenjang SDN dan SMPN, yaitu :

- Melakukan pendataan terhadap kondisi kerusakan bangunan sekolah/ruang kelas pada sekolah SDN dan SMPN;
- Mengusulkan, mengalokasikan serta menganggarkan dan melaksanakan rehabilitasi terhadap sekolah SDN maupun SMPN dengan kondisi kerusakan Rusak Berat.
- Adapun kerusakan ringan dapat dialokasikan dan di biyai melalui Dana BOS dengan catatan jika kebutuhan operasional sekolah sudah tercukupi.
- Untuk satuan pendidikan SD / Mi swasta dan SMP / MTs swasta telah di fasilitasi oleh mekanisme dana hibah.

Sasaran 7

Indikator Kinerja 20 : Indeks Infrastruktur Kesehatan

Tabel 3.67 Indeks Infrastruktur Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
20	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	72,32	84,82	117,28	72,59	116,85	Sangat Baik

Sumber Data : Sidoarjo Dalam Angka 2024

Pada tahun 2024 Indeks Infrastruktur Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo sebesar 84,82 dengan target 72,32 sehingga sudah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam Indeks Infrastruktur Kesehatan, yang tercermin dari peningkatan anggaran sektor kesehatan yang mencapai **Rp 303,4 triliun**, naik dari **Rp 291,7 triliun** pada tahun 2023. Peningkatan anggaran ini difokuskan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit dan puskesmas baru, serta **peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan** yang sudah ada. Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan jumlah tenaga medis dan peralatan medis yang lebih modern di fasilitas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan di seluruh Indonesia.

Adapun kinerja yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Infrastruktur Kesehatan, yaitu :

1. **Persentase Bangunan Fasilitas Kesehatan dalam kondisi baik**

Kondisi bangunan RSUD, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

RSUD Kabupaten Sidoarjo memiliki 2 Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan tahun 2024

Tabel 3.68 Persentase Kondisi Bangunan RSUD

Kondisi Baik / Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
-----------------------------	----------------------	---------------------

2 bangunan	0 bangunan	0 bangunan
100 %	-	-

Apabila diproporsi maka RSUD dalam kondisi baik 100% kondisi bangunan RS Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi baik.

Pada Tahun 2024 RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo melakukan pembangunan Gedung Pusat Terpadu II dan Pembangunan Gedung Diagnostik Terpadu (GDT), yang diresmikan oleh Plt Bupati Sidoarjo yaitu Subandi, S.H., M.Kn. Gedung baru ini akan difungsikan sebagai pusat laboratorium, termasuk patologi dan layanan *medical check-up*. Selain itu, Gedung ini akan memperluas layanan farmasi dan menjadi bagian dari pengembangan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Dengan adanya fasilitas baru ini, diharapkan pelayanan kesehatan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo dapat meningkat terutama dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat Sidoarjo secara optimal. Penambahan fasilitas penting untuk RSUD Sidoarjo yang sudah menyandang status tipe-A atau rumah sakit rujukan utama. Sidoarjo adalah satu-satunya Kabupaten di Indonesia yang memiliki RSUD Tipe A. Semua penambahan fasilitas tentunya tujuannya agar masyarakat bisa merasakan pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan lebih prima.



Puskesmas Kabupaten Sidoarjo memiliki 31 puskesmas sampai dengan tahun 2024

Tabel 3.69 Persentase Kondisi Bangunan Puskesmas

Kondisi Baik / Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
30 bangunan	1 bangunan	0 bangunan
96,77%	3,23%	-

Dari indeks infrastruktur kesehatan terdapat perbandingan antara realisasi dengan target akhir RPJMD yaitu:

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Infrastruktur Kesehatan	73,32	72,59	116,85

Realisasi dari Indeks Infrastruktur Kesehatan menunjukkan bahwa telah melampaui target akhir RPJMD. Realisasi dengan nilai 73,32 dan target akhir ada pada nilai 72,59.

Keberhasilan peningkatan Indeks Infrastruktur Kesehatan di Indonesia antara tahun 2023 dan 2024 dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama yang saling mendukung. Pertama, **peningkatan anggaran sektor kesehatan** yang signifikan menjadi salah satu pendorong utama. Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk kesehatan meningkat menjadi **Rp 303,4 triliun**, yang memungkinkan pemerintah untuk membangun dan memperbaiki berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik-klinik kesehatan. Ini telah berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan medis di berbagai daerah, termasuk di wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian

Upaya yang telah dilakukan agar bangunan fasilitas Kesehatan dalam kondisi baik meningkat dan layak fungsi untuk dimanfaatkan

pelayanan kesehatan, yaitu dengan Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin puskesmas, baik bersifat ringan, sedang maupun berat. Keberhasilan lainnya terletak pada **penggunaan teknologi** yang semakin berkembang dalam dunia kesehatan. Di tahun 2024, **telemedicine** dan **layanan kesehatan jarak jauh** mulai diperkenalkan di banyak daerah, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan konsultasi medis tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Ini sangat membantu, terutama di daerah dengan keterbatasan tenaga medis dan fasilitas. Pemerintah juga meningkatkan **kualitas pelayanan kesehatan digital**, seperti melalui aplikasi kesehatan yang memudahkan masyarakat untuk mencari informasi kesehatan dan berkonsultasi dengan dokter.

Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana

Tabel 3.70 Persentase Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana

No	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
21	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,55	49,71	96,43	51,55	96,43	Melampaui Target Akhir RPJMD
22	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,17	71,91	84,43	85,17	84,43	Sangat Baik
23	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,13	25,28	93,18	27,13	93,18	Sangat Baik
24	Indeks Resiko Bencana	Indeks	86,98	96,7	86,83	86,98	111,17	Sangat Baik

Sasaran 8

Indikator Kinerja 21 : Indeks Kualitas Air

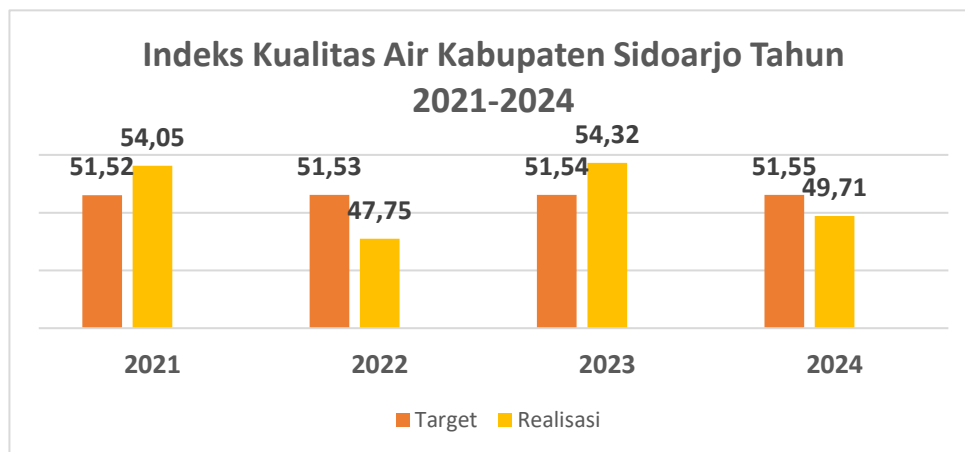
Tabel 3.71 Indeks Kualitas Air

No	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
21	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,55	49,71	96,43	51,55	96,43	Melampaui Target Akhir RPJMD

Sumber Data : DLHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2024 yaitu 49,71. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni 51,55 belum mencapai target dengan persentase capaian yakni 96%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 54,32 maka tahun 2024 mengalami penurunan dalam kualitas air. Nilai IKA tidak dapat diprediksi terkait peningkatan maupun penurunan nilai. Hal ini dikarenakan Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama pencemar tinggi dari sumber tidak tentu yakni aktivitas domestik masyarakat) sehingga kualitas air badan air tidak dapat diprediksi dan tiap tahunnya menunjukkan nilai Indeks Kualitas Air yang fluktuatif.

Permasalahan yang menjadi kendala peningkatan kualitas air yaitu adanya kemudahan berusaha melalui sistem OSS RBA sehingga terjadi peningkatan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sidoarjo namun tidak dilengkapi dengan Pengelolaan Lingkungan yang baik (termasuk penyediaan sistem pengolahan air limbah yang memadai). Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Air dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :



Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

Penjelasan kualitatif per kategori indeks dapat dijelaskan untuk nilai indeks mulai tahun 2021 saja sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, karena penjelasan kualitatif indeks dibawah Tahun 2020 hanya pada nilai akhir Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai Pedoman IKLH Tahun 2013. Adapun nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2024 dimaksud (49,71) masuk dalam **kategori sedang** (yakni dalam rentang $50 \leq x < 75$) dan mengalami peningkatan kategori dari tahun sebelumnya.

Komposit perhitungan kinerja kualitas air, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.72 Perhitungan Kinerja Kualitas Air

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk Parameter BOD	6,4 mg/L	11,357 mg/L	8.507 mg/L

Adapun perbandingan antara realisasi dan target akhir RPJMD dari indeks kualitas air yaitu:

Tabel 3.73 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Kualitas Air	49,71	51,55	96,43

Data diatas menunjukkan bahwa target akhir RPJMD ada pada nilai **51,55** sedangkan realisasi dari Indeks Kualitas Air ada pada nilai **49,71**.

Salah satu **upaya perbaikan** yang sedang dijalankan adalah penguatan pengawasan dan pengelolaan sumber daya air di tingkat daerah. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan kualitas air, termasuk identifikasi sumber pencemaran yang lebih spesifik. Langkah ini diharapkan dapat memastikan setiap daerah dapat memperbaiki kualitas air sesuai dengan kondisi dan tantangan lokal yang ada, sehingga kesenjangan antar wilayah dapat semakin teratasi. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas air di Indonesia. Edukasi dan kesadaran tentang pentingnya menjaga kualitas air perlu diperkuat, terutama di kawasan yang memiliki tingkat pencemaran tinggi.

Sasaran 8

Indikator Kinerja 22 : Indeks Kualitas Udara

Tabel 3.74 Realisasi Indeks Kualitas Udara

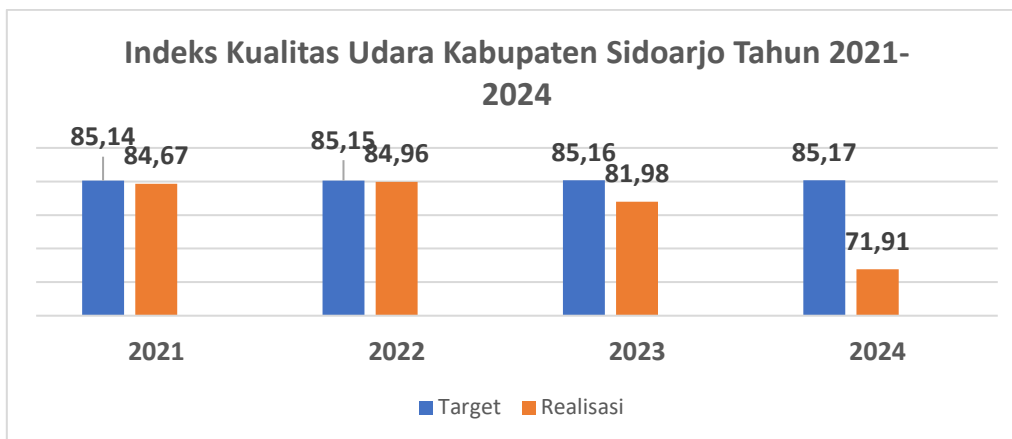
No	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
22	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,17	71,91	84,43	85,17	84,43	Sangat Baik

Sumber Data : DLHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Udara tidak mencapai target Tahun 2024 dan mengalami penurunan dibanding Tahun 2023. Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 sebesar **71,91** dari target 85,17. Apabila dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 yaitu 81,98 maka terdapat penurunan kualitas sebanyak 10,07 poin.

Sebenarnya untuk pemenuhan baku mutu konsentrasi SO₂ dan CO₂ sudah memenuhi kriteria, namun secara perhitungan akumulasi belum memenuhi target. Hal ini memang disebabkan semakin banyaknya polusi akibat residu transportasi (knalpot). Bahwa pada tahun 2024 alat pengukur indikator kualitas udara dipasang di tempat – tempat yang memang padat lalu lintas, sehingga apabila kendaraan yang berada pada tempat tersebut semakin padat, maka volume polusi juga akan semakin besar.

Selain itu, rata-rata nilai parameter NO₂ di Kawasan Transportasi, Kawasan Industri, dan Kawasan Permukiman mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Udara dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :



Sumber Data : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024

Meskipun demikian nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 diatas (sebesar 71,91) masuk dalam **kategori baik** (yakni dalam rentang $70 \leq x < 90$). Komposit perhitungan kinerja kualitas udara, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.75 Komposit Perhitungan Kinerja Kualitas Udara

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter SO ₂	7,82 µg/m ³	15,52 µg/m ³	50%
2	Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman, Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter NO ₂	13,66 µg/m ³	17,41 µg/m ³	78%

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), **Indeks Kualitas Udara (IKU) Nasional** mencapai nilai 88,67 pada tahun 2023, meningkat dari 84,74 pada tahun 2018. Peningkatan ini menunjukkan upaya efektif dalam pengendalian polusi udara di **tingkat nasional**.

Upaya yang dilakukan dalam **pencapaian, peningkatan kualitas udara**, salah satunya adalah memperketat pengawasan emisi kendaraan

bermotor, yang merupakan salah satu kontributor utama pencemaran udara di perkotaan. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan penggunaan kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan lainnya

Sasaran 8

Indikator Kinerja 23 : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tabel 3.76 Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan

No	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
23	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,13	25,28	93,18	27,13	93,18	Sangat Baik

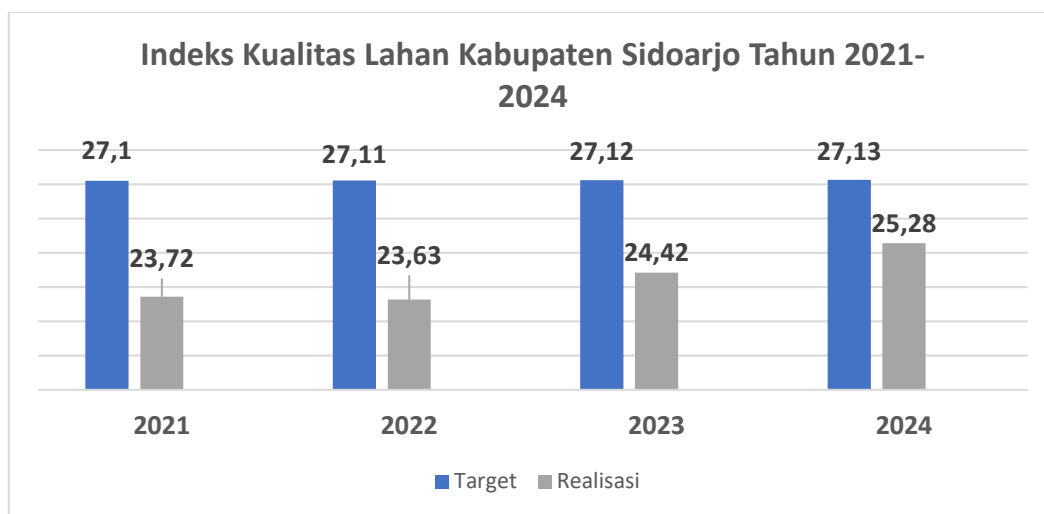
Sumber Data : DLHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Capaian realisasi kinerja Indeks Kualitas Lahan Tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Realisasi Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 sebesar 25,28 dari target 27,13. Apabila dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara Tahun 2023 yaitu 24,42 maka terdapat kenaikan kualitas sebanyak 0,86 poin atau sekitar 3,52%.

Proses verifikasi tutupan lahan dilakukan secara bertahap oleh DLH Provinsi Jawa Timur dan dilanjutkan oleh KLHK dimana hasil verifikasi agar dilakukan pengurangan luas hutan mangrove di daerah pesisir yang dideliniasi karena telah dihitung menjadi luas hutan yang diplotting oleh KLHK serta dilakukan perhitungan ulang. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya luas tutupan lahan yang diperoleh oleh Kabupaten Sidoarjo.

Permasalahan ketidak tercapaian masih sama dengan tahun – tahun sebelumnya, yaitu kurangnya area penghijauan tajuk ke tajuk. Sebenarnya pada tahun 2024 sudah banyak dilakukan revitalisasi taman, namun pepohonan yang ditanam masih belum memenuhi ketinggian tajuk.

Berikut capaian kinerja Indeks Kualitas Lahan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut :



Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Adapun nilai indeks Kualitas Lahan Tahun 2024 (sebesar 25,28) diatas lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2023 2023 sehingga dapat naik dalam **kategori kurang** (yakni dalam rentang $25 \leq x \leq 50$) dari kategori sangat kurang. Solusi untuk peningkatan kualitas tutupan lahan, yaitu :

- Menambah SDM atau memanfaatkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk melakukan deliniasi RTH dengan mempertimbangkan karakter daerah Kabupaten Sidoarjo serta kemampuan dalam pencapaian target IKL dan terus berkoordinasi dengan DLH Provinsi ataupun KLHK dan turut serta aktif mengikuti bimbingan teknis yang berkaitan dengan pemetaan atau deliniasi RTH dan Indeks Kualitas Lahan;
- Melakukan pemetaan eksisting RTH secara terpadu melalui deliniasi RTH serta dilakukan verifikasi secara mandiri oleh Pemerintah kabupaten Sidoarjo terhadap kondisi eksisting RTH di lapangan dan bekerjasama meningkatkan penghijauan yang dikembangkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan stakeholder terkait;

- engendalian alih fungsi lahan serta mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan penambahan RTH atau vegetasi pepohonan, pengayaan dan pemeliharaan RTH maupun tutupan hutan mangrove yang ada, serta mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota/taman lingkungan, ikut aktif menjaga keindahan, keserasian, serta kebersihan taman kota/taman lingkungan;
- Pemerintah dapat membeli / membebaskan lahan terutama di permukiman padat untuk dibangun menjadi taman atau RTH dan penyerahan fasum perumahan;
- Mempertahankan area hijau (*green belt*) yang sudah ada dan menghindari/ meminimalisir untuk peralihan fungsi sebagai kawasan terbangun, meningkatkan kawasan penyangga (*buffer zone*) antara kawasan industri dengan kawasan permukiman dan mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk turut serta menyediakan RTH di lokasi kegiatan, terutama tanaman pelindung yang bertajuk;
- Menertibkan permukiman atau komersial jasa yang berada di bantaran sungai dan memanfaatkannya sebagai Ruang Terbuka Hijau secara optimal sehingga dapat berfungsi sebagai penahan erosi dan resapan air.

Sasaran 8

Indikator Kinerja 24 : Indeks Resiko Bencana

Tabel 3.77 Realisasi Indeks Resiko Bencana

No	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Target	Realisasi	Capaian	Target akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
24	Indeks Resiko Bencana	Indeks	86,98	96,7	86,83	86,98	111,17	Sangat Baik

Sumber Data : BPBD Kab. Sidoarjo Tahun 2024

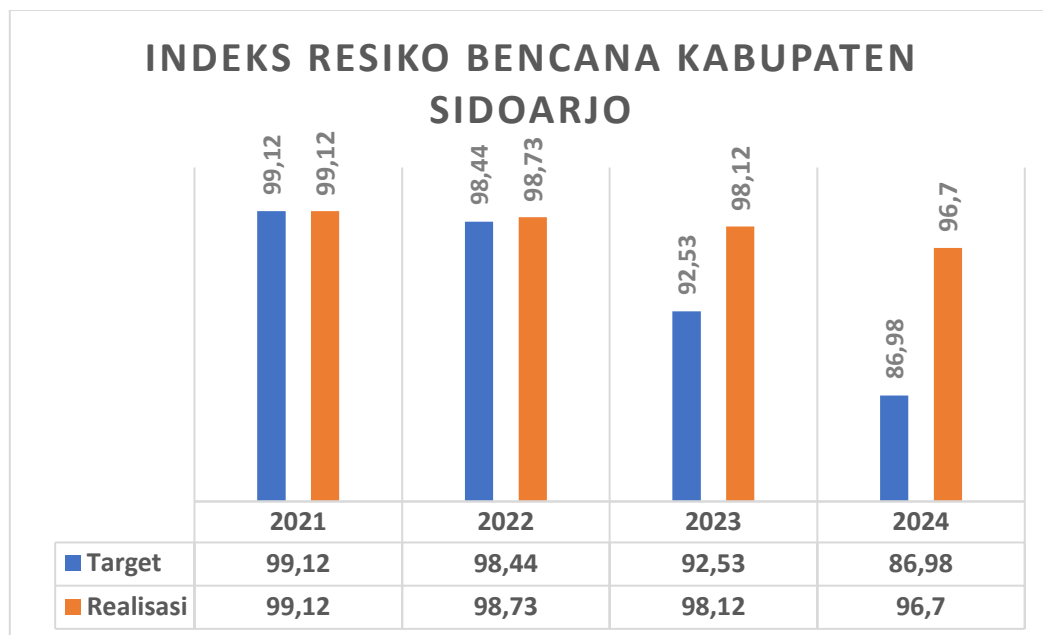
Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat

berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Indeks Resiko Bencana atau IRB Tahun 2024 berada pada skor 96,70 dari target skor 86,98 sehingga dapat dikatakan bahwa Indeks Resiko Bencana belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu pada skor 98,12 maka capaian lebih baik karena sudah ada penurunan.

Dengan realisasi Indeks Resiko Bencana (IRB) sebesar 96,70 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat resiko bencana kategori SEDANG.

Adapun tren Indeks Resiko Bencana dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber Data : BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024

Secara umum perhitungan Indeks Risiko Bencana seperti yang tertera dalam grafik diatas didasarkan pada rumus umum Risiko Bencana, yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni ancaman, kerentanan dan kapasitas. Dari tiga komponen diatas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan representasi dari komponen

kapasitas. Dengan asumsi bahwa jika kapasitasnya meningkat maka risiko bencana akan menurun. Terdapat 7 (tujuh) fokus prioritas utama yang dikembangkan dalam penyusunan IKD antara lain :

- a. Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan
- b. Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu
- c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik
- d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana
- f. Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana
- g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Hasil pengukuran IKD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.78 Hasil Pengukuran IKD 2023

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1.	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,97	0,79	SEDANG
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,97		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,89		
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,85		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,70		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,72		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,85		

Sumber : Laporan Akhir Pengukuran IRB-IKD Kab. Sidoarjo 2024

Tidak tercapainya target dikarenakan untuk penanganan kejadian kebakaran masih belum memenuhi SPM, diantaranya belum terpenuhinya posko dan armada, serta sarpras sudah banyak yang tidak layak fungsi. Perlu disusun mitigasi dan kajian resiko bencana untuk 5 tahunan.

Dari indeks resiko bencana terdapat perbandingan antara realisasi dan target akhir RPJMD yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.79 Perbandingan Realisasi 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Resiko Bencana	96,7	86,98	111,17

Dari perbandingan antara realisasai dan target akhir RPJMD, menunjukkan bahwa realisasi melampaui target akhir RPJMD. Dengan realisasi ada pada nilai 96,7 dan target akhir pada nilai 86,98.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Resiko Bencana dapat tercapai optimal, yaitu :

1. Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah untuk penguatan Sistem Peringatan Dini / *Early Warning System* (EWS) bencana
2. Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui Sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana baik di wilayah maupun lingkungan pendidikan
3. Melakukan review SOP / mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak
4. Peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat bencana

Tabel 3.80 Realisasi Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan Ke-5: Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya					
Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,17	82,67	101,85	BPS

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development*

Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and healthy life*)

Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

- a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
- b. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 adalah 82,67 dari target 81,17 atau mencapai target dengan capaian 101,85%. Sebagaimana pembagian level yang dibuat oleh BPS, IPM Kabupaten Sidoarjo berada pada level “**Sangat Tinggi**”, karena IPM Kabupaten Sidoarjo nilainya diatas 80. Apabila dibanding dengan capaian tahun 2023 yaitu 81,88 maka terdapat kenaikan 0,79 poin atau sekitar 0,01%. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke-1 untuk Kabupaten dan peringkat ke-4 untuk Kabupaten/Kota.

Dalam perkembangannya capaian IPM Kabupaten Sidoarjo dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi, berikut grafik perkembangan IPM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2024.



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Sebagaimana data pada grafik diatas, IPM Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024, sebagai berikut :

- **2021:** 81,01
- **2022:** 81,37 (naik 0,36 poin)
- **2023:** 81,88 (naik 0,51 poin)
- **2024:** 82,67 (naik 0,79 poin)

Dari data ini, terlihat bahwa kenaikan IPM semakin meningkat setiap tahunnya, dengan pertumbuhan yang semakin besar.

Faktor Pendorong Peningkatan IPM

IPM mencerminkan kualitas pembangunan manusia dalam tiga aspek utama:

- **Kesehatan (diukur melalui Angka Harapan Hidup/AHH):** AHH Sidoarjo pada tahun 2024 mencapai 74,91 tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional. Ini menunjukkan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.
 - **Pendidikan (Harapan Lama Sekolah & Rata-rata Lama Sekolah):** Peningkatan IPM juga didukung oleh meningkatnya akses pendidikan dan kualitasnya.

- **Standar Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita):** Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tercermin dari daya beli yang lebih baik.

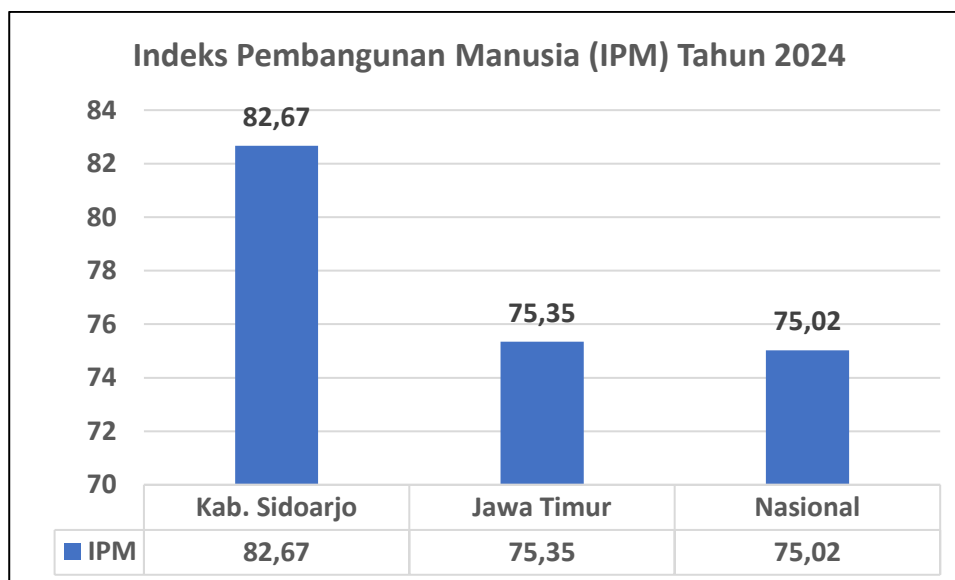
Prediksi dan Tantangan ke Depan

Jika tren kenaikan ini berlanjut, IPM Kabupaten Sidoarjo dapat terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Namun, beberapa tantangan yang perlu diperhatikan adalah:

- Menjaga kualitas layanan kesehatan dan pendidikan seiring pertumbuhan populasi.
- Meningkatkan pemerataan pembangunan agar semua lapisan masyarakat merasakan manfaatnya.
- Menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan dinamika ekonomi dan sosial yang terus berubah.

IPM Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga 2024, dengan tren kenaikan yang semakin besar. Hal ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini, pemerintah daerah perlu terus memperkuat kebijakan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 adalah 82,67. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJM sebesar 81,62, maka IPM Kabupaten Sidoarjo tahun ini sudah melampaui target akhir RPJMD. Demikian juga apabila dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional, IPM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 telah melampaui IPM Jawa Timur 75,35 maupun IPM Nasional sebesar 75,02.



Sumber Data : BPS

Sebagai upaya meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berusaha meningkatkan pencapaian komponen – komponen yang telah mempengaruhi perhitungan IPM, antara lain :

Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

Tabel 3.81 Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

Dimensi/Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
- Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH SPLF 2020)	Tahun	74,80	75,06	75,36	75,63
Pengetahuan					
- Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,94	14,95	14,97	15,22
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,72	10,77	10,78	10,91
Standar Hidup Layak					
- Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	14.578	14.808	15.311	15.710
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		81,01	81,37	81,88	82,67

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Untuk merealisasikan ketercapaian tujuan ke-5, **Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta**

Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya, telah didukung 3 sasaran setrategis, sebagai berikut :

9. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
10. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
11. Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat

Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Tabel 3.82 Persentase Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
25	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,89	15,22	95,78	16,44	92,58	Sangat Baik
26	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,56	10,91	94,38	13,11	83,22	Sangat Baik

Sumber Data : BPS Tahun 2024

Indikator Kinerja 25 : Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Pada tahun 2024, **Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sidoarjo mencapai 15,22 tahun**, sementara target yang ditetapkan adalah **15,89 tahun**, sehingga tingkat pencapaiannya adalah **95,78%**. HLS menggambarkan rata-rata tahun sekolah yang diharapkan akan dijalani oleh anak-anak yang memasuki usia sekolah. Dengan pencapaian 95,78% dari target, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan

kemajuan yang cukup baik dalam sektor pendidikan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target.

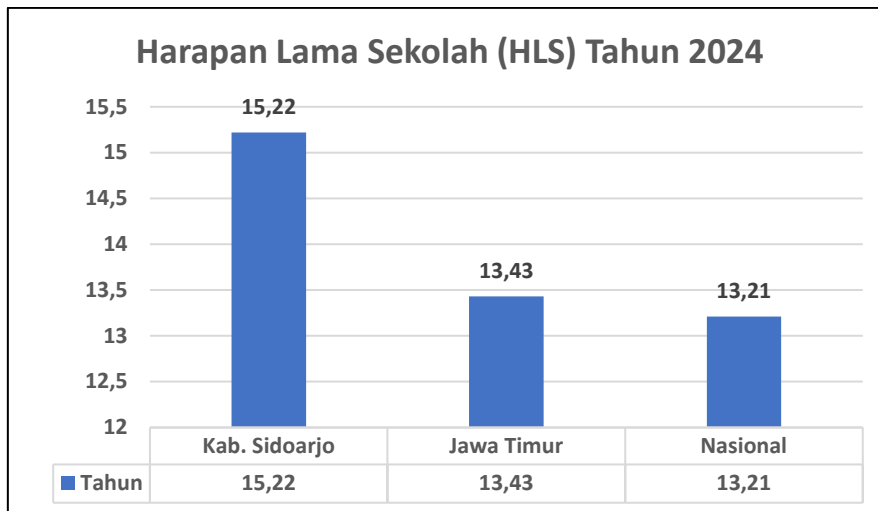
Namun demikian dalam perkembangan capaiannya, tren HLS Kabupaten Sidoarjo dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Berikut tren HLS Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2024 dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber Data : BPS Tahun 2024

Tren HLS Kabupaten Sidoarjo dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2024 telah mengalami lonjakan diangka 15,22 meningkat sebesar 0,25 poin dibandingkan HLS Tahun 2023 sebesar 14,97. Hal ini karena keseriusan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap pendidikan, diantaranya dengan melakukan peningkatan berbagai infrastruktur dan kebutuhan lainnya terkait pendidikan.

Dibandingkan dengan HLS di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Kabupaten Sidoarjo telah melampaui HLS Jawa Timur maupun Nasional.



Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian HLS di Sidoarjo antara lain:

- **Akses Pendidikan:** Ketersediaan sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang berkualitas.
- **Kebijakan Pemerintah:** Program wajib belajar dan dukungan beasiswa yang mendorong anak-anak untuk bersekolah lebih lama.
- **Faktor Ekonomi:** Kondisi ekonomi keluarga yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.
- **Pandemi COVID-19:** Dampak pandemi di tahun-tahun sebelumnya mungkin masih berpengaruh terhadap keberlanjutan pendidikan. Meskipun capaian HLS cukup tinggi, beberapa upaya yang perlu ditingkatkan adalah:
- **Peningkatan Kualitas Pendidikan:** Tidak hanya mengejar lama sekolah, tetapi juga memastikan mutu pembelajaran yang baik.
- **Pengurangan Angka Putus Sekolah:** Memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
- **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan:** Terutama di daerah yang akses pendidikannya masih terbatas.

Kabupaten Sidoarjo telah mencapai 95,78% dari target Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024, menunjukkan kemajuan yang baik dalam sektor pendidikan. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut

untuk mencapai target penuh dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Adapun upaya perbaikan kedepan agar Angka Harapan Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

- Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
- Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu pendidikan.
- Memfasilitasi masyarakat Sidoarjo dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan 10.000 Beasiswa Kuliah kepada anak-anak muda Kabupaten Sidoarjo.

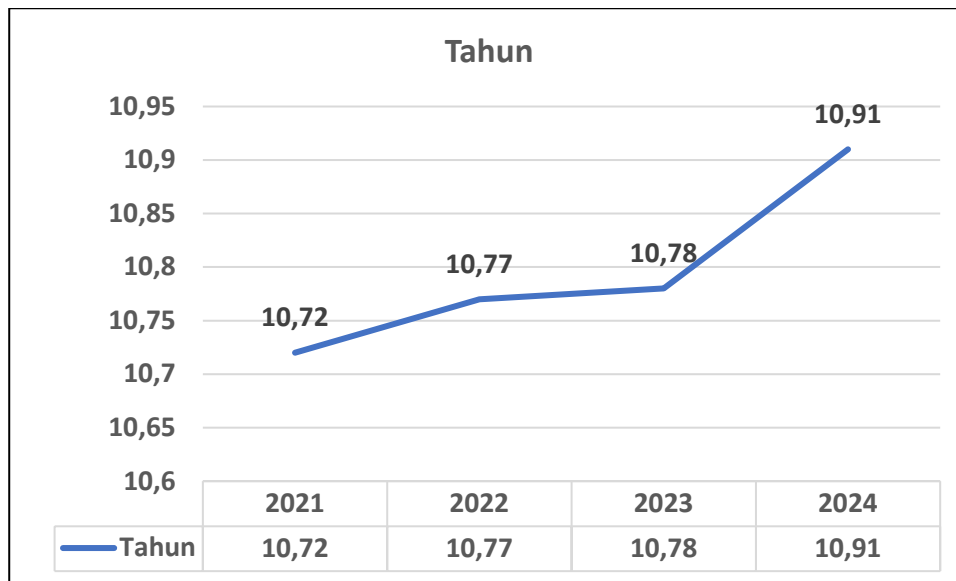
Indikator Kinerja 26 : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tahun 2024, **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sidoarjo mencapai 10,91 tahun**, sementara target yang ditetapkan adalah **11,56 tahun**, sehingga tingkat pencapaiannya sebesar **94,38%**. RLS mencerminkan jumlah rata-rata tahun yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Meskipun belum mencapai target penuh, capaian 94,38% tetap menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan sebagai berikut:

- **2021:** 10,72 tahun
- **2022:** 10,77 tahun
- **2023:** 10,78 tahun
- **2024:** 10,91 tahun

Tren peningkatan ini dapat ilustrasikan sebagaimana grafik berikut :

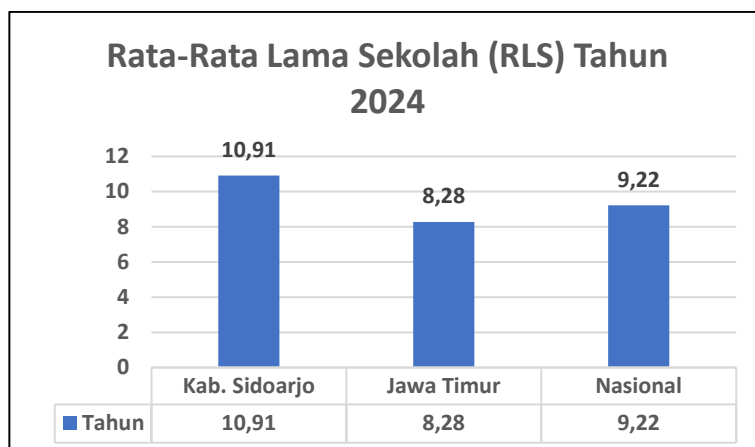


Sumber Data : Data Pokok Pendidikan Tahun 2024

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan kualitas pendidikan di Sidoarjo. Walaupun kenaikannya relatif kecil setiap tahun, tren ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan lama sekolah penduduk.

Apabila capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2024 sebesar 10,91 tahun, dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 13,11 tahun, maka ini menunjukkan bahwa Sidoarjo telah mencapai **83,22%** dari target RPJMD. Masih ada **16,78%** yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target penuh. Hal ini menandakan bahwa meskipun progresnya baik, masih diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan angka RLS, seperti memperluas akses pendidikan menengah dan tinggi serta meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sebesar 10,91 tahun sedangkan Jawa Timur sebesar 8,28 tahun dan Nasional sebesar 9,22 tahun. Artinya Kabupaten Sidoarjo masih diatas Jawa Timur dan Nasional. Berikut grafik perbandingannya :



Beberapa faktor penghambat belum tercapainya target RLS, antara lain:

- **Putus Sekolah:** Masih adanya sebagian penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau lebih tinggi.
- **Faktor Ekonomi:** Keterbatasan biaya pendidikan yang menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah.
- **Akses terhadap Pendidikan Tinggi:** Tidak semua penduduk memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- **Kondisi Sosial dan Budaya:** Beberapa kelompok masyarakat mungkin masih memprioritaskan aspek lain dibandingkan pendidikan tinggi.

Upaya perbaikan untuk meningkatkan nilai/ target rata – Rata lama sekolah adalah :

- **Meningkatkan Akses dan Kesempatan Pendidikan:** Memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk dari keluarga kurang mampu, memiliki akses ke pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
- **Program Kejar Paket dan Pendidikan Nonformal:** Memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk memperoleh ijazah setara.
- **Dukungan Beasiswa dan Insentif Pendidikan:** Memperluas program bantuan pendidikan agar semakin banyak masyarakat yang bisa menyelesaikan sekolah hingga tingkat SMA dan perguruan tinggi.

- **Meningkatkan Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan:** Mendorong pola pikir masyarakat agar lebih memahami pentingnya menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin.

Kabupaten Sidoarjo telah mencapai 94,38% dari target RLS pada tahun 2024. Meskipun masih terdapat gap dengan target, tren ini menunjukkan progres positif dalam peningkatan rata-rata lama sekolah. Diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pencapaian pendidikan penduduk agar target RLS dapat tercapai di tahun-tahun mendatang.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Rata – Rata Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu :

- Mendukung program dan kegiatan peningkatan Mutu Pendidikan yang disusun oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah.
- Mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi) serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan mutu pendidikan.
- Memfasilitasi masyarakat sidoarjo dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan 10.000 Beasiswa Kuliah kepada anak-anak muda Kabupaten Sidoarjo.

Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.83 Realisasi Usia Harapan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
27	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,98	75,63	99,54	76,81	98,46	

Sumber Data : BPS Tahun 2024

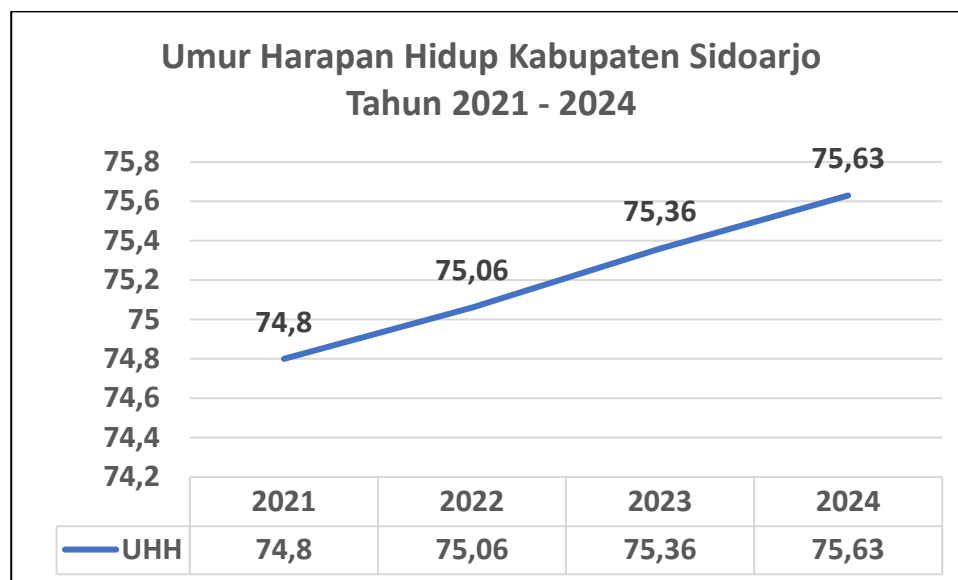
Indikator Kinerja 27 : Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan Istimasi rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan

tren kematian pada saat tertentu. UHH sering digunakan dalam statistik demografi untuk menggambarkan kualitas hidup dan kondisi kesehatan masyarakat suatu daerah.

Umur Harapan Hidup (UHH) dan Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki makna yang sama. Dalam laporan resmi BPS dan dokumen statistik, istilah **Angka Harapan Hidup (AHH)** lebih umum digunakan. Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), Umur Harapan Hidup saat lahir Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 tercapai 75,63 tahun dari target 75,98 tahun atau tercapai sebesar 99,54%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 75,36 tahun, maka terjadi peningkatan 0,27 poin. Berikut data perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2024 :



Sumber Data : BPS Tahun 2024

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar

0,83 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,37 persen per tahun. Pada tahun 2021, UHH Kabupaten Sidoarjo adalah 74,80 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 75,63 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,27 tahun (0,36 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2021-2023 (0,19 persen per tahun).

Faktor Penyebab Peningkatan UHH Peningkatan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Sidoarjo dapat dikaitkan dengan beberapa faktor berikut:

- **Peningkatan Akses Kesehatan:** Kemajuan dalam fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan layanan kesehatan masyarakat, turut berkontribusi terhadap peningkatan usia harapan hidup.
- **Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pola Hidup Sehat:** Masyarakat semakin sadar akan pentingnya gaya hidup sehat, seperti konsumsi makanan bergizi, olahraga rutin, dan pemeriksaan kesehatan berkala.
- **Penurunan Angka Kematian:** Program imunisasi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular turut membantu menekan angka kematian dan meningkatkan usia harapan hidup.
- **Dukungan Program Pemerintah:** Berbagai program kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program sanitasi lingkungan, serta peningkatan infrastruktur kesehatan, turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah **upaya** kedepan untuk meningkatkan umur harapan hidup masyarakat di Kabupaten Sidoarjo :

- **Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM):** UHH merupakan salah satu indikator utama dalam perhitungan IPM. Dengan meningkatnya UHH, kualitas hidup masyarakat Sidoarjo juga semakin membaik.

- **Perlunya Penguatan Layanan untuk Lansia:** Seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup, jumlah penduduk usia lanjut juga akan bertambah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung kesejahteraan lansia, seperti layanan kesehatan geriatri, jaminan sosial, dan fasilitas ramah lansia.
- **Peningkatan Kebutuhan Ekonomi dan Kesehatan:** Dengan lebih banyak penduduk yang hidup lebih lama, tantangan dalam bidang ekonomi dan kesehatan seperti ketersediaan lapangan kerja bagi usia produktif dan pelayanan kesehatan berkelanjutan perlu diperhatikan.

Secara keseluruhan, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang positif dari tahun 2021 hingga 2024. Tren ini mencerminkan perbaikan dalam layanan kesehatan, pola hidup masyarakat yang lebih sehat, serta dukungan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup. Kedepannya, perlu ada upaya lebih lanjut dalam penguatan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk menjaga tren positif ini serta menghadapi tantangan yang muncul akibat meningkatnya usia harapan hidup.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 76,81 Tahun dengan UHH Kabupaten Sidoarjo 2024 sebesar 75,63 Tahun, maka UHH Kabupaten Sidoarjo telah mencapai 98,46% atau kurang 1,18 poin dari target akhir RPJMD. Sedangkan jika dibandingkan dengan UHH penduduk Jawa Timur 75,07 Tahun, serta rata-rata UHH Nasional (Penduduk Indonesia) tahun 2024 mencapai 74,15 Tahun, maka UHH Kabupaten Sidoarjo lebih tinggi dari UHH Penduduk Jawa Timur serta rata-rata penduduk Indonesia.



Pencapaian UHH yang tinggi di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kualitas hidup dan layanan kesehatan yang baik di wilayah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi UHH meliputi akses terhadap layanan kesehatan, tingkat pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan UHH yang lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Meskipun demikian, perbedaan UHH antara Kabupaten Sidoarjo dan rata-rata provinsi serta nasional dapat disebabkan oleh variasi dalam infrastruktur kesehatan, program kesehatan masyarakat, dan faktor demografis lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus meningkatkan program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat guna mempertahankan dan meningkatkan UHH di masa mendatang.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Umur Harapan Hidup dapat tercapai optimal, yaitu :

- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB);
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman pangan lokal;
- Revitalisasi posyandu lansia;
- Optimalisasi posbindu PTM.

- Adapun beberapa kinerja yang mendukung pencapaian angka harapan hidup, antara lain :

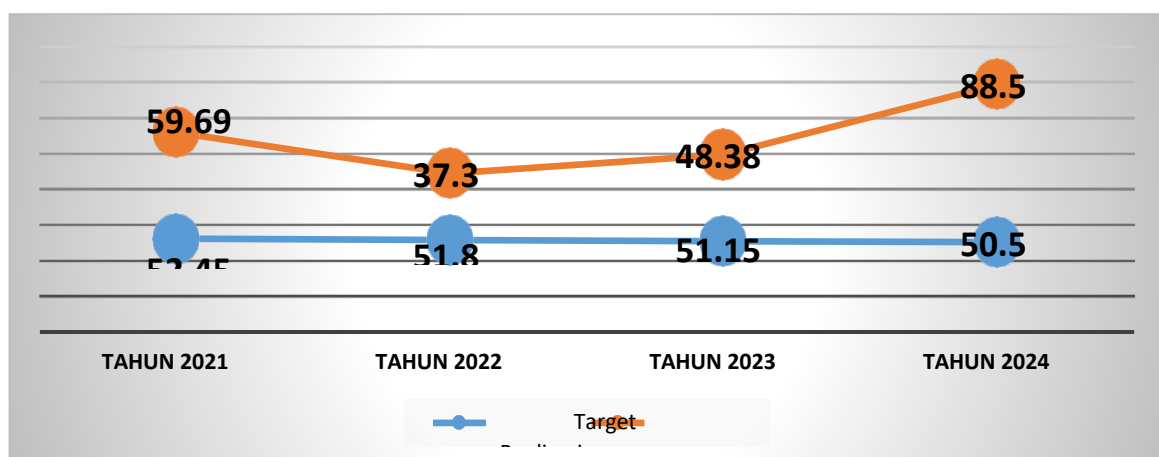
Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu Tahun 2024 tercapai 88,5 per 100.000 kelahiran hidup dari target 50,5 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun demikian angka tersebut masih lebih baik dari standart nasional. Standart Nasional angka kematian ibu adalah 183 per 100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Sidoarjo lebih baik dibandingkan dengan standart nasional.

Adapun tren capaian Angka kematian ibu dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut:

Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2021 – 2024



Sumber : Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kab. Sidoarjo

Upaya yang telah dilakukan agar Angka Kematian Ibu dapat terus menurun, yaitu antara lain :

Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (*Ante Natal Care/ ANC terpadu-10T*);

- Peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dalam APN (*Peer Review Asuhan Persalinan Normal*), kelas ibu, kegawatdaruratan;
- Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil;
- Refreshing deteksi risiko tinggi oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, dll)
- Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan stiker P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk dalam Pokja I (Pendataan, Penandaan, Pendampingan), Pokja 2 (Tabulin & Dasolin). Pokja 3 (Donor Darah), Pokja 4 (Ambulan Desa);
- Melakukan penilaian tatalaksana pada gawat darurat maternal dan neonatal melalui *skill assesment* dengan sasaran tenaga kesehatan (bidan);
- Optimalisasi sistem rujukan : kolaborasi SI CANTIK dengan SIMANIS RSUD, untuk kasus *emergency/* rujukan darurat persalinan;
- Melakukan pengkajian dan pembelajaran *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan pada perinatal dan neonatal.
- Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah
- Evaluasi dan optimalisasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (Penakib) Kabupaten Sidoarjo;
- Aplikasi Software Si Cantik (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak), program bayi sampai dengan anak.

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000

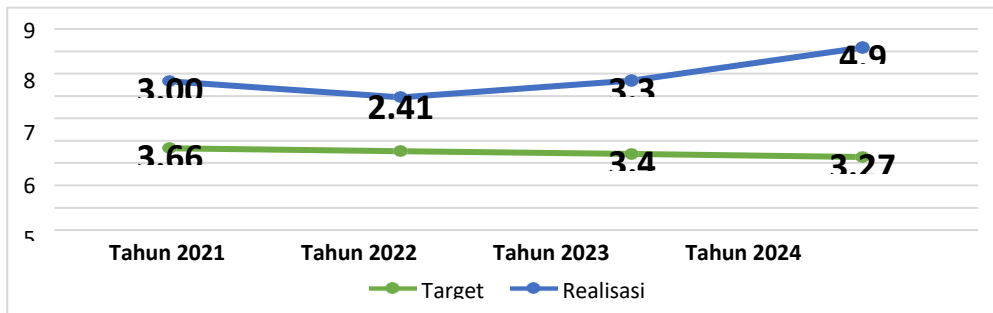
kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka Kematian Bayi Tahun 2024 tercapai 4,9 per 1.000 kelahiran hidup dari target 3,27 per 1.000 kelahiran hidup sehingga belum mencapai target. Namun jika dibandingkan dengan standar nasional Tahun 2024 yakni dibawah 16 per 1.000 kelahiran hidup. Sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Sidoarjo lebih baik dibandingkan dengan standar nasional.

Upaya untuk menekan Angka Kematian Bayi, dengan melaksanakan program-program, antara lain :

- Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi;
- Adanya rujukan dini berencana, maksudnya dari persalinan yang bermasalah (mulai ibu hamil beresiko, ibu bersalin beresiko dan neonatus beresiko) dilakukan monitoring evaluasi untuk kemudian dirujuk ke RS;
- Melaksanakan *skill assesment* pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan;
- Melakukan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus *near miss* dan atau kematian neonatal;
- Pemberian pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) terpadu (10 T);
- Pengembangan aplikasi software si CANTIK (Sidoarjo Cegah Kematian Ibu dan Anak) untuk pemantauan kesehatan anak (mulai dari lahir sampai dengan balita), dipantau tumbuh kembangnya untuk mengantisipasi terjadinya stunting.

Standart Nasional angka kematian bayi adalah 14 per 1.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Sidoarjo berada dibawah standart nasional. Adapun tren capaian Angka kematian ibu dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut ini :

Angka Kematian Bayi Tahun 2021 – 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

Persentase Balita Stunting

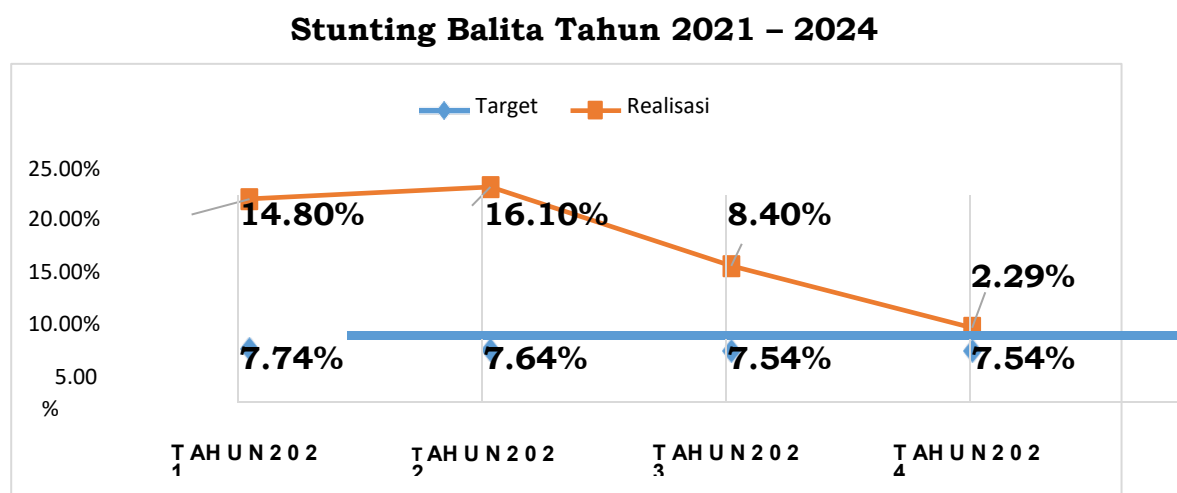
Stunting adalah kondisi serius pada anak yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau anak sangat pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya dan berlangsung dalam waktu lama.

Persentase Balita Stunting Tahun 2024 tercapai 2,29% yang mengalami stunting berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) pengukuran posyandu oleh kader. Apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 yaitu 7,54% maka sudah mencapai target, dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 8,40% maka terdapat penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka penurunan stunting antara lain :

- Mengaktifkan kader pendamping ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronis) cegah stunting;
- Pemberdayaan masyarakat (toga, kader lansia, toma) deteksi dini percepatan penurunan stunting dengan lebih aktif datang ke posyandu;
- Mengaktifkan konseling PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak).

Standar nasional balita stunting adalah nilai Z-Score kurang dari -2,00 SD/standar deviasi (stunted) dan kurang dari -3,00 SD (severely stunted) sehingga dapat dikatakan bahwa persentase balita stunted di Kabupaten Sidoarjo lebih baik jika dibandingkan dengan standar nasional. Angka prevalensi stunting dimaksud diukur berdasarkan data versi E-PPGBM Kementerian Kesehatan.

Adapun tren capaian persentase balita stunted dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

Sasaran 11 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat

Tabel 3.84 Realisasi Indeks Pembangunan Gender

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
28	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,37	94,72*)	99,32	96,25	98,41	Belum Release

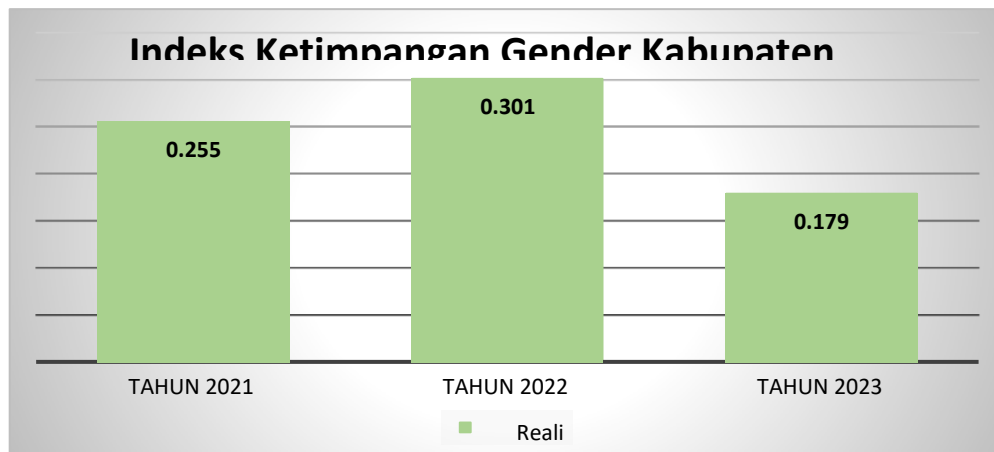
*Keterangan : *) Data Tahun 2023*

Indikator Kinerja 28 : Indeks Pembangunan Gender

Indeks pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Pada tahun 2023, sebagaimana Surat Edaran

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Desember 2023 Nomor : 400.2.2/2407.109.1.2023 bahwa penggunaan Indeks Pembangunan Gender sudah tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sampai laporan ini disusun belum ada rilis dari BPS. Namun untuk capaian Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 adalah 95,27. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2023 dapat diilustrasikan sebagaimana grafik berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Gender, antara lain :

- Melaksanakan kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah
- Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
- Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi

Tabel 3.85 Realisasi Indeks Kesalehan Sosial

Tujuan Ke-6: Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam Masyarakat					
Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	87,3	87,33	100,03	Bappeda

A. Indeks Kesalehan Sosial

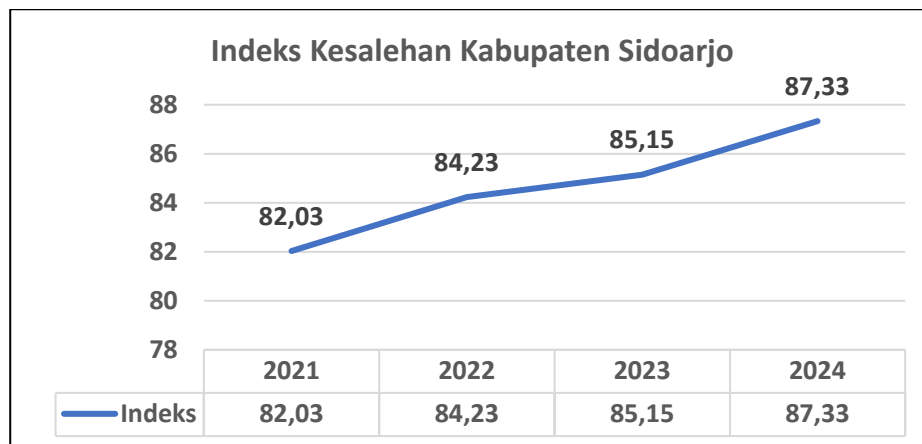
Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas, dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi), dan penjagaan lingkungan.

Dimensi yang mempengaruhi perhitungan Indeks Kesalehan Sosial sebagai berikut :

Tabel 3.86 Dimensi yang Mempengaruhi Perhitungan Indeks Kesalehan Sosial

Komposit	Indeks	Bobot	Skor
Indeks Toleransi	86,64	40%	34,66
Indeks Rasa Aman	83,03	30%	24,91
Indeks Pelestarian Budaya	92,55	30%	27,77
		100%	87,33

Capaian Indeks Kesalehan Sosial tahun 2024 adalah 87,33, telah melampaui yang ditargetkan sebesar 87,30 dan meningkat 2,18 poin dari capaian tahun 2023. Demikian halnya capaian tahun 2023 dengan indeks 85,15 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 84,23 juga mengalami peningkatan 0,92 poin, dan capaian tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dengan indeks sebesar 82,03 juga mengalami kenaikan sebesar 2,2 poin. Dari data tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa tingkat kesalehan masyarakat Sidoarjo terus meningkat lebih baik, artinya tingkat kepedulian masyarakat Sidoarjo terhadap lingkungan social dan lingkungan alam terus meningkat lebih baik. Berikut grafik perkembangannya dari tahun 2021 - 2024:



Sumber Data : Laporan Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2024

Indeks kesalehan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan **tren meningkat** setiap tahun. Rata-rata kenaikan dari tahun ke tahun sekitar **1,76 poin**.

Dari data yang ada, dapat terlihat pola kenaikannya sebagai berikut :

- Tahun **2021-2022** dan **2023-2024** menunjukkan kenaikan yang relatif besar (**lebih dari 2 poin**).
- Tahun **2022-2023** mengalami kenaikan yang lebih kecil (**0,92 poin**), menunjukkan perlambatan.
- Jika tren ini berlanjut, indeks kesalehan di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan terus naik dengan fluktuasi yang wajar.

Beberapa faktor yang memengaruhi tren ini:

- **Program pemerintah daerah** dalam meningkatkan kesalehan sosial, seperti program keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- **Peran institusi keagamaan** dalam mendorong nilai-nilai kesalehan di masyarakat.
- **Kesadaran masyarakat** yang meningkat terhadap norma-norma kesalehan.
- **Dinamika sosial dan ekonomi** yang berdampak pada perilaku sosial dan religius masyarakat.

Jika tren ini berlanjut, indeks kesalehan Sidoarjo pada **2025** diprediksikan bisa mencapai sekitar **89–90**, dengan asumsi kenaikan berkisar antara **1,5–2 poin per tahun**. Tren ini menunjukkan arah yang positif, tetapi perlu dianalisis lebih lanjut apakah ada faktor eksternal yang dapat mempercepat atau memperlambat pertumbuhannya.

Berkenaan nilai indeks kesalehan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024 sudah tercapai 87,33 dan berdasarkan tren capaian dari tahun ketahun selalu mengalami kenaikan kisaran antara 1,5 – 2 poin, maka bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD dengan nilai 92,08 maka dapat diasumsikan pada tahun 2026 akhir RPJMD, nilai indeks kesalehan tersebut terealisasi berkisar antara 90 – 91. Oleh karena itu, agar nilai indeks kesalehan dapat tercapai di akhir RPJMD, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkannya.

Pada pemerintahan di pusat, indeks kesalehan tidak diukur di tingkat nasional, maka realisasi indeks kesalehan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak bisa dibandingkan dengan indeks kesalehan tingkat nasional.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial dan alam sekitarnya, antara lain dengan program kegiatan sebagai berikut :

a. **Program Pemberdayaan Masyarakat**

- **Pelatihan dan edukasi social** : Mengadakan seminar, workshop, atau pelatihan terkait kepedulian sosial dan lingkungan.
- **Program padat karya** : Melibatkan masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan berbasis gotong royong.
- **Bantuan usaha kecil (UMKM sosial)** : Memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada UMKM yang berbasis sosial dan lingkungan.

B. Kegiatan Sosial dan Keagamaan

- **Gerakan zakat, infaq, dan sedekah** : Mengajak masyarakat aktif dalam kegiatan filantropi untuk membantu yang kurang mampu.
- **Program desa/kampung bersih dan ramah lingkungan** : Menyediakan insentif bagi desa yang aktif dalam kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan.
- **Gerakan gotong royong** : Mendorong budaya gotong royong dalam membersihkan lingkungan dan membantu sesama.

C. Bantuan Sosial dan Kesejahteraan

- **Program bantuan sosial (bansos)** : Seperti **PKH (Program Keluarga Harapan)**, bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan pangan.
- **Layanan kesehatan gratis atau subsidi** : Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial.
- **Rumah singgah dan bantuan tunawisma** : Menyediakan tempat tinggal sementara dan rehabilitasi bagi warga yang membutuhkan.

D. Kampanye Kesadaran Lingkungan

- **Gerakan penghijauan** : Menanam pohon, merawat taman kota, dan konservasi lingkungan.
- **Pengelolaan sampah berbasis masyarakat** : Program bank sampah, daur ulang, dan pengurangan plastik.

- **Hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day)** : Mendorong kesadaran akan polusi udara dan gaya hidup sehat.

E. Partisipasi Teknologi dan Media Sosial

- **Aplikasi dan platform digital** : Mendorong partisipasi masyarakat dalam program sosial dan lingkungan melalui aplikasi digital.
- **Kampanye media sosial** : Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan sosial dan lingkungan.

Untuk mewujudkan ketercapaian tujuan ke-6, **Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat** telah didukung oleh 2 sasaran setrategis sebagai berikut :

12. Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat
13. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram

Sasaran 12 : Berkembangnya Nilai-Nilai Budaya dan Agama serta Toleransi dalam Masyarakat

Tabel 3.87 Realisasi Indeks Toleransi dan Indeks Pelestarian Budaya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
29	Indeks Toleransi	Indeks	81,76	86,64	105,97	84,84	102,12	Melampaui Target Akhir RPJMD
30	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	66,76	92,55	138,63	73,60	125,75	Melampaui Target Akhir RPJMD

Sumber Data : BPS Tahun 2024

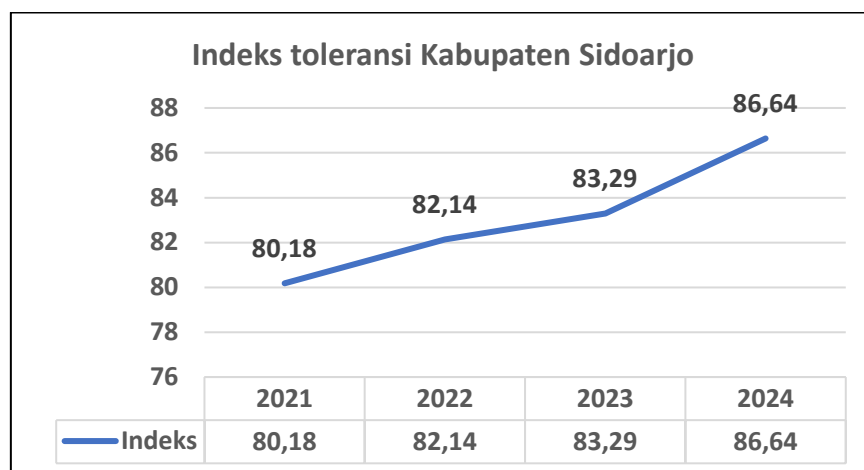
Indikator Kinerja 29 : Indeks Toleransi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengukur Indeks Toleransi karena menyadari pentingnya toleransi bagi pembangunan. Indeks

toleransi digunakan untuk mengukur tingkat toleransi dalam pelaksanaan pembangunan dilihat dari variabel sebagai berikut :

- Variable persepsi terhadap toleransi
- variable sikap terhadap toleransi
- variable Kerjasama antar suku agama berbeda
- variable sikap Pemerintah dalam dukungan antar umat beragama
- Variabel harapan masyarakat terhadap pemerintah dalam terciptanya toleransi di masyarakat

Indeks toleransi Tahun 2024 tercapai 86,64 dari target 81,76 sehingga telah mencapai target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 83,29 maka terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan realisasi Indeks toleransi sebesar 83,29 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa Toleransi Tinggi. Kalau dilihat perkembangannya, indeks toleransi di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ketahun semakin meningkat. Sebagai ilustrasi, berikut grafik perkembangan indeks toleransi di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 –2024



Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 84,84 maka realisasi Indeks toleransi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 sudah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2026. Demikian juga indeks ini

tidak dilakukan ditingkat Nasional, maka juga **tidak bisa dibandingkan dengan Nasional**.

Adapun capaian masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.88 Capaian Masing-masing Variabel

Faktor/Variabel	Nilai Standardized Factor Loadings	Keterangan
Persepsi terhadap toleransi	0,776	Kuat (dominan)
Sikap terhadap toleransi	0,763	Kuat
Kerjasama	0,745	Kuat
Sikap Pemerintah dalam dukungan antar agama	0,736	Kuat
Harapan masyarakat terhadap Pemerintah	0,728	Kuat

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan data yang tertera, dapat dilihat bahwa nilai-nilai *standardized factor loadings* untuk setiap faktor melebihi angka 0,7, yang mengindikasikan adanya hubungan yang kuat antara faktor-faktor tersebut dengan faktor laten (ITol) yang diukur. Secara rinci, variabel-variabel seperti persepsi terhadap toleransi (0,776), sikap terhadap toleransi (0,763), kerjasama antar kelompok (0,745), sikap pemerintah terhadap dukungan antar agama (0,736, serta harapan masyarakat terhadap dukungan pemerintah dalam menciptakan toleransi (0,728) semuanya menunjukkan kontribusi yang signifikan dan saling mendukung terhadap konstruk utama Indeks Toleransi.

Nilai-nilai tersebut tidak hanya mencerminkan kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan konstruk yang diukur, tetapi juga mempertegas bahwa item-item yang berkaitan dengan setiap faktor memiliki pengaruh yang besar terhadap tercapainya pemahaman yang menyeluruh tentang toleransi dalam konteks sosial. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai *standardized factor loadings* pada variabel-variabel ini, semakin besar pula pengaruhnya terhadap

pembentukan dimensi toleransi secara keseluruhan, yang pada gilirannya memperkuat pentingnya pemahaman terhadap setiap faktor dalam upaya meningkatkan toleransi antar umat beragama serta hubungan harmonis dalam masyarakat.

Adapun upaya yang telah dilakukan agar Indeks Toleransi dapat tercapai optimal, yaitu :

- Memfasilitasi optimalisasi pertemuan antar umat beragama untuk melahirkan dialog, diskusi, dan kerjasama dalam rangka membangun toleransi dan mencegah konflik dan perpecahan yang berlatar belakang agama
 - Memperbaiki sikap positif masyarakat dalam bertoleransi dan bekerjasama

Indikator Kinerja 30 : Indeks Pelestarian Budaya

Indeks Pelestarian Budaya disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Indeks Pelestarian Budaya merupakan komposit perhitungan dari Indeks Kesalehan Sosial yang diukur dari Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan, Jumlah cagar budaya yang dirawat, dan sikap masyarakat terhadap kelestarian budaya dan lingkungan.

Variabel yang menjadi dimensi pengukuran Indeks Pelestarian Budaya, sebagai berikut :

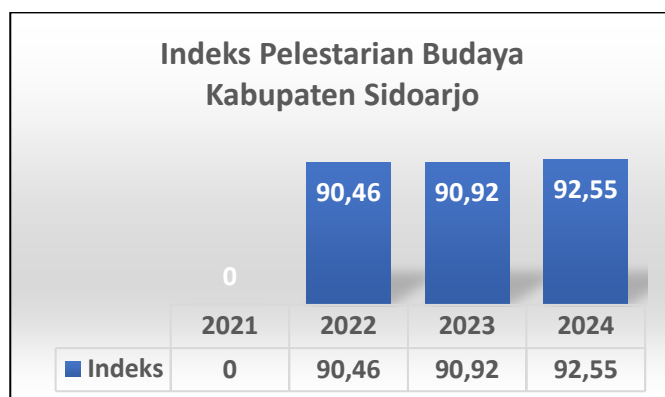
Tabel 3.89 Variabel yang Menjadi Dimensi Pengukuran Indeks Pelestarian Budaya

Komposit	Indeks	Bobot	Skor
Pelestarian Seni dan Budaya	87,80	35%	30,73

Pencatatan Cagar Budaya	96,63	35%	33,82
Sikap masyarakat terhadap Seni Budaya dan Lingkungan	93,34	30%	28,00
		100%	92,55

Capaian Indeks Pelestarian Budaya Tahun 2024 yaitu 92,55 dari target 66,76 sehingga sudah sangat jauh melampaui dari target. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 90,92 maka capaian juga lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD sebesar 90,46 maka Indeks Pelestarian Budaya Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sudah melampaui target akhir RPJMD.

Berikut perkembangan nilai Indeks Pelestarian Budaya di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2024.



Pada tahun 2021 Indeks Pelestarian Budaya di Kabupaten Sidoarjo belum dapat disampaikan karena belum dilakukan survei sehingga angkanya nol. Namun untuk tahun berikutnya tahun 2022 – 2024 perkembangannya sangat baik dan terus meningkat.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pelestarian budaya Sidoarjo, antara lain :

- Menggandeng para seniman dan budayawan Sidoarjo untuk berkolaborasi merawat dan melestarikan budaya Sidoarjo dengan penyelenggaraan event seni budaya bersama;

- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan 11 Situs Bangunan jadi Cagar Budaya;
- Menyediakan Bus Wisata gratis dalam rangka fasilitasi masyarakat untuk mengunjungi obyek wisata berupa situs maupun cagar budaya;
- Melestarikan Udeng Pacul Gowang yang merupakan udeng budaya masyarakat Sidoarjo digunakan sebagai salah satu bagian kelengkapan Seragam Dinas ASN;
- Memasukkan pendidikan seni budaya Sidoarjo kedalam kurikulum Pendidikan atau kegiatan pendidikan pelestarian seni budaya di Sekolah.

Sasaran 13 : Terciptanya Kondisi Masyarakat yang Aman, Nyaman dan Tentram

Tabel 3.90 Realisasi Indeks Rasa Aman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)	Keterangan
31	Indeks Rasa Aman	Indeks	78,97	81,86	103,66	80,77	101,35	Melampaui Target Akhir RPJMD

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Indikator Kinerja 31 : Indeks Rasa Aman

Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Indeks rasa aman digunakan untuk mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan suatu masyarakat dilihat dari aspek kesejahteraan sosial, aspek ekonomi, dan aspek peristiwa politik.

Indeks Rasa Aman Tahun 2024 tercapai 83,03 dari target 80,02 sehingga sudah mencapai target yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 81,86 maka terdapat peningkatan. Dengan realisasi Indeks Rasa Aman sebesar 83,03 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Rasa

Aman Sangat Tinggi. Kategori indeks rasa aman dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 3.91 Klasifikasi Indeks Rasa Aman

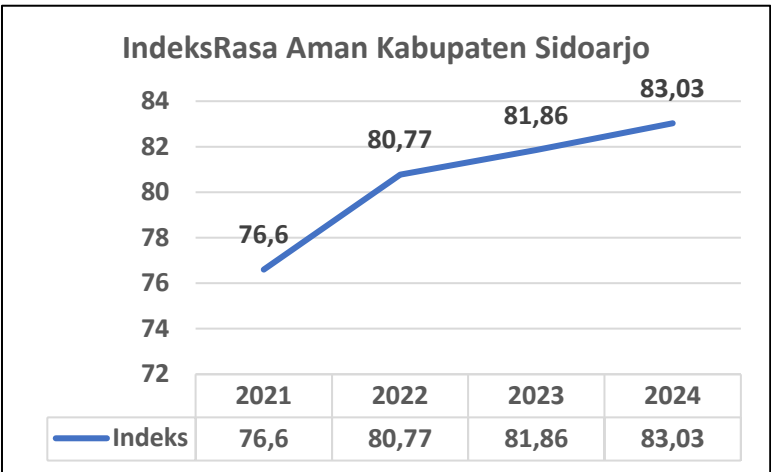
Nilai Indeks Rasa Aman (IRA)	Keterangan
$0 \leq IRA \leq 20$	Rasa Aman Sangat Rendah
$20 < IRA \leq 40$	Rasa Aman Rendah
$40 < IRA \leq 60$	Rasa Aman Sedang
$60 < IRA \leq 80$	Rasa Aman Tinggi
$80 < IRA \leq 100$	Rasa Aman Sangat Tinggi

Adapun capaian masing-masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.92 Capaian Tiap Dimensi

Dimensi	Capaian
Keamanan dari Bencana	80,43
Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	84,51
Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan	87,17
Keamanan dari Kekerasan	75,34
Indeks Rasa Aman	81,86

Berikut tren Indeks Rasa Aman di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 – 2024 :



Sebagaimana grafik diatas, Indeks Rasa Aman di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ketahun semakin meningkat. Tren ini perlu terus dipertahankan agar masyarakat nyaman untuk tinggal di Sidoarjo dan

secara keseluruhan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo bisa berlangsung lancar, aman dan nyaman sesuai harapan semuanya.

Dengan capaian tahun 2024 sebesar 83,03, apabila dibandingkan dengan target tahun 2026 atau akhir RPJMD sebesar 82,12, maka sudah melampaui target tersebut. Jadi untuk target tahun berikutnya perlu dilakukan revaluasi disesuaikan dengan realisasi tahun ini.

Atas ketercapaian kinerja tersebut, upaya yang telah dilakukan agar Indeks Rasa Aman di Kabupaten Sidoarjo dapat tercapai optimal:

- Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang tentram dan aman
- Menertibkan berbagai kasus pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban umum yang merusak sistem tata kelola kota/kabupaten

3.3. Realisasi Capaian Kinerja Anggaran

1. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dalam mengadaptasi ketentuan terkait, pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat kementerian / lembaga (K/L) yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian negaran/ lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut di peroleh dari formula sebagai berikut :

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian kinerja}) - \text{realisasi anggaran}}{\text{Pagu anggaran} \times \text{capaian kinerja}} \times 100 \%$$

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja.

Terkait pagu anggaran pada sasaran satu yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap – tiap indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kinerja rata-rata sasaran dengan rumus sebagai berikut :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_i}{\text{Target Indikator}_i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Program

Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indikator kemudian di akar pangkatkan dengan banyaknya jumlah indikator tersebut. Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah :

Tabel 3.93 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi (%)
			TARGET	REALISAS I	CAPAIAN (%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
	MISI 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha							
	TUJUAN 1	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha						
	Indikator Tujuan		Indeks Reformasi Birokrasi	BB (78,00)	A (86,47)	110,86%			
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	A (81)	BB (75,64)	95,68%	870.818.989.976	847.726.866.291	97,35%
2.		Opini Atas Laporan BPK	WTP	WTP*)	100%				
3.		Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,76	85,63 (3,42)**)	90,96%				
4.		Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100%				

		5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4	3,97	99,25%				
		6.	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (62,00)	Sangat Inovatif (75,96)	122,52%				
		7.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100%				
		Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-1				103,49%	870.818.989.976	847.726.866.291	97,35 %	5%

2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A- (4,3) Sangat Baik	A (4,65) Prima	103,33%	365.657.736.957	318.101.522.923	97,35%	
			Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-2			108%	365.657.736.957	318.101.522.923	86,99%	20%
	MISI 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan								
	TUJUAN 2	:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan							
	Indikator Tujuan :	1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,78	5,54	81,71%				
		2.	Indeks Gini	0,345	0,327	105,22%				
3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,24%	15,98%	98,4%	191.784.002.685	182.364.156.338	97,35%	
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	53,19%	48,57%	91,31%				
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	2,95	1,32	44,75%				
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	1,29%	24,9%	1930,23%				
			Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-3			120,00%	191.784.002.685	182.364.156.338	95,09%	21%
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	2,04%	2,21%	108,33%	100.769.656.225	98.271.512.231	97,35%	
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	26,39%	26,73%	101,33%				
		3.	Persentase Desa Mandiri	28,88%	67,92%	235,18%				
			Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-4			120%	100.769.656.225	98.271.512.231	97,52%	19%
	TUJUAN 3	:	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan							
	Indikator Tujuan	1.	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	7,96	6,49	122,65%				
		2.	Persentase Penduduk Miskin	4,87%	4,53%	107,51%				
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	1.	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	90,24%	93,51%	103,62%	15.851.228.906	14.748.002.335	93,04%	
			Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-5			103,62%	15.851.228.906	14.748.002.335	93,04%	10%
6.	Menurunnya Penduduk Miskin	1.	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	95,13%	95,47%	100,36%	47.594.650.844	45.591.691.652	95,79%	
			Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-6			100,36%	47.594.650.844	45.591.691.652	95,79%	5%

	MISI 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan 12%Lingkungan								
	TUJUAN 4	:	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan							
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Infrastruktur	0,78	0,85	108,97%				
		2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,82	53,35	89,18%				
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1.	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,766	0,822	107,31%	2.154.912.322.344	1.979.145.188.564	95,79%	
		2.	Indeks Infrastruktur Pendidikan	88,64	95,6	107,85%				
		3.	Indeks Infrastruktur Kesehatan	72,32	84,82	117,28%				
			Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-7				110,81%	2.154.912.322.344	1.979.145.188.564	91,84%
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1.	Indeks Kualitas Air	51,55	49,71	96,43%	165.323.560.794	139.417.348.864	95,79%	
		2.	Indeks Kualitas Udara	85,17	71,91	84,43%				
		3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,13	25,28	93,18%				
		4.	Indeks Resiko Bencana	86,98	96,7	86,83%				
			Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-8				90,22%	165.323.560.794	139.417.348.864	84,33%
	MISI 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya								
	TUJUAN 5	:	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya							
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,17	82,67	101,85%				
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,89	15,22	95,78%	834.066.439.089	791.638.288.150	95,79%	
		2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,56	10,91	94,38%				
			Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-9				95,08%	834.066.439.089	791.638.288.150	94,91%
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,98	75,63	99,54%	340.584.028.983	334.669.270.655	98,26%	
		Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-10				99,54%	340.584.028.983	334.669.270.655	98,26%	1,028%
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,37	94,72*)	99,32%	36.157.887.454	35.220.358.661	97,41%	
		Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-11				99,32%	36.157.887.454	35.220.358.661	97,41%	1,92%
	MISI 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.								
	TUJUAN 6	:	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat							
	Indikator Tujuan	1.	Indeks Kesalehan Sosial	87,3	87,33	100,03%				

12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1.	Indeks Toleransi	81,76	86,64	105,97%	156.964.592.881	155.234.132.896	95,79%	
		2.	Indeks Pelestarian Budaya	66,76	92,55	138,63%				
		Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-12				120%				17,59%
13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1.	Indeks Rasa Aman	80,02	83,03	103,76%	41.864.033.867	40.229.722.027	96,10%	
		Rata-rata capaian kinerja sasaran ke-13				103,76%	41.864.033.867	40.229.722.027	96,10%	7%

Sebagaimana tabel diatas, dari 13 sasaran strategis yang sudah ditetapkan terdapat 9 sasaran telah mengalami efisiensi anggaran, artinya sebagian besar program/kegiatan yang sudah ditetapkan benar-benar telah mendukung dalam pencapaian kinerja pada sasaran strategis tersebut. Berkenaan hal tersebut, rata-rata capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sebesar 107,07 persen, sedangkan capaian kinerja anggrannya sebesar 93,93 persen, maka dengan demikian efisiensi sumber daya anggaran Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 adalah 1,14 persen.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran sesuai visi misi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024, telah didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.648.924.599.197,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.94 Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.458.653.825.996,00	1.394.776.724.000,00	95,62
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	834.061.439.089,00	791.633.348.150,00	94,91
	Program Pengelolaan Pendidikan	623.624.786.907,00	602.189.928.350,00	96,56
	Program Pengendalian Perijinan	5.000.000,00	4.940.000,00	98,80
	Program Pengembangan Kebudayaan	743.910.000,00	731.870.000,00	98,38
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	218.690.000,00	216.637.500,00	99,06
2	DINAS KESEHATAN	556.323.737.975,00	534.495.511.592,50	96,08
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	322.501.218.611,00	317.544.161.484,50	98,46
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	215.739.708.992,00	199.826.240.938,00	92,62
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.552.003.352,00	4.725.187.183,00	85,11
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	556.386.420,00	443.245.000,00	79,66
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	11.974.420.600,00	11.956.676.987,00	99,85
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) R.T NOTOPURO SIDOARJO	897.476.388.372,00	792.505.203.219,92	88,30
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	872.147.874.572,00	768.205.148.340,92	88,08
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	25.328.513.800,00	24.300.054.879,00	95,94
4	RUMAH SAKIT SIDOARJO BARAT	157.930.586.551,00	147.888.608.180,00	93,64
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	118.953.186.481,00	109.790.179.161,00	92,30
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	38.977.400.070,00	38.098.429.019,00	97,74

5	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	377.299.190.637,00	313.577.284.420,00	83,11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.442.402.534,00	18.823.079.432,00	92,08
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.479.432.201,00	10.044.271.406,00	95,85
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	31.656.486.506,00	28.646.471.712,00	90,49
	Program Penyelenggaraan Jalan	314.720.869.396,00	256.063.461.870,00	81,36
6	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	97.696.859.276,00	86.600.461.519,00	88,64
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	18.396.800.735,00	14.337.382.300,00	77,93
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	16.789.239.143,00	14.742.850.714,00	87,81
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	26.086.655.390,00	24.405.838.761,00	93,56
	Program Penataan Bangunan Gedung	7.563.801.823,00	5.947.073.560,00	78,63
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	752.375.000,00	500.872.205,00	66,57
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.946.200.934,00	1.823.036.600,00	93,67
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	4.750.000,00	-	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.513.373.526,00	10.746.722.333,00	93,34
	Program Pengembangan Perumahan	3.936.405.005,00	3.815.219.703,00	96,92
	Program Kawasan Permukiman	14.000.000,00	-	-
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.065.800.000,00	2.055.607.619,00	99,51
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	8.596.847.720,00	8.216.357.724,00	95,57
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
	Pogram Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	21.110.000,00	-	-
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	28.432.134.670,00	27.431.936.415,00	96,48

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan			
	Daerah Kabupaten/Kota	16.655.387.295,00	16.206.048.583,00	97,30

	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	11.776.747.375,00	11.225.887.832,00	95,32
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24.053.767.423,00	21.906.449.260,05	91,07
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.731.918.446,00	13.581.302.891,05	92,19
	Program Penanggulangan Bencana	1.759.076.570,00	981.570.109,00	55,80
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	7.562.772.407,00	7.343.576.260,00	97,10
9	DINAS SOSIAL	47.594.650.844,00	45.591.691.652,00	95,79
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.025.394.915,00	7.290.447.826,00	90,84
	Program Pemberdayaan Sosial	7.260.086.774,00	6.621.827.637,00	91,21
	Program Rehabilitasi Sosial	8.316.233.342,00	8.116.471.328,00	97,60
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	23.031.850.719,00	22.665.208.461,00	98,41
	Program Penanganan Bencana	943.692.504,00	890.536.400,00	94,37
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	17.392.590,00	7.200.000,00	41,40
10	DINAS TENAGA KERJA	15.851.228.906,00	14.748.002.335,00	93,04
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.459.953.937,00	8.076.809.855,00	95,47
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	107.482.000,00	105.106.000,00	97,79
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.856.953.461,00	3.276.873.980,00	84,96
	Program Penempatan Tenaga Kerja	858.007.369,00	814.805.300,00	94,96
	Program Hubungan Industrial	2.561.382.139,00	2.467.957.200,00	96,35
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	7.450.000,00	6.450.000,00	86,58
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	36.157.887.454,00	35.220.358.661,00	97,41

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.362.957.493,00	6.988.815.232,00	94,92
--	--	------------------	------------------	-------

	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	196.970.749,00	196.132.500,00	99,57
	Program Perlindungan Perempuan	703.532.142,00	668.075.247,00	94,96
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	261.320.000,00	243.203.925,00	93,07
	Program Perlindungan Khusus Anak	182.855.000,00	179.925.000,00	98,40
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	26.259.978.249,00	25.786.615.936,00	98,20
	Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	379.074.400,00	358.049.400,00	94,45
	Program Pengendalian Kependudukan	811.199.421,00	799.541.421,00	98,56
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	39.766.273.094,00	37.953.999.308,00	95,44
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.867.960.094,00	31.408.326.303,00	95,56
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	5.000.000,00	4.650.000,00	93,00
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.144.856.325,00	1.063.258.200,00	92,87
	Program Penangan Kerawanan Pangan	175.000.000,00	168.498.000,00	96,28
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	146.200.000,00	125.659.500,00	85,95
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.697.923.200,00	2.588.574.005,00	95,95
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	328.418.635,00	312.177.780,00	95,05
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.046.322.522,00	1.965.350.020,00	96,04
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	344.592.318,00	307.818.000,00	89,33
	Program Perizinan Usaha Pertanian	5.000.000,00	4.687.500,00	93,75
	Program Penyuluhan Pertanian	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	141.269.793.371,00	117.510.899.604,00	83,18
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85.937.221.793,00	74.854.739.177,00	87,10

	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.917.373.299,00	2.526.349.176,00	86,60
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	43.351.449.532,00	31.877.320.731,00	73,53
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	131.359.200,00	92.428.036,00	70,36
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	310.671.000,00	240.461.704,00	77,40
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	295.102.239,00	213.743.568,00	72,43
	Program Pengelolaan Persampahan	8.321.866.308,00	7.701.107.212,00	92,54
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	16.502.377.174,00	15.492.665.809,00	93,88
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.994.186.351,00	14.285.960.629,00	95,28
	Program Pendaftaran Penduduk	204.817.569,00	101.510.000,00	49,56
	Program Pencatatan Sipil	321.809.030,00	234.436.000,00	72,85
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	974.839.224,00	870.759.180,00	89,32
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	6.725.000,00	-	-
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	83.717.455.408,00	82.003.025.493,00	97,95
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.353.734.178,00	6.495.704.151,00	88,33
	Program Penataan Desa	19.526.080,00	17.244.000,00	88,31
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	260.256.053,00	218.910.203,00	84,11
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.276.005.215,00	9.897.424.065,00	96,32
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	65.807.933.882,00	65.373.743.074,00	99,34

16	DINAS PERHUBUNGAN	123.466.592.176,00	112.036.317.338,00	90,74
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.619.534.929,00	16.753.549.156,00	95,09
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	99.936.161.337,00	89.447.941.567,00	89,51
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	5.882.685.910,00	5.806.690.615,00	98,71
	Program Pengelolaan Pelayaran	28.210.000,00	28.136.000,00	99,74
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	32.155.869.943,00	31.094.753.106,00	96,70
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.731.119.413,00	12.148.052.319,00	95,42
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4.627.499.762,00	4.398.802.488,00	95,06
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	13.531.879.038,00	13.340.591.569,00	98,59
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	172.000.000,00	170.682.500,00	99,23
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.093.371.730,00	1.036.624.230,00	94,81
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	17.052.200.817,00	16.268.486.738,00	95,40
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.207.099.034,00	7.873.427.963,00	95,93
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	26.380.160,00	26.205.000,00	99,34
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	26.380.160,00	26.205.000,00	99,34
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	10.966.850,00	10.859.000,00	99,02
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	189.039.100,00	181.660.770,00	96,10
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	849.320.325,00	804.543.126,00	94,73
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	4.778.802.876,00	4.511.706.060,00	94,41
	Program Pengembangan UMKM	2.964.212.312,00	2.833.879.819,00	95,60
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.730.722.896,00	16.518.952.610,00	93,17

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.818.921.646,00	12.095.219.444,00	94,35
--	--	-------------------	-------------------	-------

	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.381.499.350,00	2.076.794.700,00	87,21
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	633.912.000,00	625.679.866,00	98,70
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	36.000.000,00	19.500.000,00	54,17
	Program Promosi Penanaman Modal	562.000.000,00	534.500.000,00	95,11
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.298.389.900,00	1.167.258.600,00	89,90
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	54.567.646.871,00	53.010.216.866,00	97,15
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.892.191.970,00	10.297.548.012,00	94,54
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	8.042.974.080,00	7.857.371.216,00	97,69
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.000.000.000,00	999.999.874,00	100,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	32.808.518.771,00	32.114.654.153,00	97,89
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.534.135.600,00	1.478.620.718,00	96,38
	Program Pemasaran Pariwisata	104.996.450,00	102.371.893,00	97,50
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	5.000.000,00	-	-
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	179.830.000,00	159.651.000,00	88,78
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.914.920.981,00	11.344.062.707,00	95,21
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.245.481.416,00	9.726.092.624,00	94,93
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.133.843.078,00	1.093.706.183,00	96,46
	Program Pengelolaan Arsip	520.655.646,00	510.566.150,00	98,06
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	4.990.000,00	4.961.500,00	99,43
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	4.986.608,00	4.033.750,00	80,89
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	4.964.233,00	4.702.500,00	94,73

22	DINAS PERIKANAN	16.631.805.280,00	15.621.460.465,00	93,93
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.378.664.240,00	7.166.977.916,00	97,13
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	87.596.000,00	83.831.600,00	95,70
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	7.880.899.593,00	7.249.641.606,00	91,99
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	119.554.800,00	96.360.852,00	80,60
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.165.090.647,00	1.024.648.491,00	87,95
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	63.087.554.544,00	59.259.527.089,00	93,93
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.151.606.904,00	26.351.744.380,00	97,05
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	25.932.469.360,00	23.820.224.484,00	91,85
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	66.575.000,00	54.575.000,00	81,98
	Program Pengembangan Ekspor	2.572.252.600,00	2.484.668.900,00	96,60
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	298.803.541,00	278.017.352,00	93,04
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	6.907.622.139,00	6.170.554.473,00	89,33
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	153.000.000,00	97.150.000,00	63,50
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	5.225.000,00	2.592.500,00	49,62
24	SEKRETARIAT DAERAH	100.929.504.677,00	92.144.591.140,00	91,30
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77.097.058.737,00	71.159.325.352,00	92,30
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	19.253.411.146,00	17.063.398.934,00	88,63
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	4.579.034.794,00	3.921.866.854,00	85,65
25	SEKRETARIAT DPRD	132.228.033.235,00	103.521.968.396,00	78,29
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.626.204.836,00	55.433.120.422,00	88,51

	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	69.601.828.399,00	48.088.847.974,00	69,09
--	--	-------------------	-------------------	-------

26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.639.962.233,00	19.813.882.962,00	96,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.882.518.894,00	13.386.866.930,00	96,43
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.361.453.302,00	2.193.810.788,00	92,90
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.617.793.179,00	3.492.443.579,00	96,54
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	778.196.858,00	740.761.665,00	95,19
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	677.541.189.743,00	667.489.786.441,00	98,52
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.915.921.861,00	18.094.097.468,00	95,66
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	654.876.632.724,00	646.056.991.341,00	98,65
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.748.635.158,00	3.338.697.632,00	89,06
28	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	51.221.967.533,00	39.905.786.146,00	77,91
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.675.815.903,00	33.438.717.402,00	84,28
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.546.151.630,00	6.467.068.744,00	56,01
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	19.074.854.425,00	17.562.464.375,00	92,07
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.609.791.313,00	13.191.623.199,00	96,93
	Program Kepegawaian Daerah	3.019.670.081,00	2.134.711.179,00	70,69
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.445.393.031,00	2.236.129.997,00	91,44
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	156.001.992.881,00	154.285.625.396,00	98,90
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.839.346.091,00	5.554.316.532,00	95,12
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.495.802.800,00	1.445.922.949,00	96,67
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	13.222.857.000,00	12.853.355.000,00	97,21

	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	134.187.072.020,00	133.285.618.213,00	99,33
--	--	--------------------	--------------------	-------

	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.236.914.970,00	1.126.412.702,00	91,07
31	INSPEKTORAT	20.477.608.955,00	19.621.388.267,00	95,82
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.422.686.451,00	18.813.164.677,00	96,86
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.054.922.504,00	808.223.590,00	76,61
32	KECAMATAN SIDOARJO	31.675.771.067,00	30.593.089.472,00	96,58
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.515.826.757,00	22.632.551.384,00	96,24
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	386.105.000,00	357.305.000,00	92,54
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.581.789.310,00	7.434.083.088,00	98,05
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	21.500.000,00	19.625.000,00	91,28
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	164.250.000,00	143.225.000,00	87,20
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00
33	KECAMATAN CANDI	5.434.536.466,00	5.195.007.088,00	95,59
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.852.003.985,00	4.706.772.088,00	97,01
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	452.167.481,00	368.210.000,00	81,43
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	93.200.000,00	84.480.000,00	90,64
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.700.000,00	31.080.000,00	95,05
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.465.000,00	4.465.000,00	100,00
34	KECAMATAN BUDURAN	6.113.734.928,00	5.857.744.555,00	95,81
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.030.307.928,00	4.903.136.055,00	97,47
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	355.518.000,00	269.262.500,00	75,74

	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	375.920.000,00	355.221.000,00	94,49
--	---	----------------	----------------	-------

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	58.309.000,00	58.150.000,00	99,73
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	293.680.000,00	271.975.000,00	92,61
35	KECAMATAN WONOAYU	5.250.397.061,00	5.093.213.121,00	97,01
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.726.163.641,00	4.632.104.921,00	98,01
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	368.419.420,00	307.713.200,00	83,52
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	56.539.000,00	55.639.000,00	98,41
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94.525.000,00	93.006.000,00	98,39
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
36	KECAMATAN KRIAN	12.078.041.308,00	11.727.267.592,00	97,10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.422.173.111,00	9.172.495.576,00	97,35
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	360.550.837,00	286.973.822,00	79,59
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	83.992.227,00	82.386.975,00	98,09
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50.967.588,00	49.209.938,00	96,55
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.543.820,00	15.143.500,00	97,42
	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	2.144.813.725,00	2.121.057.781,00	98,89
37	KECAMATAN PORONG	10.906.359.626,00	10.382.695.978,00	95,20
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.214.356.626,00	8.811.320.062,00	95,63
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	472.095.000,00	364.202.500,00	77,15
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.146.333.000,00	1.134.390.916,00	98,96
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	4.275.000,00	85,50
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63.575.000,00	63.515.000,00	99,91

	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	4.992.500,00	99,85
--	---	--------------	--------------	-------

38	KECAMATAN KREMBUNG	5.436.844.670,00	5.086.972.837,00	93,56
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.954.529.670,00	4.654.773.837,00	93,95
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	324.910.000,00	277.985.000,00	85,56
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	85.925.000,00	83.040.000,00	96,64
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	66.730.000,00	66.424.000,00	99,54
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.750.000,00	4.750.000,00	100,00
39	KECAMATAN JABON	4.603.526.819,00	4.340.625.302,00	94,29
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.122.387.319,00	3.935.984.002,00	95,48
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	221.410.000,00	177.542.500,00	80,19
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	78.917.500,00	76.015.000,00	96,32
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	176.795.000,00	147.670.000,00	83,53
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.017.000,00	3.413.800,00	84,98
40	KECAMATAN BALONGBENDO	6.112.087.206,00	5.827.558.657,00	95,34
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.647.688.506,00	5.463.164.657,00	96,73
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	274.167.500,00	199.718.000,00	72,85
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	85.256.200,00	81.145.000,00	95,18
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	99.725.000,00	79.468.500,00	79,69
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.250.000,00	4.062.500,00	77,38
41	KECAMATAN TARIK	5.389.970.877,00	5.117.131.431,00	94,94
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.692.141.977,00	4.519.241.181,00	96,32
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	372.590.000,00	301.212.750,00	80,84

	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	270.387.500,00	250.027.500,00	92,47
--	---	----------------	----------------	-------

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	45.976.400,00	42.390.000,00	92,20
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.875.000,00	4.260.000,00	48,00
42	KECAMATAN TAMAN	20.850.819.062,00	20.357.457.606,00	97,63
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.834.512.817,00	15.502.398.471,00	97,90
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	413.327.500,00	335.980.000,00	81,29
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	75.475.000,00	74.637.500,00	98,89
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	106.725.000,00	86.775.000,00	81,31
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.325.000,00	3.325.000,00	100,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.417.453.745,00	4.354.341.635,00	98,57
43	KECAMATAN WARU	5.916.164.208,00	5.719.512.247,00	96,68
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.347.210.447,00	5.188.128.566,00	97,02
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	422.880.713,00	390.971.935,00	92,45
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	54.438.145,00	52.963.805,00	97,29
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	71.082.120,00	70.782.120,00	99,58
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.552.783,00	16.665.821,00	81,09
44	KECAMATAN GEDANGAN	5.723.773.682,00	5.501.000.726,00	96,11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.133.210.432,00	4.969.490.876,00	96,81
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	166.325.000,00	125.065.000,00	75,19
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	119.626.250,00	116.940.000,00	97,75
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	39.904.500,00	39.792.500,00	99,72
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	264.707.500,00	249.712.350,00	94,34

45	KECAMATAN SEDATI	5.631.324.004,00	5.247.888.145,00	93,19
-----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.069.387.164,00	4.756.001.645,00	93,82
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	240.292.840,00	199.878.500,00	83,18
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	93.700.000,00	90.955.000,00	97,07
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	124.994.000,00	99.993.000,00	80,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	102.950.000,00	101.060.000,00	98,16
46	KECAMATAN TANGGULANGIN	5.951.410.533,00	5.586.190.254,00	93,86
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.513.702.533,00	5.257.375.254,00	95,35
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	329.270.000,00	222.265.000,00	67,50
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	38.750.000,00	38.750.000,00	100,00
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63.988.000,00	62.100.000,00	97,05
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00
47	KECAMATAN TULANGAN	5.979.064.781,00	5.766.188.255,00	96,44
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.532.878.981,00	5.360.637.255,00	96,89
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	409.825.000,00	371.066.000,00	90,54
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	12.975.000,00	11.100.000,00	85,55
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	16.935.800,00	16.935.000,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.450.000,00	6.450.000,00	100,00
48	KECAMATAN PRAMBON	6.302.720.000,00	6.108.666.967,00	96,92
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.905.810.000,00	5.790.580.967,00	98,05
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	317.172.500,00	247.342.500,00	77,98
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	43.400.000,00	35.607.000,00	82,04

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	30.137.500,00	29.727.500,00	98,64
--	---	---------------	---------------	-------

	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.200.000,00	5.409.000,00	87,24
49	KECAMATAN SUKODONO	6.119.468.558,00	5.925.234.412,00	96,83
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.636.073.558,00	5.485.912.712,00	97,34
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	297.997.500,00	271.921.700,00	91,25
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	60.150.000,00	59.090.000,00	98,24
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	117.647.500,00	100.790.000,00	85,67
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.600.000,00	7.520.000,00	98,95
	TOTAL ANGGARAN	5.648.924.599.197,00	5.246.635.536.155,47	92,88

Realisasi anggaran tahun 2024 pada 120 program/kegiatan tersebut diatas, rata-rata realisasi capaian anggaran adalah 93,93% dengan capaian kinerja rata-rata 107,07%, artinya penggunaan anggaran telah memenuhi target kinerja lebih dari 100%. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program kegiatan tersebut telah terjadi efektivitas dan efisiensi sumber daya anggaran sebesar 1,14% mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa pencapaian dari 6 tujuan dengan 9 Indikator Tujuan yang merupakan sekaligus sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, 7 indikator telah tercapai dengan nilai capaian 100% keatas dan 2 indikator belum tercapai atau dengan nilai dibawah 100%. Namun demikian secara keseluruhan indikator tujuan tersebut masih masuk dalam katagori **Sangat Baik** atau dengan nilai diatas 90,01%, dan jika dirata-rata capaian kinerja dari 9 indikator tersebut sebesar **103,14%**.

Sedangkan berkenaan dengan capaian kinerja sasaran yang terdiri dari 13 sasaran dengan 31 indikator sasaran atau Indikator Kinerja Daerah (IKD), maka terdapat 16 indikator telah tercapai, 11 tidak tercapai dan 4 indikator belum ada release dari Kementerian Lembaga terkait.

Berdasarkan hasil penilain diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dirata-rata capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 102,78% atau dalam katagori **Sangat Baik**. Jika dilihat dari ketercapaian tujuan dan sasaran dengan 9 indikator tujuan dan 31 indikator sasaran telah diperoleh nilai rata-rata sebesar **186,89%**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 masuk dalam katagori **Sangat Baik**.

Dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran sesuai visi misi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024, telah didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 5.648.924.599.197,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 5.246.635.536.155,47** atau tercapai 92,88% yang terbagi dalam 120 Program kegiatan.

4.2. TINDAKLANJUT

Adapun dari indikator sasaran yang sudah tercapai dengan kategori Sangat Baik dan Baik akan di pertahankan dan ditingkatkan kedepannya, sedangkan pada pencapaian target kinerja dengan kategori kurang akan dilakukan perbaikan dan evaluasi untuk peningkatan di tahun akan datang.

Berikut salah satu indikator sasaran yang masuk katagori Kurang, yaitu :

Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas tahun 2024 adalah 1,32 dari target 2,95, yang berarti realisasinya baru mencapai 44,75% dari target. Namun demikian berdasarkan data yang ada, laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, yaitu :

1. 2020: 2,75% (Pertumbuhan positif, pemulihan setelah awal pandemi COVID-19)
2. 2021: -0,08% (Penurunan tajam, disebabkan oleh dampak pandemi dan faktor eksternal seperti cuaca atau harga komoditas)
3. 2022: 2,27% (Pemulihan signifikan setelah penurunan di tahun sebelumnya)
4. 2023: 1,67% (Pertumbuhan melambat dibandingkan tahun 2022)
5. 2024: 1,32% (Tren perlambatan berlanjut)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi, antara lain :

1. **Peralihan Lahan Pertanian:** Kabupaten Sidoarjo mengalami urbanisasi yang cukup pesat, yang berakibat mengurangi luas lahan pertanian;
2. **Efisiensi Produksi:** Jika inovasi atau modernisasi pertanian tidak cukup cepat diadopsi, pertumbuhan bisa melambat;
3. **Harga dan Permintaan Pasar :** Harga komoditas yang tidak stabil serta daya beli masyarakat juga dapat mempengaruhi sector ini.
4. **Perubahan Iklim:** Faktor cuaca yang tidak menentu dapat menghambat produktifitas sector pertanian;

Upaya peningkatan dalam sektor pertanian di Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

1. Pengembangan Komoditas Unggulan

Mendorong budidaya tanaman hortikultura yang sesuai dengan kondisi lokal, seperti blewah, yang telah banyak ditanam oleh petani di Sidoarjo.

2. Peningkatan Kinerja Industri Pengolahan

Meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri pengolahan hasil pertanian, seperti pabrik gula, melalui modernisasi peralatan, pelatihan tenaga kerja, dan penguatan keterkaitan dengan petani lokal.

3. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja

Mendorong sektor pertanian untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dengan mengembangkan subsektor seperti tanaman bahan makanan, yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja.

4. Kolaborasi dengan Stakeholder

Membangun kerjasama antara pemerintah daerah, Bulog, asosiasi penggiling gabah dan beras, serta pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi hasil pertanian.

5. Perumusan Kebijakan Berkelanjutan

Menyusun kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengidentifikasi sektor unggulan dan merumuskan model pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik wilayah Sidoarjo.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Sidoarjo dapat berkembang lebih optimal, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PDRB daerah.

BAB V
LAMPIRAN

5.1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUBANDI, SH, M.Kn.**
Jabatan : **WAKIL BUPATI SIDOARJO**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sidoarjo, 30 Januari 2025
WAKIL BUPATI SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh
SUBANDI, S.H., M.Kn.

SUBANDI, SH, M.Kn.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibathukum yang sah.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha		
	Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	Nilai SAKIP Kabupaten	A
		Opini Atas Laporan BPK	WTP
		Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,91
		Status Kinerja LPPD	Sangat Tinggi
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,10
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A- Sangat Baik
	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan		
	Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	6,00
		Indeks Gini	0,343
3	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	16,33
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	53,45
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	3,11



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akurasi yang sah.

		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	1,33
4	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase Usaha Mikro Mandiri	2,10
		Persentase Koperasi Berkualitas	28,30
		Persentase Desa Mandiri	17,08
	Tujuan 3 : Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	7,76
		Persentase Penduduk Miskin	4,72
5	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	90,56
6	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	94,80
	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan		
	Tujuan 4: Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Infrastruktur	0,788
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,83
7	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	0,772
		Indeks Infrastruktur Pendidikan	90,67
		Indeks Infrastruktur Kesehatan	72,59
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	Indeks Kualitas Air	51,56
		Indeks Kualitas Udara	85,18
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,14
		Indeks Resiko Bencana	81,76
	Misi 4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya		
	Tujuan 5 : Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,40
9	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	16,12
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	12,09
10	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,31
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,77

	Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.		
	Tujuan 6 : Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	89,66
12	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi	83,30
		Indeks Pelestarian Budaya	70,09
13	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	Indeks Rasa Aman	81,07

Jumlah Anggaran Tahun 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.530.832.967.260,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	887.454.302.388,00	APBD
	Program Pengelolaan Pendidikan	641.456.561.787,00	APBD
	Program Pengendalian Perijinan	6.600.000,00	APBD
	Program Pengembangan Kebudayaan	1.814.903.085,00	APBD
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	100.600.000,00	APBD
2	DINAS KESEHATAN	749.991.016.595,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	477.378.732.670,00	APBD
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	257.148.221.769,00	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.761.767.206,00	APBD
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	619.891.700,00	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	11.082.403.250,00	APBD
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) R.T NOTOPURO SIDOARJO	702.400.000.000,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	692.400.000.000,00	APBD
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.000.000.000,00	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrEsesuaidenganUndangUndang No 11 Tahun 2008 tentangInformasidanTransaksiElektronik, tandatangansecaraelektronikmemilikikekuatanhukumdankabathukum yang sah.

4	RUMAH SAKIT SIDOARJO BARAT	115.567.536.320,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	74.052.000.000,00	APBD
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	41.515.536.320,00	APBD
5	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	341.392.944.520,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	201.517.611.438,00	APBD
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	22.533.390.044,00	APBD
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	17.796.742.646,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Jalan	99.545.200.392,00	APBD
6	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	122.033.589.096,00	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	19.742.692.700,00	APBD
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11.809.198.500,00	APBD
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	28.037.642.996,00	APBD
	Program Penataan Bangunan Gedung	19.846.920.360,00	APBD
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	300.000.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.168.660.307,00	APBD
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	246.500.000,00	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.828.835.389,00	APBD
	Program Pengembangan Perumahan	7.427.335.788,00	APBD
	Program Kawasan Permukiman	52.500,00	APBD
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.967.017.500,00	APBD
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	13.647.033.056,00	APBD
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	10.800.000,00	APBD
	Pogram Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	900.000,00	APBD
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	35.593.470.466,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.651.924.042,00	APBD
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	14.941.546.424,00	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibathukum yang sah.

8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	31.614.772.956,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.848.272.151,00	APBD
	Program Penanggulangan Bencana	2.857.736.725,00	APBD
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	11.908.764.080,00	APBD
9	DINAS SOSIAL	47.728.996.965,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.390.006.531,00	APBD
	Program Pemberdayaan Sosial	4.181.796.530,00	APBD
	Program Rehabilitasi Sosial	10.516.941.179,00	APBD
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	22.856.609.905,00	APBD
	Program Penanganan Bencana	783.642.820,00	APBD
10	DINAS TENAGA KERJA	25.988.598.687,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.894.097.711,00	APBD
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	96.366.350,00	APBD
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	9.453.218.710,00	APBD
	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.182.652.332,00	APBD
	Program Hubungan Industrial	4.351.813.584,00	APBD
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10.450.000,00	APBD
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	51.409.177.117,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.970.360.061,00	APBD
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	2.121.833.427,00	APBD
	Program Perlindungan Perempuan	5.281.925.883,00	APBD
	Program Pemenuhan Hak Anak	674.070.000,00	APBD
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	24.877.181.700,00	APBD & DAK
	Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	3.030.525.800,00	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akurasi yang sah.

	Program Pengendalian Kependudukan	4.453.280.246,00	APBD
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	51.290.143.329,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.887.292.672,00	APBD
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	13.087.500,00	APBD
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.150.657.500,00	APBD
	Program Penangan Kerawanan Pangan	458.516.565,00	APBD
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	416.912.340,00	APBD
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.057.618.376,00	APBD
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.101.713.563,00	APBD
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.017.976.296,00	APBD
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	295.505.297,00	APBD
	Program Perizinan Usaha Pertanian	5.000.000,00	APBD
	Program Penyuluhan Pertanian	885.863.220,00	APBD
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	178.806.867.870,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51.493.803.199,00	APBD
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.527.678.417,00	APBD
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	78.213.470.409,00	APBD
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	260.931.200,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	160.507.200,00	APBD
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	300.591.570,00	APBD
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	471.081.003,00	APBD
	Program Pengelolaan Persampahan	45.376.179.872,00	APBD
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	20.215.053.115,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.309.170.365,00	APBD
	Program Pendaftaran Penduduk	346.991.270,00	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibathukum yang sah.

	Program Pencatatan Sipil	684.470.621,00	APBD
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	866.695.859,00	APBD
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	7.725.000,00	APBD
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	83.531.058.589,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.027.469.901,00	APBD
	Program Penataan Desa	3.751.667,00	APBD
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	154.962.500,00	APBD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	10.037.477.904,00	APBD
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	65.307.396.617,00	APBD
16	DINAS PERHUBUNGAN	139.528.024.826,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.783.812.119,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	104.131.249.292,00	APBD
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	9.569.614.390,00	APBD
	Program Pengelolaan Pelayaran	43.349.025,00	APBD
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	44.218.799.083,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.607.377.944,00	APBD
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	5.637.889.948,00	APBD
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	20.881.992.280,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	799.847.681,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.291.761.230,00	APBD
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	23.842.235.672,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.587.115.010,00	APBD
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	5.040.000,00	APBD
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	5.092.500,00	APBD
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	17.492.445,00	APBD
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	2.743.554.405,00	APBD
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	561.216.099,00	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibathukum yang sah.

	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	6.589.504.491,00	APBD
	Program Pengembangan UMKM	4.333.220.722,00	APBD
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16.300.652.017,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.730.651.523,00	APBD
	Program Pelayanan Penanaman Modal	910.000.494,00	APBD
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	250.000.000,00	APBD
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	172.000.000,00	APBD
	Program Promosi Penanaman Modal	238.000.000,00	APBD
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	73.430.556.192,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.534.550.892,00	APBD
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	11.290.336.550,00	APBD
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.500.000.000,00	APBD
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	40.308.847.200,00	APBD
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.260.730.510,00	APBD
	Program Pemasaran Pariwisata	2.789.800.000,00	APBD
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	604.066.040,00	APBD
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	15.878.060.737,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.765.865.151,00	APBD
	Program Pembinaan Perpustakaan	2.292.049.186,00	APBD
	Program Pengelolaan Arsip	805.721.840,00	APBD
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	4.625.000,00	APBD
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	4.899.780,00	APBD
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	4.899.780,00	APBD
22	DINAS PERIKANAN	26.412.659.957,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.488.056.525,00	APBD
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	606.323.840,00	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibathukum yang sah.

	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	14.679.538.422,00	APBD,DAK
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	138.433.300,00	APBD
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.500.307.870,00	APBD
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	62.715.045.158,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.915.157.532,00	APBD
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	21.422.384.524,00	APBD
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	87.275.000,00	APBD
	Program Pengembangan Ekspor	3.607.657.340,00	APBD
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	395.058.703,00	APBD
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	8.084.337.059,00	APBD
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	112.650.000,00	APBD
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	90.525.000,00	APBD
24	SEKRETARIAT DAERAH	122.509.022.113,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	86.534.310.298,00	APBD
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	31.804.596.815,00	APBD
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	41.701.150.00,00	APBD
25	SEKRETARIAT DPRD	123.169. 417. 312,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	61.134.005.848,00	APBD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	62.035.411.464,00	APBD
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23.727.012.905,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.397.982.883,00	APBD
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2 .041.696.002,00	APBD
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.931.861.100,00	APBD
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.352.707.920,00	APBD
	Program Riset dan Inovasi Daerah	2.765.000,00	APBD
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	806.214.706.802,00	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibathukum yang sah.

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.851.674.674,00	APBD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	779.235.945.116,00	APBD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.127.087.012,00	APBD
28	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	59.814.736.729,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.889.028.832,00	APBD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	15.925.707.897,00	APBD
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	20.990.346.358,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.848.102.690,00	APBD
	Program Kepegawaian Daerah	3.533.499.082,00	APBD
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.608.744.586,00	APBD
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	85.230.478.217,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.203.756.217,00	APBD
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	3.069.073.000,00	APBD
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	20.002.479.000,00	APBD
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	52.464.980.000,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	10.000.000,00	APBD
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.480.190.000,00	APBD
31	INSPEKTORAT	29.140.837.666,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.769.665.706,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.371.171.960,00	APBD
32	KECAMATAN SIDOARJO	40.226.673.444,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.742.037.916,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	397.327.500,00	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.882.373.028,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	25.000.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	155.935.000,00	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibathukum yang sah.

	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.000.000,00	APBD
33	KECAMATAN CANDI	6.231.524.398,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.685.956.003,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	423.842.750,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	61.853.195,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	61.853.195,00	APBD
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.234.450,00	APBD
34	KECAMATAN BUDURAN	7.674.438.642,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota	7.007.420.142,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	602.406.000,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	11.937.500,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.375.000,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.300.000,00	APBD
35	KECAMATAN WONOAYU	5.939.551.614,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.380.707.956,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	352.595.958,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	82.270.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	115.577.700,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.400.000	APBD
36	KECAMATAN KRIAN	14.260.065.337,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.778.160.286,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	483.291.187,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	122.665.513,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	144.169.226,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.794.250,00	APBD
	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	2.702.984.875,00	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibathukum yang sah.

37	KECAMATAN PORONG	12.185.137.367,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.328.847.256,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	410.784.676,00	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.352.286.735,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	53.443.700,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.050.000,00	APBD
38	KECAMATAN KREMBUNG	6.209.392.642,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.605.893.996,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	429.022.590,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	45.060.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	110.666.056,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.750.000,00	APBD
39	KECAMATAN JABON	5.814.176.124,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.280.979.395,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	361.321.150,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	51.985.325,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	107.402.850,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.487.404,00	APBD
40	KECAMATAN BALONGBENDO	6.655.589.635,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.129.685.635,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	373.777.500,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.405.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	117.721.500,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.000.000,00	APBD
41	KECAMATAN TARIK	5.972.729.541,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.258.346.392,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	301.725.000,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	210.709.750,00	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibathukum yang sah.

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	177.923.399,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.025.000,00	APBD
42	KECAMATAN TAMAN	24.457.841.955,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.541.572.426,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	402.091.350,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.875.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	128.065.750,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.800.000,00	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.338.437.429,00	APBD
43	KECAMATAN WARU	6.679.854.720,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.047.256.132,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	492.106.749,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.713.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	78.616.339,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.162.500,00	APBD
44	KECAMATAN GEDANGAN	6.374.782.820,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.731.469.752,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	373.749.893,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	88.475.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	89.388.175,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.700.000,00	APBD
45	KECAMATAN SEDATI	6.347.435.574,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.769.634.680,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	379.525.592,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	45.362.500,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	120.437.802,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	32.475.000,00	APBD
46	KECAMATAN TANGGULANGIN	6.798.670.493,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.260.173.209,00	APBD



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibathukum yang sah.

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	411.689.784,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.337.500,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	121.970.000,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.500.000,00	APBD
47	KECAMATAN TULANGAN	6.707.324.494,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.921.613.082,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	432.304.428,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	44.075.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	242.206.984,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	67.125.000,00	APBD
48	KECAMATAN PRAMBON	7.085.699.160,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.543.958.152,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	462.559.808,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.511.550,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67.036.950,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.632.700,00	APBD
49	KECAMATAN SUKODONO	7.716.871.532,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.747.040.301,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	587.211.731,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	227.650.000,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	127.219.500,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.750.000,00	APBD
	TOTAL ANGGARAN	5.947.354.730.802,00	

Sidoarjo, 30 Januari 2025

WAKIL BUPATI SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

SUBANDI, S.H., M.Kn.

SUBANDI, SH, M.Kn.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibathukum yang sah.

5.2. IKU DAN IKD



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/542 /438.1.1.3/2022

TENTANG

**INFORMASI MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
DAERAH SERTA 17 PROGRAM STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja dan berorientasi hasil percepatan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah serta 17 Program Strategis, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Informasi Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Serta 17 Program Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

5.3 RPJMD



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286));

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.4 PENGHARGAAN

1. 18 Januari 2024

Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan Peduli Olahraga pada ajang KONI Jatim Award 2023, di Harris Hotel and Convention, Surabaya.

2. 25 Januari 2024

Meraih Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 95,95 dari Ombusman RI, di Kantor Sekretariat Dserah Provinsi Jawa Timur.

3. 27 Februari 2024

Menerima Penghargaan Person Of The Year 2023 dari Radar Surabaya dalam rangka HUT Radar Surabaya ke 23 Tahun 2024, di Kantor Radar Surabaya, Kembang Jepun, Surabaya.

4. 29 Februari 2024

Meraih Penghargaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kategori Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik Tahun 2024, di Hotel Bidakara, Jakarta dari Menteri Agama RI.

5. 5 Maret 2024

Menerima Penghargaan Pelaksana Operasi Pemberantasan BKC Illegal Terbaik Tahun 2023 dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Timur dalam acara “Kolaborasi Dengan Indonesia Maju”, di Aula Kanwil DJBC Jatim I, Sidoarjo.

6. 5 Maret 2024

Meraih Penghargaan Adipura Tahun 2023 Kategori Kota Sedang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

7. 6 Maret 2024

Menerima Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI sebagai “Kabupaten Bebas Frambusia” pada peringatan Hari Neglected Tropical Disease se-dunia, di Jakarta.

8. 02 Mei 2024

Mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Atas Laoran Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023, dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, di Kantor BPK Jatim.

9. 08 Agustus 2024

Menerima Penghargaan Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Covergae (UHC) Award 2024 Kategori Madya dari Wapres Ma`ruf Amin di Jakarta.



10. 08 Agustus 2024

Menerima Penghargaan Pelayanan Publik dengan peningkatan inovasi layanan publik yang mudah, cepat, dan bersih dari pungli dna korupsi pada ajang Pemimpin Daerah Award 2024, di Jakarta yang diberikan langsung oleh Menteri PANRB RI.



11. 16 Oktober 2024

Kabupaten Sidoarjo meraih Penghargaan Karnika Graha Abinaya dalam acara Musyawarah Daerah ke – 16 DPD REI Jawa Timur, di Ballroom Shangrilla Hotel, Surabaya.

12. 30 Oktober 2024

Meraih Penghargaan Kabupaten Dengan Capaian Sertifikat Halal Terbanyak di Jawa Timur dalam ajang East Java Halal Industry Festival 2024 diberikan Pj. Sekdaprov Jatim, di Hotel Novotel Samator Surabaya.

13. 14 November 2024

Meraih Penghargaan kategori “Menuju Informatif” pada ajang Komisi Informasi Jawa Timur (KI Jatim) 2024 dengan skor 87.27 menduduki peringkat ke -2.

14. 14 November 2024

Meraih Penghargaan “Kerja Kolaborasi” Terbaik Ke – 3 Kategori Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Innovation Academy 2024 oleh LAN RI (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia) melalui BPSDM Jatim, di Gedung BPSDM Jatim.

15. 21 November 2024

Menerima Penghargaan Keberhasilan Mencapai Open Defecation Free (ODF) 100% pada Hari Kesehatan Nasional Ke-60 dari Provinsi Jawa Timur, di Hotel Aston Sidoarjo.

16. 25 November 2024

Menerima Penghargaan Program Inovasi Pembangunan Terpuji 2024 atas keberhasilan pengelolaan sampah hingga 67% dari Detik Jatim dalam acara Detikjatim Awards, di Dyandra Convention Centre, Surabaya.

17. 05 Desember 2024

Menerima Penghargaan Kabupaten Terinovatif pada ajang Innovatove Goverment Award (IGA) 2024 bekat Inovasi Pelayanan Publik, di Hotel Mercure, Surabaya.



18. 10 Desember 2024

Menerima Penghargaan Kategori Pratama Terbaik I Nasional dalam ajang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2024 dari Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta.

19. 11 Desember 2024

Meraih Penghargaan Top 3 Inovasi Terinovatif pada Inovasi My Retribusi dan Inovasi (Sistem Informasi Keuangan Sidoarjo) Siksda sebagai Top 10 Inovasi Daerah dalam ajang Inotek Award 2024 dari Pemprov Jatim, di Mercure Grand Mirama, Surabaya.